

## **LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BOGOR**

**NOMOR : 21 Tahun 2016**

**TANGGAL : 25 Mei 2016**

**TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(RKPD) KOTA BOGOR TAHUN 2017**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pemerintah Kota Bogor setiap tahun melakukan pembangunan daerah secara terencana dalam rangka perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Kota Bogor. Berbagai sumberdaya yang ada dimanfaatkan dalam pembangunan tersebut, dimana perencanaannya tetap berpegang kepada azas prioritas. Perencanaan dilaksanakan secara spesifik, terukur, didukung ketersediaan sumberdaya serta tepat waktu. Berbagai kriteria perencanaan tersebut harus dipenuhi agar tujuan pembangunan dapat tercapai.

Muatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bogor Tahun 2005-2025 mencantumkan 5 (lima) tahapan proses perencanaan pembangunan lima tahunan yang dalam mencapai perwujudan Visi Kota Bogor yaitu “Kota Jasa yang Nyaman dengan Masyarakat Madani dan Pemerintahan Amanah”. Tolak ukur tercapainya Kota Bogor sebagai Kota Jasa yang nyaman dengan masyarakat madani dan pemerintahan amanah dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut :

1. Berkembangnya perekonomian masyarakat dengan titik berat pada sektor jasa yang mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang ada.
2. Terwujudnya kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.
3. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang beriman, berketerampilan, sehat, cerdas dan sejahtera.
4. Terwujudnya pemerintahan kota yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi supermasi hukum.

Upaya perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kota Bogor dilaksanakan secara bertahap dalam kerangka pembangunan jangka menengah, yang diukur dengan parameter peningkatan kualitas manusia melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah ditentukan bahwa batas bawah status pembangunan manusia terkategori tinggi (IPM=80), dan diproyeksikan dapat terwujud pada tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ketiga yang merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah kabupaten/kota se Jawa Barat.

Tahapan pembangunan jangka menengah daerah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. RPJMD Tahun Pertama (2005-2009) mengacu kepada Renstra Kota Bogor Tahun 2005-2009 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004, diarahkan kepada penataan transportasi, kebersihan, penanggulangan masalah kemiskinan dan penataan pedangang kaki lima.

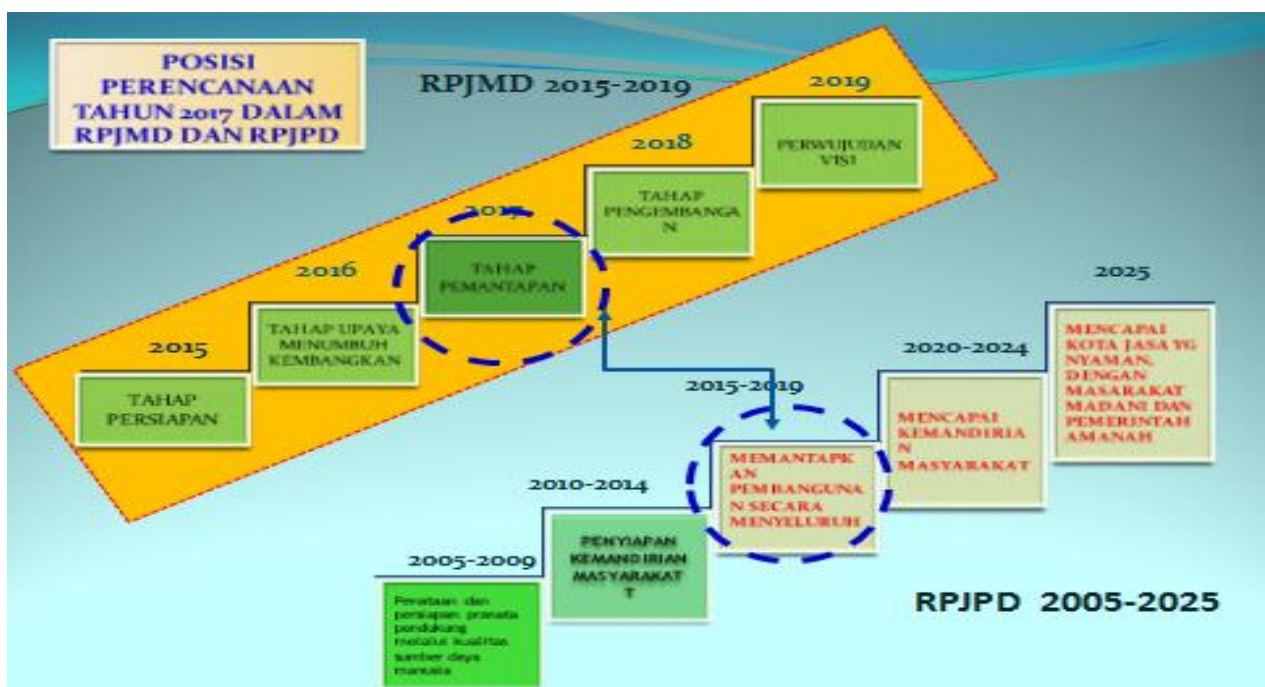
2. RPJMD Tahun Kedua (2010-2014) mengacu kepada RPJMD Kota Bogor Tahun 2010-2014 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2010, diarahkan kepada penataan transportasi, kebersihan, penanggulangan masalah kemiskinan dan penataan pedagang kaki lima atau melanjutkan RPJMD tahun pertama.
3. RPJMD Tahun Ketiga (2015-2019), mengacu kepada RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014, diarahkan kepada penataan transportasi dan angkutan umum, Penataan Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Kota, Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), Penataan ruang publik, pedestrian, taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Transformasi budaya dan reformasi birokrasi serta Penanggulangan Kemiskinan
4. RPJMD Tahun Keempat (2020-2024), ditujukan untuk mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Jasa yang nyaman dengan masyarakat madani dan pemerintahan amanah melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang.

Berdasarkan RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 berada pada tahap Pemantapan untuk memantapkan Pembangunan secara menyeluruh sebagai upaya menyiapkan kemandirian masyarakat Kota Bogor dalam berbagai bidang, hal ini menuntut semua pihak untuk lebih fokus, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Bogor.

RKPD Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja beserta pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan cara mendorong partisipasi masyarakat. Selain itu, RKPD Tahun 2017 juga merupakan acuan bagi OPD dalam menyempurnakan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2017

Adapun posisi RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019 sebagaimana gambar 1.1. berikut :

**Gambar 1.1.**  
**Posisi Perencanaan Pembangunan Tahun 2015-2019 terhadap RPJPD Tahun 2005-2025 Kota Bogor**



RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019 ditujukan untuk lebih menetapkan pembangunan secara menyeluruh dengan memuat 6 (enam) prioritas pembangunan yang perlu mendapat penanganan secara integral lintas OPD yaitu:

1. Penataan Transportasi dan Angkutan Umum.
2. Penataan Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Kota.
3. Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL).
4. Penataan ruang publik, pedestrian, taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
5. Transformasi budaya dan reformasi birokrasi
6. Penanggulangan Kemiskinan

Penentuan dan penetapan prioritas pembangunan daerah yang dituangkan dalam RKPD Kota Bogor Tahun 2017, disusun dengan mengevaluasi kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, sesuai dengan fenomena yang ada pada tahun pelaksanaan RKPD sebelumnya, dengan mempertimbangkan sinergitas antar program dan antar wilayah, serta memperhatikan ketersediaan sumberdaya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah, penyusunan RKPD dilaksanakan melalui koordinasi dengan kepala OPD dan melibatkan pelaku pembangunan lainnya. Sebagai dokumen rencana pembangunan tahunan, RKPD memuat rencana pembangunan daerah selama 1 (satu) tahun, yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dengan masyarakat.

Tahun 2017 ini, merupakan tahun ketiga dalam upaya mencapai tujuan Visi Kota Bogor yaitu “Kota Bogor yang Nyaman, Beriman, dan Transparan” dengan arah Kota Bogor menjadi Kota Pusaka, Kota Hijau dan Kota Cerdas, sesuai dengan RPJMD Tahun 2015-2019 yang dijabarkan kedalam 6 (enam) Misi yaitu:

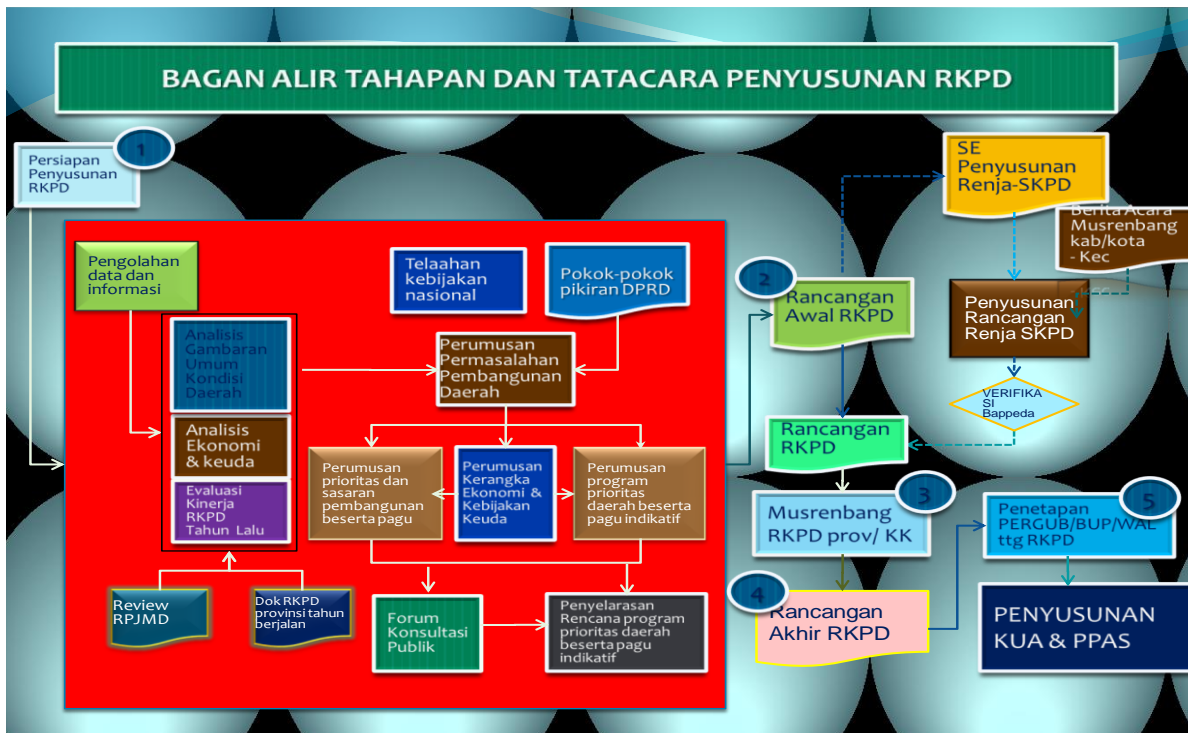
1. Menjadikan Bogor sebagai kota jasa yang berorientasi pada industri pariwisata dan industri kreatif;
2. Menjadikan masyarakat Bogor yang sehat dan makmur;
3. Menjadikan Bogor sebagai kota yang berwawasan lingkungan;
4. Menjadikan masyarakat Bogor yang cerdas dan berwawasan teknologi informasi dan komunikasi;
5. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan transparan;
6. Mengokohkan peran moral agama dan kemanusiaan untuk mewujudkan masyarakat madani;

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2017 mengacu kepada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SISRENBANGNAS) dengan prinsip sebagai berikut :

1. Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Perencanaan Pembangunan Kabupaten / Kota merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Provinsi.
3. Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing Daerah.
4. Perencanaan Pembangunan Daerah mengintegrasikan rencana Tata Ruang dengan rencana Pembangunan Daerah.
5. Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah, sesuai dengan Dinamika Perkembangan Daerah dan Nasional.
6. Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Proses penyusunan RKPD Tahun 2017 dimulai dari penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dilanjutkan dengan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan, Forum OPD, Musrenbang tingkat Kota Bogor, Musrenbang tingkat Provinsi Jawa Barat dan Musrenbang tingkat Nasional, sebagaimana gambar 1.2. berikut:

**Gambar 1.2**  
**Proses penyusunan RKPD Tahun 2017**



## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RKPD Kota Bogor Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat

- Tahun 2013-2018 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2013);
22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor ..... Seri E);
  23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
  24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
  25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
  26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 7 Seri E);
  27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);
  28. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 3 Seri E);

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

RKPD Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan makro tahunan yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan RKPD Tahun 2017 berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor Tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2019 dan menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2017.

Selain dokumen tersebut di atas, RKPD Tahun 2017 juga mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017, sesuai Bab II Bagian Kesatu, Pasal 5 yang mengamanatkan bahwa Penetapan RKPD tahun 2017 untuk Propinsi dilakukan paling lambat pada minggu ketiga bulan Mei tahun 2016 dan



untuk RKPD Kabupaten/Kota paling lambat pada minggu keempat bulan Mei tahun 2016.

Sedangkan Pasal 7 dijelaskan bahwa Bupati/Walikota menyampaikan Peraturan Bupati/Walikota tentang RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Propinsi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan, dan apabila Bupati/Walikota tidak menyampaikan RKPD Kabupaten/Kota tahun 2017, maka evaluasi RAPBD tahun 2017 tidak dapat dilakukan.

Penyampaian Bupati/Walikota tentang RKPD Tahun 2017, sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 disertai dengan lampiran hasil pengendalian kebijakan penyusunan RKPD tahun 2017 oleh Kepala Bappeda dan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Tahun 2017.

Adapun hubungan dokumen perencanaan antara Program Pemerintah Pusat, Program Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat dan Program Pemerintah Daerah Kota Bogor adalah sebagaimana tabel 1.3 berikut.

**Tabel 1.3**  
**Respon RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019 Terhadap Program Nasional dan Propinsi Jawa Barat**

NAWACITA	COMMON GOALS	RPJMD 2015-2019
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Peningkatan Kualitas Perekonomian dan Daya Beli Masyarakat</li> <li>✓ Kemandirian Pangan</li> <li>✓ Pengembangan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata</li> </ul>	<p>Misi 6 :</p> <p>Mengokohkan peran moral agama dan kemanusiaan untuk mewujudkan masyarakat madani</p> <p>Prioritas 5 :</p> <p>Transformasi budaya dan reformasi birokrasi dengan 13 Program antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat</li> <li>2. Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa</li> </ol>
Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Peningkatan Kinerja Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan yang melibatkan Komunitas</li> <li>✓ Pembangunan Perdesaan</li> </ul>	<p>Misi 5 :</p> <p>Mewujudkan pemerintah yang bersih dan transparan</p> <p>Prioritas 5 :</p> <p>Transformasi budaya dan reformasi birokrasi, dengan 13 Program antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan Akuntabilitas Kinerja</li> <li>2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</li> </ol>

<p>Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kemandirian Pangan</li> <li>✓ Pengembangan Infrastruktur Wilayah</li> <li>✓ Pembangunan Perdesaan</li> </ul>	<p>Misi 2 : Menjadikan Bogor kota sehat dan makmur Prioritas 6 : Penanggulangan kemiskinan, dengan 20 Program antara lain : 1. Peningkatan Ketahanan Pangan; 2. Peningkatan Kesempatan Kerja 3. Lingkungan Sehat Perumahan</p>
<p>Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Peningkatan Kinerja Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan yang Melibatkan Komunitas</li> </ul>	<p>Misi 5 : Mewujudkan pemerintah yang bersih dan transparan Prioritas 5 : Tranformasi budaya dan reformasi birokrasi, dengan 13 Program antara lain : 1. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 2. Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa 3. Penataan dan Penguatan Organisasi</p>
<p>Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong <i>land reform</i> dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penanganan Bencana dan Pengendalian Lingkungan Hidup</li> </ul>	<p>Misi 1 : Menjadikan Bogor kota yang cerdas dan berwawasan teknologi informasi dan komunikasi Misi 2 : Menjadikan Bogor kota yang sehat dan makmur Misi 3 : Menjadikan Bogor kota yang berwawasan lingkungan Prioritas 4 : Penataan ruang publik, pedestrian taman dan ruang terbuka hijau Prioritas 6 : Penanggulangan kemiskinan, dengan 20 Program antara lain : 1. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin</p>



		<p>2. Perbaikan Gizi Masyarakat</p> <p>3. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun</p> <p>4. Peningkatan Kesempatan Kerja</p>
<p>Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan, Kepemudaan serta kependudukan</li> <li>✓ Peningkatan Kualitas Kesehatan</li> <li>✓ Peningkatan Kinerja Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan yang Melibatkan Komunitas</li> <li>✓ Pengembangan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata</li> </ul>	<p>Misi 1 : Menjadikan Bogor kota yang cerdas dan berwawasan teknologi informasi dan komunikasi</p> <p>Misi 6 : Mengokohkan peran moral agama dan kemanusiaan untuk mewujudkan masyarakat madani</p> <p>Prioritas 6 : Penanggulangan kemiskinan, dengan 20 Program antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;</li> <li>2. Pendidikan Menengah</li> </ol>
<p>Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Peningkatan Kinerja Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan yang Melibatkan Komunitas</li> </ul>	<p>Misi 1 : Menjadikan Bogor kota yang cerdas dan berwawasan teknologi informasi dan komunikasi</p> <p>Misi 6 : Mengokohkan peran moral agama dan kemanusiaan untuk mewujudkan masyarakat madani</p> <p>Prioritas 5 : Tranformasi budaya dan reformasi birokrasi, dengan 13 Program antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa</li> <li>2. Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat</li> </ol>

## **1.4. Sistematika**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Sistematika
- 1.5. Maksud dan Tujuan

### **BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

- 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing
- 2.5. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
- 2.6. Permasalahan Pembangunan Daerah
- 2.7. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

### **BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

### **BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2. Prioritas Pembangunan Daerah
- 4.3. Tematik Pembangunan Kota Bogor Tahun 2017

### **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH**

- 5.1. Rencana Indikatif Belanja Langsung (BL) Tahun 2017
- 5.2. Rencana Indikatif Belanja Tidak Langsung (BTL) Tahun 2017

### **BAB VI PENUTUP**

## **1.5. Maksud dan Tujuan**

### **Maksud**

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2017, dimaksudkan sebagai :

- a. Pedoman bagi OPD dalam menyusun Rencana Kerja OPD (Renja OPD);
- b. Pedoman bagi Penyusunan KUA dan PPAS serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bogor Tahun 2017.
- c. Mensinergikan berbagai potensi sumber daya baik pemerintah maupun swasta (masyarakat) dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Kota Bogor Tahun 2017.

### **Tujuan**

Dokumen RKPD Tahun 2017 disusun dengan maksud sebagai acuan/pedoman perencanaan dan penganggaran tahunan daerah Tahun 2017. Adapun tujuannya sebagai berikut:

1. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kota Bogor;
2. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan;

3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, Perguruan Tinggi dan Komunitas; serta
5. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

## **BAB II**

### **EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

#### **2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah**

##### **2.1.1 Karakteristik Wilayah Kota Bogor**

Secara geografis, Kota Bogor berada pada posisi diantara 106 derajat 43'30"BT-106 derajat 51'00"BT dan 30'30" LS-6 derajat 41'00" LS, atau kurang lebih 60 Km ke arah Selatan Ibukota Jakarta, dengan luas wilayahnya mencapai 118.50 Km<sup>2</sup>, terbagi atas 6 kecamatan dengan rincian Kecamatan Bogor Selatan mencapai 3081 Ha, Kecamatan Bogor Timur 1015 Ha, Kecamatan Bogor Utara mencapai 1772 Ha, Kecamatan Bogor Tengah mencapai 813 Ha, Kecamatan Bogor Barat mencapai 3285 Ha, Kecamatan Tanah Sareal mencapai 1884 Ha, terdiri dari 68 kelurahan yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bogor dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Kemang, Kecamatan Bojong Gede, dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
- Sebelah Timur : Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.
- Sebelah Barat : Kecamatan Darmaga, Kecamatan Kemang dan Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.
- Sebelah Selatan : Kecamatan Cijeruk dan Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.

Kota Bogor mempunyai wilayah dengan kontur berbukit dan bergelombang dengan ketinggian bervariasi, ketinggian minimum 190 meter dan ketinggian maksimum 330 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah Kota Bogor memiliki lahan datar dengan kemiringan berkisar 0-2 persen, untuk luasan lahan datar seluas 1.763,94 hektar dan tersebar di enam kecamatan. Seluas 8.091,19 hektar merupakan lahan landai dengan kemiringan berkisar 2-15 persen, seluas 1.109,92 hektar merupakan lahan agak curam dengan kemiringan 15-25 persen, seluas 765,21 hektar merupakan lahan curam dengan kemiringan 25-40 persen dan lahan sangat curam seluas 119,74 hektar dengan kemiringan lebih dari 40 persen

Kecamatan Bogor Selatan merupakan daerah di Kota Bogor yang tergolong sangat peka terhadap erosi, karena mempunyai kemiringan lebih dari 40 persen atau sangat curam sehingga daerah tersebut sangat peka terhadap erosi. Jenis tanah hampir diseluruh wilayah Kota Bogor adalah latosol coklat kemerahan dengan luasan 8.496,35 hektar, kedalaman efektif tanah lebih dari 90 centimeter dengan tekstur tanah yang halus serta bersifat agak peka terhadap erosi. Kemudian jenis tanah lain yang juga menyebar di enam Kecamatan yaitu aluvial kelabu dengan luasan 1.157,9 hektar

Kondisi geologi di Kota Bogor yaitu tufa dengan luasan 3.395,17 hektar yang tersebar di enam kecamatan dengan Kecamatan Bogor Selatan menjadi kecamatan dengan penyebaran kondisi geologi tufa terbesar. Sedangkan kipas

aluvial dengan luasan 3.249,98 hektar dan Kecamatan Bogor Utara menjadi kecamatan dengan penyebaran kondisi geologi kipas alluvial

Di wilayah Kota Bogor terdapat enam lokasi mata air, empat lokasi air tanah dalam dan dua lokasi air tanah dangkal yang biasa digunakan untuk air minum non perpipaan. Kapasitas sumber mata air dan air tanah dalam mengalami penurunan dibanding tahun 2011. Demikian pula kapasitas air tanah dalam, dari tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami penurunan.

Hal ini menunjukkan semakin berkurangnya resapan air karena semakin bertambahnya daerah pemukiman di wilayah Kota Bogor. Lahan di Kota Bogor hingga tahun 2012 masih banyak lahan tidak kritisnya yaitu sekitar 81,45 persen (9.651,98 ha). Sementara lahan kritisnya mencapai 1,82 persen (215,47 ha). Sisanya agak kritis 2,49 persen (295,07 ha) dan potensial kritis 14,24 persen (1.687,48 ha). Lahan kritis banyak terdapat di wilayah Kecamatan Bogor Selatan. Semua Kelurahan di daerah tersebut mengandung lahan kritis kecuali Kelurahan Cikaret. Lahan potensial kritis selain di Kecamatan Bogor Selatan juga banyak terdapat di Kecamatan Bogor Barat.

Beberapa danau, situ dan kolam di Kota Bogor ada yang berfungsi untuk irigasi, retensi dan rekreasi. Situ Gede, Situ Panjang dan Situ Curug difungsikan sebagai irigasi dan retensi. Danau Bogor Raya, Kolam Retensi Cimanggu dan Kolam Retensi Taman Sari Persada selain difungsikan sebagai retensi juga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi. Danau atau situ terluas di Kota Bogor adalah Situ Panjang (4,5 ha) dan Situ Gede (4 ha).

Di wilayah Kota Bogor dilalui oleh dua buah sungai, yaitu Sungai Cisadane dan Sungai Ciliwung. Sungai Cisadane mempunyai luas pengaliran 185 kilometer persegi dan Sungai Ciliwung mempunyai luas pengaliran 211 kilometer persegi. Menurut hasil pengukuran debit tahun 2004, setiap satu kilometer persegi Sungai Cisadane memiliki debit 75,8 liter per detik dan setiap satu kilometer persegi Sungai Ciliwung memiliki debit 74,1 liter per detik.

Untuk kualitas air, pada umumnya kualitas air sungai di wilayah Kota Bogor kurang memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001. Hal itu disebabkan beberapa unsur seperti sulfat, fosfat, nitrat dan jumlah total coliform dalam air sungai, melebihi kriteria baku. Kondisi yang mirip juga terdapat pada air situ yang umumnya berkualitas di bawah persyaratan baku mutu. Sedangkan air sumur penduduk, nilai pH-nya cenderung fluktuatif, dan di beberapa lokasi kandungan detergen dan bakteri *e-coli* sedikit diatas kriteria yang disyaratkan

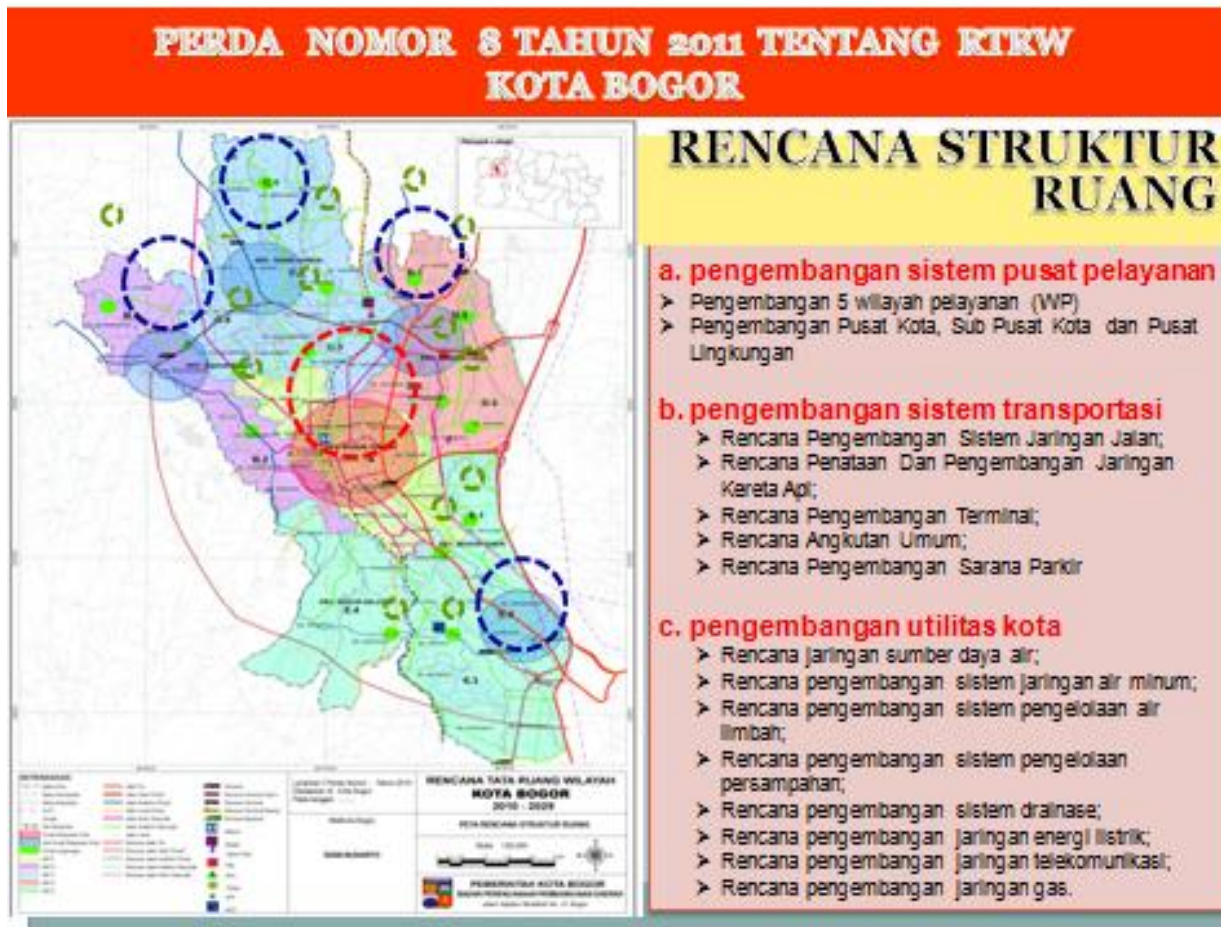
### **2.1.2 Potensi Pengembangan wilayah Kota Bogor**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor Tahun 2011 - 2031, wilayah Kota Bogor terbagi menjadi 5 Wilayah Pelayanan (WP) yaitu :

1. Wilayah Pelayanan (WP) A, meliputi Kecamatan Bogor Tengah dengan lokasi pusat kota adalah kebun raya dan sekitarnya;
2. Wilayah Pelayanan (WP) B, meliputi Kecamatan Bogor Barat dengan lokasi pusat pengembangan kawasan bubulak;
3. Wilayah Pelayanan (WP) C, meliputi Kecamatan Tanah Sareal dengan lokasi pusat pengembangan di kawasan Yasmin-Pasar TU Kemang;
4. Wilayah Pelayanan (WP) D, meliputi Kecamatan Bogor Utara dengan lokasi pusat pengembangan di kawasan BORR Kedung Halang Sentul dan Warung Jambu;
5. Wilayah Pelayanan (WP) E, meliputi Kecamatan Bogor Timur dan Kecamatan Bogor Selatan dengan lokasi pusat pengembangan di kawasan Tajur – R3 Inner Ring Road.

Berikut gambar 2.1. Struktur ruang Kota Bogor

**Gambar 2.1.**  
**Peta Struktur Ruang Kota Bogor**



### **2.1.3 Wilayah Rawan Bencana**

Berdasarkan hasil pemetaan daerah Tim Taruna Tanggap Bencana (Tagana) tahun 2011, di wilayah Kota Bogor sedikitnya terdapat 32 titik rawan bencana alam. Daerah rawan bencana tersebut merupakan daerah rawan longsor dan banjir tersebar di enam wilayah Kecamatan se-Kota Bogor. Daerah rawan longsor berada di Bogor Tengah, Bogor Selatan dan Bogor Barat. Sementara daerah rawan banjir biasanya berada di sisi Sungai Cisadane dan Sungai Ciliwung maupun aliran sungai kecil dari keduanya seperti di daerah Tanah Sareal, Bogor Barat, Bogor Timur dan Bogor Utara.

Titik rawan longsor di wilayah Bogor Tengah diantaranya Kelurahan Kebon Kelapa, Kelurahan Paledang dan Kelurahan Panaragan. Di Tanah Sareal yaitu di Kelurahan Kencana, Kelurahan Cibadak, dan Kelurahan Mekarwangi. Di wilayah Bogor Barat di Kelurahan Pasir Jaya, Cilendek Barat dan Kelurahan Cilendek Timur. Di wilayah Bogor Selatan yaitu di Kelurahan Cipaku, Kelurahan Mulyaharja, Kelurahan Harjasari dan Kelurahan Rangka Mekar. Di wilayah Bogor Timur yaitu di Kelurahan Katulampa, Baranangsiang dan Kelurahan Sukasari. Di wilayah Bogor Utara diantaranya di Kelurahan Cibuluh dan Kelurahan Ciparigi

Titik rawan banjir di Bogor Barat di antaranya di Kelurahan Pasir Jaya, Cilendek Barat dan Cilendek Timur. Kemudian di Bogor Selatan ada di Kelurahan Cipaku, Mulyaharja, Harjasari dan Ranca Mekar yang juga rawan longsor selain rawan banjir bandang. Di wilayah Bogor Timur terdapat di daerah Katulampa, Baranangsiang dan Sukasari. Sedangkan di Bogor Utara di Kelurahan Cibuluh dan Ciparigi

## 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.2.1 Kondisi Umum Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi umum kesejahteraan masyarakat Kota Bogor dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai barometer indikasi peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang meliputi angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan rata-rata pengeluaran riil per kapita (daya beli). Sejak tahun 2010 UNDP sudah merubah metodologi penghitungan IPM dengan metode baru dan direvisi tahun 2011, dimana Pencapaian IPM Tahun 2014 sebesar 73,10 poin naik sekitar 0,24 point dari 72,86 pada tahun 2013, menjadikan Kota Bogor termasuk kategori/kelas pembangunan manusia menengah ke atas (UNDP; nilai IPM 66-80 termasuk kategori/kelas pembangunan manusia menengah ke atas). Selama kurun waktu Tahun 2013-2014 komponen indeks pendidikan, indeks kesehatan dan daya beli mengalami peningkatan.

Komponen Angka Harapan Hidup masyarakat Kota Bogor selalu meningkat setiap tahunnya, hal ini mencerminkan adanya perbaikan kesehatan masyarakatnya dan memberikan peluang untuk hidup sampai dengan 72,56 tahun secara rata-rata. Sedangkan untuk komponen Angka Harapan Sekolah sebagai pengganti komponen Angka Melek Huruf sudah menunjukkan pada angka 12,23 tahun pada tahun 2014, artinya secara rata-rata penduduk Kota Bogor yang berusia 7 tahun pada saat ini mempunyai harapan untuk dapat bersekolah selama 12,23 tahun (hingga kelas 3 SLTA).

Rata-rata Lama Sekolah penduduk kota Bogor pada tahun 2014 adalah 10,01 tahun atau kurang lebih bersekolah sampai dengan kelas 2 SMA. Pengeluaran perkapita riil di Kota Bogor tahun 2014 sebesar Rp.10.532 000,- per kapita per tahun meningkat sekitar 0,42 persen dibandingkan dengan tahun 2013. Adapun perbedaan perhitungan IPM dengan mempergunakan metode lama dan baru adalah sebagaimana tabel 2.1 berikut :

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Metode Lama dan Metode Baru**

DIMENSI	METODE LAMA		METODE BARU	
	UNDP	BPS	UNDP	BPS*
Kesehatan	Angka Harapan Hidup (e <sub>0</sub> )	Angka Harapan Hidup (e <sub>0</sub> )	Angka Harapan Hidup (e <sub>0</sub> )	Angka Harapan Hidup (e <sub>0</sub> )
Pengetahuan	1. Angka Melek Huruf	1. Angka Melek Huruf	1. Expected Years of Schooling	1. Expected Years of Schooling
	2. Kombinasi APK	2. Mean Years of Schooling	2. Mean Years of Schooling	2. Mean Years of Schooling
Standar Hidup Layak	PDH per kapita (PPP US\$)	Pengeluaran per kapita Disesuaikan	PMB per kapita (PPP US\$)	Pengeluaran per kapita Disesuaikan
Agregasi	Rata-rata Hitung $IPM = \frac{1}{3}(I_{kesehatan} + I_{pengetahuan} + I_{daya\ beli})$		Rata-rata Ukur $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pengetahuan} \times I_{daya\ beli}}$	

\* akan dievaluasi

Ada beberapa alasan mengenai perubahan metodologi dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia yaitu :

1. Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan



kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik

2. PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah
3. Penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

Sedangkan yang berubah dalam perhitungan IPM adalah Indikator dan metode perhitungan yaitu :

1. Indikator : Angka melek huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah dan Indikator Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita:
2. Metode perhitungan : Metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik

Adapun pencapaian indikator kesejahteraan masyarakat pada tahun 2012-2014, sebagaimana tabel 2.2 berikut :

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2012-2014**

Indikator	Tahun		
	2012	2013	2014
IPM	<b>72.25</b>	<b>72.86</b>	<b>73.10</b>
a. Indeks Pendidikan	65.28	66.81	67.33
• Angka Harapan Lama Sekolah - HLS ( <i>Expected Years of Schooling -EYS</i> )	11,98	12,10	12,23
• Rata-rata Lama Sekolah - RLS ( <i>Mean Years of Schooling - MYS</i> )	9,60	9,96	10,01
b. Indeks Kesehatan	80.86	80.87	80.89
- Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)	72,56	72,57	72,58
c. Indeks Daya Beli	71.45	71.59	71.72
- Pengeluaran/kapita/tahun (Rp)	10.439,59	10.488,49	10.532,34

Sumber Statistik Daerah Kota Bogor 2015

### 2.2.2 Kondisi Pemerataan Ekonomi

Perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari besarnya PDRB serta cepat atau lambatnya perekonomian wilayah tersebut yang dilihat dari kinerja laju pertumbuhan ekonominya. Perekonomian Kota Bogor ditinjau dari PDRB nya senantiasa mengalami pertumbuhan yang signifikan, walaupun mengalami sedikit perlambatan pada tahun 2013 dan 2014 sebagai efek krisis nasional dan global. PDRB Kota Bogor tahun 2014 adalah 29, 102 triliun rupiah. Adapun rinciannya sebagaimana tabel 2.3 berikut :

**Tabel 2.3**  
**Nilai PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha**  
**di Kota Bogor (Juta Rupiah)**

Kategori	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	200.988,74	211.573,26	221.051,69	231.430,61	241.575,71
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	3.822.693,47	4.143.202,83	4.472.511,44	4.837.978,73	5.393.074,47
D	Pengadaan Listrik dan Gas	899.195,89	1.011.352,81	1.267.307,38	1.514.730,25	1.960.761,41
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah dan Daur Ulang	19.158,72	21.603,61	24.469,56	27.431,17	28.821,37
F	Konstruksi	2.138.836,93	2.323.578,55	2.620.430,97	2.964.539,77	3.280.102,82
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.225.205,30	4.720.252,91	5.290.523,34	5.927.802,78	6.476.574,46
H	Transportasi dan Pergudangan	2.025.167,89	2.241.937,22	2.549.233,55	2.894.270,96	3.151.053,52
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	830.187,22	911.535,94	1.014.412,50	1.170.326,11	1.294.452,08
J	Informasi dan Komunikasi	759.826,98	892.304,20	1.001.661,83	1.085.808,51	1.284.855,52
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.238.123,83	1.368.609,36	1.523.198,13	1.805.303,27	1.975.033,74
L	Real Estat	398.205,12	448.943,31	510.487,49	580.016,40	653.307,73
M, N	Jasa Perusahaan	349.744,45	417.781,85	471.293,84	533.352,85	593.665,21
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	586.209,72	660.127,28	746.018,69	787.881,00	880.975,97
P	Jasa Pendidikan	438.186,32	483.019,10	576.118,91	660.764,24	753.231,12
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	209.080,47	226.001,57	245.706,73	269.763,21	318.087,37
R, S, T, U	Jasa Lainnya	634.777,53	684.358,01	720.443,42	765.906,80	816.656,40
<b>PDRB Total</b>		<b>18.775.588,58</b>	<b>20.766.181,81</b>	<b>23.254.869,47</b>	<b>26.057.306,66</b>	<b>29.102.228,90</b>

Sumber BPS Kota Bogor 2015

### 2.2.3 Kondisi Kesejahteraan Sosial

Capaian Indeks Kesehatan pada Tahun 2014 yaitu 80.89 poin dengan Angka harapan Hidup (AHH) 72,58 tahun, yang didukung Indikator lainnya antara lain Angka Kematian Bayi (AKB) usia 0-1 tahun sebanyak 55 orang, Angka Kematian Balita (AKABA) usia 0-5 tahun sebanyak 63 orang dan Angka Kematian Ibu (AKI) sebanyak 6 orang

Penemuan kasus penyakit menular seperti diare merupakan penyakit yang terjadi ketika terdapat perubahan konsisten faeses selain frekuensi buang air besar. Cakupan penemuan kasus diare di Kota Bogor pada tahun 2012 sebanyak 21.687 kasus, meningkat pada tahun 2014 menjadi 27.289 kasus. Pneumonia merupakan infeksi akut yang mengenai jaringan paru yang disebabkan oleh bakteri, virus maupun jamur maupun jamur atau bisa terjadi akibat kecelakaan karena menghirup cairan atau bahan kimia. Pada tahun 2012 penemuan pneumonia sebanyak 6.276 kasus dan pada tahun 2014 penemuan pneumonia meningkat menjadi 6.896 kasus. Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus Denge dan ditularkan oleh nyamuk *Aedes Aegypti* yang sebagian besar menyerang anak berumur <15 tahun, namun tidak sedikit pula orang dewasa yang terkena. Pada tahun 2014 ditemukan sebanyak 548 orang menurun dibandingkan tahun 2013 yang berjumlah 1.011 orang.

Penemuan HIV/AIDS sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain berhubungan dengan aktifitas penemuan baik melalui survey maupun VCT yang dilakukan di Puskesmas, Rumah Sakit, Lembaga Kemasyarakatan dan LSM. Jumlah kasus dan kematian karena HIV/AIDS pada tahun 2013 sebanyak 131 kasus, tidak ada yang meninggal, sedangkan pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 404 kasus dan meninggal sebanyak 8 orang. Sehingga sampai dengan tahun 2014 jumlah kumulatif kasus HIV+ yang

ditemukan di Kota Bogor sebanyak 2.450 orang. (sumber Profil Kesehatan 2014)

Capaian Indeks Pendidikan pada Tahun 2014 mencapai 67.33 poin dengan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) 12,23 tahun, dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 10.01 tahun, yang didukung Indikator lainnya antara lain Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat PAUD Sederajat 48,35%, dengan APM PAUD Sederajat 34,33 % , APK SD Sederajat 110.29%, APM SD Sederajat 95,40 % , APK SMP Sederajat 105.44 % , APM SMP Sederajat 91.12 % dan APK SMA Sederajat 102.52 % , APM SMA Sederajat mencapai 87,05 % (Sumber Profil Pendidikan)

Penduduk miskin Kota Bogor hasil pendataan PPLS Tahun 2011 yang masuk kedalam kelompok pertama (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di Indonesia) / Paling Miskin) sebanyak 17.188 RTS (sumber TNP2K). Pada tahun 2012 terjadi penurunan menjadi 16.930 RTS dan pada akhir tahun 2014 menjadi 16.424 RTS.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah Garis kemiskinan, tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Garis kemiskinan Kota Bogor tahun 2012 sebesar Rp. 331.955 meningkat menjadi sebesar Rp. 360.518 pada tahun 2013, adapun Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Bogor pada tahun 2012 sebesar 1,26% dan tahun 2013 sebesar 1,13 % , sedangkan Indeks Keparahannya (P2) Kota Bogor pada tahun 2012 sebesar 0,30 % dan tahun 2013 sebesar 0,21 %.

### 2.3. Aspek Pelayanan Umum

Analisis kinerja atas layanan umum dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, diantaranya urusan pendidikan dan urusan kesehatan dengan rincian sebagai berikut:

#### 2.3.1 Kondisi Pelayanan Pendidikan

Sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan merupakan hak dasar setiap penduduk dan pemenuhan atas hak ini menjadi kewajiban pemerintah. Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab besar agar seluruh penduduk yang mendominasi struktur umur di Kota Bogor memperoleh pendidikan yang layak. Selain jumlah penduduk yang besar, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pendidikan adalah relatif besarnya disparitas/ ketidakmerataan ketersediaan sarana pendidikan.

Jumlah sarana pendidikan di Kota Bogor pada tahun 2014 meliputi jumlah sekolah negeri, jumlah sekolah swasta, jumlah murid dan jumlah guru Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2014 adalah sebagaimana tabel 2.4 berikut :

**Tabel 2.4**  
**Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Sekolah Dasar menurut Kecamatan 2014**

Kecamatan	Negeri			Swasta			Jumlah		
	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru
<b>Bogor Selatan</b>	40	18.016	667	10	2.446	130	50	20.462	797
<b>Bogor Timur</b>	27	9.235	358	7	2.785	158	34	12.020	516
<b>Bogor Utara</b>	41	14.017	579	6	1.451	122	47	15.468	701

<b>Bogor Tengah</b>	40	16.675	625	7	2.994	199	47	19.669	824
<b>Bogor Barat</b>	54	19.468	779	10	5.020	351	64	24.488	1130
<b>Tanah Sareal</b>	95	15.241	554	8	2.697	365	103	17.938	919
2014	297	92.652	3.562	48	17,393	1.325	345	110.045	4.887
2013	298	91.462	3.381	48	15,381	763	346	106.843	4.144
2012	242	95.689	3.617	46	16,058	1.080	288	111.747	4.697
2011	241	95.705	3.619	42	14,997	989	283	110.702	4.608

Sumber BPS Kota Bogor

Sarana pendidikan di Kota Bogor pada tahun 2014 meliputi jumlah sekolah negeri, jumlah sekolah swasta, jumlah murid dan jumlah guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun 2014 adalah sebagaimana tabel 2.5 berikut :

**Tabel 2.5**  
**Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Sekolah Menengah Pertama menurut Kecamatan 2014**

Kecamatan	Negeri			Swasta			Jumlah		
	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru
<b>Bogor Selatan</b>	4	3.588	154	21	5.622	366	25	9.210	520
<b>Bogor Timur</b>	1	913	40	9	1.844	138	10	2.757	178
<b>Bogor Utara</b>	3	2.679	89	11	2.809	206	14	5.488	295
<b>Bogor Tengah</b>	6	5.881	313	18	6.497	355	24	12.378	668
<b>Bogor Barat</b>	2	1.998	91	23	6.993	459	25	8.991	550
<b>Tanah Sareal</b>	4	4.211	195	14	372	267	18	4.583	462
2014	20	19.270	882	96	24,137	1.791	116	43.407	2.673
2013	20	19.212	862	97	26,518	1.503	117	45.730	2.365
2012	20	19.754	957	93	26,502	1.780	113	46.256	2.737
2011	20	19.255	990	91	26,689	1.770	111	45.944	2.760

Sumber BPS Kota Bogor

Sarana pendidikan di Kota Bogor pada tahun 2014 meliputi jumlah sekolah negeri, jumlah sekolah swasta, jumlah murid dan jumlah guru Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun 2014 adalah sebagaimana tabel 2.6 berikut :

**Tabel 2.6**  
**Jumlah sekolah, Murid dan Guru Sekolah Menengah Umum menurut Kecamatan 2014**

Kecamatan	Negeri			Swasta			Jumlah		
	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru
<b>Bogor Selatan</b>	1	1.035	62	9	1.681	139	10	2716	201
<b>Bogor Timur</b>	1	911	64	7	4.875	116	8	5786	180
<b>Bogor Utara</b>	2	1.229	126	5	5.510	149	7	6739	275
<b>Bogor Tengah</b>	2	1.367	116	8	3.375	177	10	4742	293
<b>Bogor Barat</b>	2	2.014	110	8	5.898	207	10	7912	317
<b>Tanah Sareal</b>	2	1.913	123	5	499	87	7	2412	210
2014	10	8.469	601	42	21,838	875	52	30.307	1.476
2013	10	91.462	518	33	9,700	1.503	43	101.162	2.021
2012	10	95.689	622	37	8,811	910	47	104.500	1.532
2011	10	95.705	636	-	-	-	10	95.705	636

Sumber BPS Kota Bogor

Kesadaran penduduk Kota Bogor untuk mengenyam pendidikan sudah baik Hasil SUSENAS 2014 menunjukkan bahwa sebanyak 19,15 persen penduduk usia 10 tahun keatas di Kota Bogor memiliki status masih sekolah (terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan belajar) berkurang sekitar 2,08 persen dibandingkan dengan tahun lalu

Partisipasi sekolah penduduk usia 10 tahun keatas sudah cukup tinggi terutama untuk tingkatan SD/MI, SLTP dan SLTA. Biaya yang semakin besar dan kesempatan yang semakin kecil untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi mempengaruhi jumlah penduduk 10 tahun keatas yang berpartisipasi sekolah pada tingkatan Perguruan Tinggi.

Hal tersebut sejalan dengan ijazah yang paling banyak dimiliki oleh penduduk usia 10 tahun ke atas adalah ijazah SLTA yaitu sebanyak 29.82 persen, ijazah SD sebanyak 25,02 persen, ijazah SLTP 20,23 persen, sedangkan yang memiliki ijazah perguruan tinggi 9,94 persen, dan yang tidak memiliki ijazah SD sebanyak 14,99 persen

### 2.3.2 Kondisi Pelayanan Kesehatan

Pemerintah Kota Bogor memberikan perhatian yang baik bagi pembangunan kesehatan. Fasilitas kesehatan yang tersedia sudah cukup lengkap dan diharapkan penduduk Kota Bogor dapat terlayani dengan baik. Pada tahun 2014 telah berdiri beberapa rumah sakit sehingga jumlah rumah sakit menjadi 19 buah, puskesmas ada 24 buah dan puskesmas pembantu ada 29 buah. Selain fasilitas yang cukup memadai, sarana kesehatan yang tersedia di Kota Bogor pun sudah cukup baik dengan tersedianya 602 dokter umum, 554 dokter spesialis, 290 dokter gigi, 94 Balai Pengobatan /Klinik dan 14 laboratorium kesehatan.

Sedangkan jumlah persalinan yang terjadi di Kota Bogor pada tahun 2014 tercatat sebanyak 20.663 kali dan hampir seluruh persalinan di tolong oleh tenaga medis atau 91,86 persen serta 8,14 persen saja yang ditolong oleh bukan tenaga medis. Indikator kesehatan masyarakat terukur dari Angka Harapan Hidup (AHH). Dengan jumlah fasilitas kesehatan dan sarana kesehatan yang baik serta banyaknya jumlah persalinan yang di tolong oleh tenaga medis, memungkinkan terjadinya angka harapan hidup yang tinggi.

Secara umum pemanfaatan sarana pelayanan dasar di Puskesmas se Kota Bogor sudah cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan kecendrungan peningkatan kunjungan puskesmas setiap tahun selalu meningkat. Jumlah masyarakat yang berkunjung ke Puskesmas pada tahun 2012 sebanyak 1.268.938 orang dan tahun 2014 menjadi 1.339.741 orang,

Selain itu sarana dan prasarana kesehatan di Kota Bogor, ditunjang dengan 19 Rumah Sakit yang ada di Kota Bogor dengan jumlah tempat tidur sebanyak 2.007 buah yang meliputi 213 kelas utama, 217 kelas I, 363 kelas II dan 708 kelas III serta 244 tanpa kelas. Dengan rincian sebagaimana tabel 2.7 berikut :

**Tabel 2.7**  
**Jumlah Rumah Sakit dan Tempat Tidur**  
**Di Kota Bogor Tahun 2014**

No	Nama Rumah Sakit	Jumlah Tempat Tidur
1	RS PMI	244
2	RS Marzuki Mahdi	598
3	RS Islam	51
4	RS BMC	76
5	RS Azra	85
6	RS Salak	149

7	RS Karya Bhakti/RSUD	202
8	RSIA Hermina	90
9	RSIA Melania	36
10	RS Bhayangkara	10
11	RSIA Pasutri	27
12	RS Medika Dramaga	114
13	RSIA UMMI	25
14	RSB Sawojajar	25
15	RSIA Juliana	25
16	RSIA Mulia	100
17	RS Vania	100
18	RSIA Bunda Suryatni	25
19	RSIA Nuraida	25
	<b>Jumlah</b>	<b>2.007</b>

Sumber : Profil Kesehatan 2014

Adapun jumlah sarana dan prasarana seperti, puskesmas, puskesmas pembantu dan puskesmas keliling serta sarana prasarana lainnya seperti jumlah klinik, apotik, laboratorium adalah sabagaimana tabel 2.8 berikut.

**Tabel 2.8**  
**Jumlah Sarana Dan Prasarana Kesehatan Tahun 2014**

Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Tempat Tidur	Puskesmas Pembantu	Jumlah Tempat Tidur	Puskesmas Keliling
Bogor Selatan	4	6	6	-	-
Bogor Timur	2	-	4	-	-
Bogor Utara	3	13	7	-	-
Bogor Tengah	5	5	5	-	-
Bogor Barat	5	10	3	-	1
Tanah Sareal	5	25	4	-	2
2014	<b>24</b>	<b>59</b>	<b>29</b>	-	<b>3</b>
2013	<b>24</b>	<b>46</b>	<b>29</b>	-	-
2012	<b>24</b>	<b>46</b>	<b>29</b>	-	-
2011	<b>24</b>	-	<b>28</b>	-	<b>11</b>

Sumber BPS Kota Bogor

### 2.3.3 Kondisi Pelayanan Keagamaan

Ketersediaan tempat ibadah merupakan salah satu dari pelayanan sarana dan prasarana umum yang disediakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Tempat ibadah yang terus meningkat dari tahun ke tahun diharapkan dapat memberikan kenyamanan dalam melaksanakan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Adapun jumlah sarana dan prasarana peribadatan di Kota Bogor tahun 2014 meliputi Masjid sebanyak 761 unit, Musholla sebanyak 1.094 unit, Gereja Protestan sebanyak 77 unit, Gereja Katolik sebanyak 8 unit dan Vihara sebanyak 4 unit

### 2.3.4 Kondisi Pelayanan Jaringan Listrik

Penggunaan listrik semakin meningkat di Kota Bogor. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah pelanggan listrik di tahun 2014 yang mencapai 216.896 dengan daya tersambung sebesar 414.521.516



watt. Kecamatan dengan daya tersambung paling besar adalah Kecamatan Tanah Sareal dan Kecamatan Bogor Utara, hal ini dimungkinkan karena di kecamatan tersebut terdapat jumlah penduduk yang padat, banyaknya perumahan serta terdapatnya beberapa industri yang cukup besar. Adapun rincian jumlah pelanggan PLN menurut Kecamatan pada tahun 2014 adalah sebagaimana grafik 2.3 berikut.

**Grafik 2.3**  
**Jumlah Pelanggan PLN Kota Bogor Menurut Kecamatan Tahun 2014**



Sumber BPS KotaBogor 2015

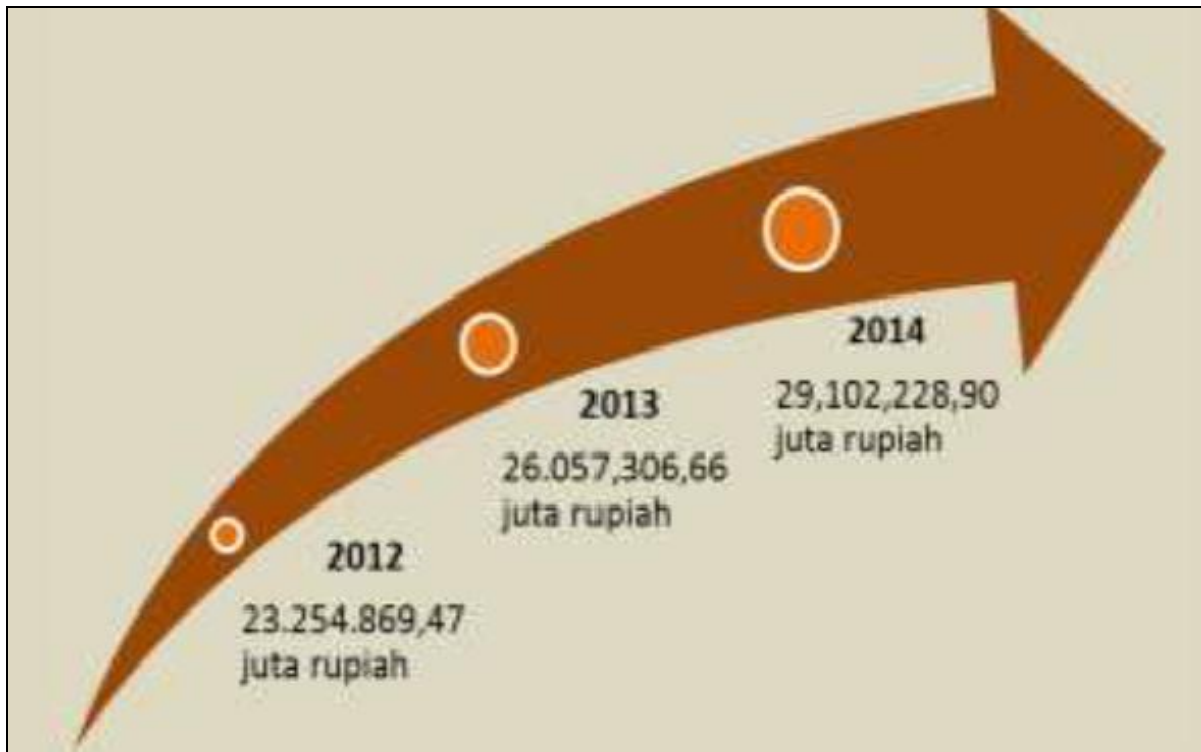
## 2.4 Aspek Daya Saing

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur dan Sumber Daya Manusia. Adapun rinciannya sebagai berikut :

### 2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

Sejak tahun 2014 Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dihitung dengan perubahan tahun dasar baru dari tahun 2000 ke 2010. Hal ini dilakukan dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System of National Accounts (SNA 2008)* melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables (SUT)*. Kota Bogor Tahun 2014 Atas Dasar Harga Berlaku sebesar Rp. 29.102.228,90 juta, mengalami laju pertumbuhan sebesar 11,68 persen dibandingkan PDRB ADHB Tahun 2013. Pertumbuhan PDRB ini terjadi di semua sektor produksi. Adapun rincian PDRB Kota Bogor tahun 2012-2014 sebagaimana grafik 2.4 berikut

**Grafik 2.4**  
**PDRB Kota Bogor Tahun Dasar 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun**  
**2012-2014 (Juta Rupiah)**



Sumber : BPS Kota Bogor Tahun 2015

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor menurut lapangan usaha pada tahun 2014 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang tertinggi terjadi pada sektor informasi dan komunikasi yang mencapai 18,69 persen. Jasa kesehatan tumbuh mencapai 13,30 persen. Struktur perekonomian Kota Bogor merupakan struktur yang didominasi oleh Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Industri Pengolahan. Selama tahun 2014 masing-masing memberikan kontribusi sebesar 22,25 persen dan 18,53 persen

#### **2.4.2 Infrastruktur Transportasi**

Infrastruktur berupa jalan merupakan sarana penunjang transportasi. Untuk mendukung transportasi darat, panjang jalan di Kota Bogor tahun 2014 tercatat 757.483 km. Panjang jalan yang sudah di aspal mencapai 91,69 persen, jalan beton sekitar 2,10 persen dan sisanya masih kerikil dan tanah.

Pada tahun 2014, jalan dengan kondisi baik mencapai 47,40 persen lebih besar 5,00 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kondisi sedang berkurang hingga menjadi 40,79 persen dibandingkan tahun lalu yang mencapai 56,06 persen dan sisanya 11,81 persen dalam kondisi rusak ringan hingga berat. Kota Bogor disebut “Kota Seribu Angkot” karena banyaknya jumlah angkot yang beroperasi di wilayah ini. Berdasarkan DLLAJ Kota Bogor, terdapat 8.056 unit angkutan yang terdiri dari 3.412 unit angkutan kota dan 4.644 unit angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP). Dari total angkutan kota dalam propinsi yang beroperasi, sejumlah 40,48 persen unit angkutan AKDP tersebut dimiliki oleh penduduk Kota Bogor dan sisanya dari Kabupaten Bogor. Adapun rincian panjang jalan, kondisi jalan di Kota Bogor tahun 2012-2014 adalah sebagaimana tabel 2.8 berikut :

**Tabel 2.8**  
**Panjang Jalan di Kota Bogor Tahun 2012-2014**

Uraian	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Status Jalan</b>			
Jalan Negara	29,109	29,109	29,109
Jalan Propinsi	8,989	8,989	8,989
Jalan Kota	714,642	719,385	719,385
Jumlah	752,740	757,483	757,483
<b>Kondisi</b>			
Baik	269,106	321,095	358,977
Sedang	471,458	336,673	308,974
Rusak	12,176	99,625	89,442

Sumber : BPS Kota Bogor

### 2.4.3 Sumber Daya Manusia

Penduduk Kota Bogor pada tahun 2014 tercatat sebanyak 1.030.720 jiwa, yang terdiri dari 523.479 laki-laki dan 507.241 perempuan, sehingga sex ratio penduduk Kota Bogor adalah 103. Dibandingkan dengan tahun 2013 jumlah penduduk Kota Bogor meningkat sebanyak 1,75 persen atau sekitar 17.701 orang. Kenaikan jumlah penduduk mengakibatkan kenaikan pada jumlah rumah tangga. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi kenaikan rumah tangga sebesar 2,96 persen. Jumlah rumahtangga di Kota Bogor pada tahun 2014 adalah 253.934 dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga sebanyak 4,06 orang, suatu gambaran ideal untuk sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan dua (2) orang anak

Penyebaran penduduk ke setiap kecamatan tidak merata karena kondisi disetiap kecamatan pun berbeda. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Bogor Barat sebanyak 228.860 jiwa. Diikuti penduduk Kecamatan Tanah Sareal sebanyak 215.479 jiwa, Bogor Selatan sebanyak 194.179 jiwa, Bogor Utara sebanyak 186.098 jiwa, Bogor Tengah sebanyak 104.120 jiwa dan Bogor Timur sebanyak 101.984 jiwa. Adapun rincian penduduk Kota Bogor tahun 2012-2014 sebagaimana tabel 2.9 berikut :

**Tabel 2.9**  
**Indikator Kependudukan Kota Bogor Tahun 2012-2014**

Uraian	2012	2013	2014
[1]	[2]	[3]	[4]
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.004.831	1.013.019	1.030.720
Laki-laki	510.884	514.797	523.479
Perempuan	493.947	498.222	507.241
Laju pertumbuhan penduduk	0,01	0,81	1,75
Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )	8.480	8.549	8.698
Sex Rasio (% L/P)	103	103	103

Sumber : BPS Kota Bogor

Pertumbuhan penduduk Kota Bogor tahun 2013-2014 sebesar 1,75 persen. Pertumbuhan penduduk Kecamatan Tanah Sareal adalah yang tertinggi dibandingkan kecamatan-kecamatan lain di Kota Bogor yakni sebesar 2.74 persen, hal ini sejalan dengan banyaknya pemukiman yang terdapat di wilayah Tanah Sareal. Sedangkan di Kecamatan Bogor Tengah yang merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian dengan kepadatan penduduk yang tinggi, pertumbuhan penduduknya sebesar 0.39 persen

Dengan luas wilayah Kota Bogor sekitar 118,50 kilometer persegi dan jumlah penduduk yang mendiami sebesar 1.030.720 jiwa, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kota Bogor adalah sebesar 8.715 jiwa per km<sup>2</sup>. Wilayah paling padat penduduknya adalah Kecamatan Bogor Tengah yang mencapai 12.807 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan daerah dengan kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Bogor Selatan dengan kepadatan penduduk sekitar 6.302 jiwa/km<sup>2</sup>

#### **2.4.4 Ketenagakerjaan**

Ketenagakerjaan merupakan bagian yang menarik dari data penduduk. Hasil Sakernas 2014 menunjukkan bahwa Tingkat partisipasi Angkatan Kerja Kota Bogor selama 3 tahun terakhir berkisar di 59 persen. Hal ini menunjukkan bahwa 59 persen dari penduduk usia diatas 15 tahun di Kota Bogor sudah memasuki dunia kerja.

Pasar tenaga kerja Kota Bogor cukup baik ditandai dengan tingginya nilai persentase penduduk usia kerja yang bekerja sebesar 90,52 persen. Dengan ketersediaan lapangan kerja yang terbatas dan pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi, mengakibatkan persentase jumlah pengangguran sedikit berkurang dan persentase jumlah yang bekerja bertambah sebesar 0,32 persen dibandingkan dengan tahun 2013.

Dilihat dari pendidikan yang ditamatkan ternyata penduduk Kota Bogor usia 15 tahun keatas yang bekerja sebagian besar berpendidikan SLTA (42,75 persen), berpendidikan Diploma /Akademi/ Universitas sebanyak 16,50 persen, berpendidikan SLTP sebanyak 16,17 persen dan sisanya berpendidikan SD kebawah. Sedangkan lapangan pekerjaan utama yang banyak menyerap tenaga kerja di wilayah Kota Bogor adalah perdagangan

besar, eceran, rumah makan, dan Hotel. Adapun rincian statistik ketenagakerjaan Kota Bogor tahun 2012-2014 sebagaimana tabel 2.10 berikut:

**Tabel 2.10**  
**Statistik Ketenagakerjaan Kota Bogor Tahun 2012-2014**

Uraian	2012	2013	2014
[1]	[2]	[3]	[4]
TPAK (%)	59,60	59,74	59,96
Pengangguran (%)	9,50	9,80	9,48
Bekerja (%)	90,50	90,20	90,52
Upah Minimum Kota (000 Rp)	2.000,20	2.352,35	2.658,16

Sumber BPS Kota Bogor

Sedangkan jumlah angkatan kerja menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan jenis kelamin 2013-2014 sebagaimana tabel 2.11 berikut.

**Tabel 2.11**  
**Jumlah Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2013-2014**

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan/ Educational Attainment	2013			2014		
	Laki-laki / Male	Perempuan / Female	Jumlah / Total	Laki-laki / Male	Perempuan / Female	Jumlah / Total
Tidak/Belum Pernah Sekolah/Tidak/Belum Tamat SD/ No Schooling/Didn't Complete/Not Yet Completed	21.698,00	18.036,00	39.734,00	19.511,00	12.971,00	32.482,00
Primary School						
Sekolah Dasar/ Primary School	45.538,00	19.860,00	65.398,00	52.353,00	24.354,00	76.707,00
Sekolah Lanjutan Menengah Pertama (SLTP)/ Junior High School	62.860,00	25.677,00	88.537,00	63.365,00	13.917,00	77.282,00
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/ Senior High School	124.847,00	47.565,00	172.412,00	144.305,00	56.961,00	201.266,00
Diploma I/II/III/ Akademi/ Universitas/ Diploma I/II/III/ Academy/ University	50.440,00	30.963,00	81.403,00	40.703,00	30.225,00	70.928,00

Sumber : BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional 2013 dan 2014  
Source : BPS, 2013 and 2014 National Employment Survey

Jumlah pencari kerja Kota Bogor tahun 2015 adalah sebanyak 3.515 orang meliputi Kecamatan Tanah Sareal sebanyak 686 orang, Kecamatan Bogor Utara sebanyak 567 orang, Kecamatan Bogor Barat sebanyak 1.101 orang, Kecamatan Bogor Tengah sebanyak 420 orang, Kecamatan Bogor Selatan sebanyak 587 orang dan Kecamatan Bogor Timur sebanyak 244 orang.

## **2.5. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD**

### **2.5.1. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2015**

#### **2.5.1.1 Urusan Wajib**

##### **1. Urusan Pendidikan**

Urusan pendidikan pada Pemerintah Kota Bogor dijabarkan dalam program dan kegiatan sebagai berikut:

##### **a. Program Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini**

- 1) Pembinaan Peningkatan Kelompok Kegiatan Gugus PAUD
- 2) Orientasi Layanan PAUD Inklusi

##### **b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun**

- 1) Peningkatan Sarana dan Prasarana SMP Negeri 1 (Piutang 2014)
- 2) Revitalisasi Kelas SD/MI (Piutang 2014)  
Revitalisasi ruang kelas kontruksi bertingkat untuk 3 SD yaitu SDN Semplak 2 dengan jumlah 3 ruang kelas, SDN Situgede dengan jumlah 3 ruang kelas dan SDN Kebonpedes 1 dengan jumlah 5 ruang kelas.
- 3) Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN Tahun 2015 (Bantuan Keuangan Provinsi Jabar 2015)
- 4) Penyelenggaraan US/UN SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK
- 5) Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif
- 6) Pengembangan Manajemen Sekolah SD dan SMP Potensial
- 7) Lomba Gugus Sekolah Dasar (SD)
- 8) Pengembangan Kurikulum Sekolah (KTSP) 2013 SD dan SMP
- 9) Lomba Perpustakaan SD
- 10) Lomba Lingkungan Sekolah di SD
- 11) Revitalisasi Sekolah Dasar  
Kegiatan ini bertujuan untuk membangun ruang kelas baru dan memperbaiki ruang kelas yang sudah tidak layak untuk dilakukan kegiatan belajar mengajar. Adapun hasil dari kegiatan ini adalah dilaksanakannya revitalisasi terhadap Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah sebanyak 34 pekerjaan
- 12) Revitalisasi SMP  
Kegiatan ini bertujuan untuk membangun ruang kelas baru dan memperbaiki ruang kelas yang sudah tidak layak untuk dilakukan kegiatan belajar mengajar. Adapun hasil dari kegiatan ini adalah dilaksanakannya revitalisasi terhadap SMP dengan jumlah 9 sekolah
- 13) Pengadaan Mebelair  
Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi proses belajar mengajar baik di Sekolah Dasar maupun di Sekolah Menengah Pertama. Adapun Pengadaan Mebeulair pada tahun 2015 sebanyak 50 unit yang disalurkan kepada Sekolah Dasar (SD)
- 14) Pengadaan Alat Peraga
- 15) Pengadaan Buku Perpustakaan

##### **c. Program Pendidikan Menengah**

- 1) Penyusunan Program Pendidikan Menengah Univerversal (PMU)



- 2) Revitalisasi SMA/SMK (2014) (piutang 2014)  
Kegiatan 2014 yang dibayarkan di Bulan Mei 2015 adalah kegiatan pembangunan ruang praktek SMKN 4, dan Pembangunan ruang Guru SMKN 2.
- 3) Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN Tahun 2015 (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015)
- 4) Ekspose Technology Pendidikan (Epitech) SMK
- 5) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online
- 6) Pelaksanaan DAK Pendidikan SMK 2015
- 7) Penunjang DAK Pendidikan SMK 2015
- 8) Revitalisasi SMA/SMK
- 9) Sistem Informasi Pembangunan SMA/SMK
- 10) Pembangunan Ruang Praktek SMK 3 (Perhotelan)
- 11) Pengadaan Meubelair SMA/SMK/MA  
Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi proses belajar mengajar baik di Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) maupun di Madrasah Aliyah (MA). Kegiatan pengadaan meubelair pada tahun 2015 sebagai sarana penunjang belajar pada satuan pendidikan SMA/SMK/MA sebanyak 494 set.

**d. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

- 1) Diklat Lanjutan Pendidik PAUD Non Formal
- 2) Pelatihan Pendidik PAUD Formal
- 3) Pelatihan Instruktur MOS
- 4) Peningkatan Kompetensi MGMP OR dan Agama Islam
- 5) Penyelenggaraan Sertifikasi Tenaga Pendidik
- 6) Penyelenggaraan Seleksi Calon Kepala Sekolah
- 7) Penyelenggaraan Sosialisasi Produk-produk Aturan Kependidikan
- 8) Penguatan Penilaian Kinerja Pengawas dan Penilik
- 9) Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah dan Pengawas SD/SMP dalam Pengelolaan Sekolah
- 10) Workshop Kelompok Kerja Guru (KKG)
- 11) Workshop Guru SMP Melalui MGMP
- 12) Bantuan Penyelenggaraan Sekolah Standard Nasional Jenjang SMP (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015)
- 13) Bantuan Penyelenggaraan Sekolah Standard Nasional Jenjang SD (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015)
- 14) Bantuan Operasional SMP Terbuka di Jawa Barat (Bantuan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015)

**e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**

- 1) Hari Aksara Internasional
- 2) Pendataan PNFI (Pendidikan Non Formal dan Informal)
- 3) Apresiasi PTK dan Warga Belajar PNFI (Pendidikan Non Formal dan Informal)
- 4) Gebyar Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI)
- 5) Sosialisasi Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
- 6) Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Non Formal
- 7) Sosialisasi Akreditasi Lembaga PAUD

- 8) Penyelenggaraan Lomba MIPA SD Jalur A dan Jalur B Tingkat Kota dan Tingkat Provinsi
- 9) Olimpiade Sains Nasional SD dan SMP
- 10) Penyelenggaraan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) jenjang SD Tingkat Kota dan Tingkat Propinsi
- 11) Penyelenggaraan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) jenjang SMP Tingkat Kota dan Tingkat Propinsi
- 12) Penyelenggaraan Pekan Kreatifitas SD Tingkat Kota dan Provinsi
- 13) Penyelenggaraan Lomba Calistung
- 14) Lomba Motivasi Belajar Mandiri
- 15) Lomba Siswa Berprestasi
- 16) Pemilihan Duta Sanitasi Tingkat Kota dan Tingkat Provinsi
- 17) LTUB ( Lomba Tata Upacara Bendera) SD Tingkat Kota
- 18) Lomba Tata Upacara Bendera (LTUB) SMP, SMA, SMK
- 19) Penghargaan Bagi Siswa dan Guru Berprestasi Tingkat Provinsi
- 20) Mentoring Penanganan Penyimpangan Perilaku Siswa
- 21) Peningkatan Guru Mata Pelajaran Produktif
- 22) Galaksi (Gelar Aksi Karakter Siswa) SMA
- 23) Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum 2013
- 24) Olympiade Sains Nasional (OSN) Jenjang SMA dan SMK
- 25) Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) SMP, SMA, SMK Tingkat Kota dan Provinsi
- 26) Pengembangan Kurikulum Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Kurikulum 2013
- 27) Penyelenggaraan Lomba Seni dan Sastra Daerah Jenjang SD, SMP, SMA, Tingkat Kota sampai Tingkat Provinsi
- 28) Penyelenggaraan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLSN) SD, SMP, SMA, SMK
- 29) Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah
- 30) Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah(BOS)
- 31) Gebyar SMK dan Lomba Inovasi Teknologi Terapan
- 32) Lomba O2SN SMA/SMK Tingkat Kota dan Provinsi
- 33) Pembinaan UKS
- 34) Pelatihan SIM Bagi Operator Sekolah
- 35) Pendataan dan Pembuatan Profil Pendidikan
- 36) Penilaian Kinerja Kepala Sekolah TK/SD/SMP/SMA/SMK
- 37) Pengadaan Buku Raport
- 38) Pengembangan Sistem Informasi Sekolah ICT dan PAS
- 39) Pendampingan United States Agency Inteernational Development(USAID)Prioritas
- 40) Lomba Pendidik dan Tenaga Pendidik TK, SD, SMP,SMA, SMK
- 41) BOS Kota Jenjang TK Negeri, SD Negeri, SMP Negeri, SMA Negeri dan SMK Negeri

Secara umum program BOS Kota bertujuan untuk mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat dalam rangka mendukung Wajib Belajar 9 Tahun dan Pendidikan Menengah Universal sebagai rintisan wajib belajar 12 tahun. Pengalokasian dana BOS Kota dihitung berdasarkan jumlah siswa masing – masing sekolah penerima bantuan dikalikan satuan biaya (*unit cost*) bantuan. Bagi Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang jumlah siswanya kurang dari 240 siswa disesuaikan dengan sekolah yang memiliki jumlah 240

siswa. Sasaran program BOS Kota dan besaran bantuan adalah sebagai berikut:

- 1 TKN sebanyak 200 siswa Rp. 55.194.500/tahun
  - 229 SDN sebanyak 95.240 siswa Rp.135.000/siswa/tahun
  - 20 SMPN sebanyak 19.052 siswa Rp.185.000/siswa/tahun
  - 2 SMPN terbuka 249 siswa Rp.185.000/siswa/tahun
  - 10 SMAN 9.751 siswa Rp.1.000.000/siswa/tahun
  - 4 SMKN 5.134 siswa Rp.1.017.000/siswa/tahun
  - 2 MAN 2.292 siswa Rp.150.000/siswa/tahun
- 42) Lomba LKBB SMA/SMK Tingkat Kota Bogor dan Provinsi
- 43) Lomba Kompetensi Siswa SMK
- 44) Layanan Peningkatan Mutu Pendidikan SMA N 1 s.d SMAN 10, SMKN 1 s.d SMKN 4
- 45) Bantuan Pendidikan Menengah Universal (PMU) SMK Negeri (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015)
- 46) Bantuan Pendidikan Menengah Universal (PMU) SMA Negeri (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015)

**f. Program Pendidikan Non Formal dan Informal**

- 1) Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional  
Kegiatan Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional (KF) dilaksanakan melalui:
  1. Penyelenggaraan KF
  2. Penyelenggaraan KUM
  3. Pelatihan untuk Kompetensi Tutor
- 2) Penyelenggaraan Paket A  
Penyelenggaraan Paket A terdiri dari:
  1. Workshop Tutor Paket A dan PKBM se-Kota Bogor
  2. Ujian Nasional Paket A,
- 3) Penyelenggaraan Paket B  
Kegiatan ini dilaksanakan melalui:
  1. Pelatihan Workshop Paket B
  2. Pelatihan Tutor Paket B,
  3. Pelaksanaan Ujian Nasional Paket B,
- 4) Penyelenggaraan Paket C  
Kegiatan ini dilaksanakan melalui Ujian Nasional Paket C pada tanggal 13 s.d 16 April 2015 bertempat di SMP Negeri 5, SMP Negeri 8, SMP Negeri 12, SMA PGRI 4 Kota Bogor yang di ikuti oleh 1317 orang dengan jumlah kelulusan sebanyak 1186 orang.
- 5) Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan  
Kegiatan ini dilaksanakan melalui:
  1. Lomba Keteladanan Tingkat Kota Bogor
  2. Pelatihan calon pendidik kursus
  3. Manajemen Lembaga Kursus dan Pelatihan
- 6) Pengarustamaan Gender Pendidikan

**2) Urusan Kesehatan**

Penanganan urusan kesehatan dilaksanakan melalui 16 program dan merujuk pada Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 yang telah mengalami perubahan melalui Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan. Penjabaran program-program dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

**a. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin**

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin, khususnya dalam memberikan pelayanan rujukan ke Rumah Sakit., program ini dijabarkan dalam 3 kegiatan, yaitu :

- 1) Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dan Peningkatan JPKM,
  1. Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jamkesda di Puskesmas dan RS
  2. Pertemuan penyusunan Perjanjian Kerja Sama antara Rumah Sakit dengan Pemerintah Kota Bogor dengan sasaran 23 Rumah Sakit Strata II dan 5 Rumah Sakit Strata III.
  3. Pengelolaan Administrasi Klaim Jamkesda
  4. Workshop Tim Teknis Updating Data Jamkesda
  5. Pelatihan (TOT) Jaminan Kesehatan bagi Tokoh Masyarakat dan Petugas Kesehatan Puskesmas
  6. Rapat Kerja Program Jamkesda antara Puskesmas dan Rumah Sakit
  7. Dialog Interaktif *Stakeholders* Jamkesda
  8. Lomba Rumah Sakit dengan Pelayanan JKN/Jamkesda Terbaik Tahun 2015
  9. Sosialisasi Jamkesda/JKN kepada masyarakat oleh 24 Puskesmas di Kota Bogor
  10. Pertemuan evaluasi pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesda di Puskesmas
  11. Pertemuan evaluasi pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesda di Rumah Sakit
  12. Kegiatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran Provinsi Jawa Barat.
- 2) Pengelolaan Dana Kapitasi JKN dan Monitoring Evaluasi Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas

**b. Program Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak**

Program ini dijabarkan dalam satu kegiatan yaitu :

- 1) Pelayanan Kesehatan Ibu Bayi dan Balita  
Pelayanan kesehatan ibu dan bayi bertujuan memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu dan bayi sesuai standar, melakukan deteksi dan penanganan komplikasi kebidanan dan komplikasi pada bayi baru lahir agar ibu dan bayi selamat dan pada akhirnya menurunkan kematian ibu dan bayi.  
Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
  1. Pembinaan dan Pelayanan KIA
  2. Pelayanan Keluarga Berencana
  3. Kegiatan Pelacakan Kasus Kematian Ibu dan Bayi

**c. Program Upaya Kesehatan Masyarakat**

Program Upaya Kesehatan Masyarakat dijabarkan dalam dua kegiatan, yaitu :

- 1) Pelayanan Kesehatan Khusus
  1. Perawatan Kesehatan Masyarakat
  2. Kesiapsiagaan Bencana & P3K
  3. Kesehatan Gigi
  4. Upaya Kesehatan Kerja
  5. Kesehatan Olahraga

6. Pelayanan Kesehatan Tradisional di Puskesmas.
7. Kegiatan Kesehatan Mata Dan Indera Pendengaran
8. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Jemaah Calon Haji
- 2) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Mata Bagi Masyarakat

**d. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja dan Lansia**

Program ini dijabarkan dalam satu kegiatan yaitu Kegiatan Pelayanan Kesehatan Remaja dan Lansia. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah :

1. Workshop Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Guru SD/MI dan SLB untuk 240 Orang Guru dari 6 Kecamatan se Kota Bogor yang dilaksanakan tanggal 6 -21 April 2015 di Dinas Kesehatan Kota Bogor.
2. Capacity Building Dokter Kecil  
Diikuti oleh 100 Orang Dokter Kecil yang sudah dilatih beserta guru pendamping.
3. Workshop Peningkatan Kompetensi Petugas PKPR di Puskesmas  
Diikuti oleh 48 orang petugas UKS/PKPR dari 24 Puskesmas.
4. Workshop Pelayanan Kesehatan Remaja bagi Guru SMP/MTs, SMA/MA/SMK
5. Workshop Peningkatan Keterampilan Peerconselor remaja di SMP/SMA
6. Pertemuan Penguatan Tim Pelayanan Kesehatan Ramah Lansia
7. Lomba Senam Lansia
8. Sosialisasi menuju lansia sehat dan produktif yang diikuti oleh Lansia usia 60 tahun sebanyak 100 orang.
9. Deteksi Dini Kesehatan Intelegensia anak di Puskesmas yang diikuti oleh 72 orang anak batita,
10. Deteksi dini kesehatan intelegensia lansia

**e. Program Perbaikan Gizi Masyarakat**

Program ini dijalankan dalam satu kegiatan yaitu : Kegiatan Peningkatan Status Gizi Masyarakat. Kegiatan yang telah dilakukan adalah:

1. Pemberian dan Pemantauan / Sweeping Data Vitamin A
2. Pembentukan Kelas ASI
3. Sosialisasi Pedoman Gizi Seimbang (PGS) dan Gizi Sekolah bagi Petugas Kesehatan dan Kepala Sekolah SD
4. Sosialisasi Anemia dan Gizi Remaja
5. Lomba Balita Sehat Indonesia (LBSI)
6. Pemberian Makanan Tambahan
7. Bulan Penimbangan Balita (BPB)
8. Pemantauan Status Pertumbuhan Balita di Posyandu
9. Monitoring Garam BerIodium
10. Pembinaan Program Gizi di Posyandu
11. Orientasi PMBA (Pemberian Makan pada Bayi dan Anak)
12. Seminar Bagi Ibu Hamil tentang ASI Eksklusif dan Inisiasi Menyusui Dini (IMD)
13. Diseminasi Informasi (Desinfo) Kegiatan Gizi
14. Pemantapan Program Gizi di Puskesmas (Bintek)
15. Workshop PWS Gizi dan Software
16. Evaluasi Program Gizi
17. Pengadaan Bahan Cetak

18. Pemeliharaan Dacin (Tera Dacin)

**f. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**

Program ini dijabarkan dalam tiga kegiatan, yaitu :

- 1) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular
- 2) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV
- 3) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit DBD

**g. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Jaringannya**

Program ini dijabarkan dalam beberapa kegiatan, yaitu :

- 1) Sistem Informasi Kesehatan  
Kegiatan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) berupa pengelolaan data yang di dapat dari 24 Puskesmas dan 17 Rumah Sakit di Kota Bogor. Data Kesehatan tersebut meliputi pengelolaan Pencatatan Penyakit, Pengelolaan Data Website serta Pembuatan Profil Kesehatan Kota Bogor.
- 2) Revitalisasi Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
  1. Rehabilitasi Puskesmas Belong, warung jambu dan gedung kantor Dinas Kesehatan.
  2. Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Bantar Kemang, Muarasari, Balumbangjaya, Genteng dan Eks Puskesmas Bogor Utara.
  3. Pembangunan Puskesmas Pembantu Cikaret dan Kedungjaya,
  4. Pembuatan Pagar dan Paving blok Puskesmas Pembantu Cibadak, Pagar Pustu Sindangsari, pagar Pustu Cimahpar, pagar Pustu Sindangrasa, pagar Dinas Kesehatan, Puskemas Pondok rumput, dan Puskesmas Pembantu
- 3) Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan dan Penyerahan Pengadaan Tanah
- 4) Peningkatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
- 5) Pelayanan Puskesmas, Jasa Pelayanan, Pembinaan Manajemen dan Peningkatan SDM

**h. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**

- 1) Pembinaan dan Pengendalian Sarana Kesehatan Swasta  
Kegiatan pembinaan sarana kesehatan swasta meliputi :
  1. Pembinaan Sarana Kesehatan Swasta, Sasaran dari pembinaan sarana kesehatan swasta sebanyak 1.659 Sarana
  2. Sosialisasi Software SIRS
  3. Sosialisasi Peraturan Keperawatan Se – Kota Bogor
  4. Sosialisasi Informasi Batra Se - Kota Bogor
  5. Sosialisasi Informasi Peraturan Kefarmasian
  6. Kegiatan Registrasi Dokter umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis
  7. Kegiatan Rekomendasi Perizinan
  8. Pendampingan program RSSIB (Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi)
  9. Pembuatan Peta Sarana Kesehatan Swasta di Kota Bogor

10. Sosialiasi Peraturan Tukang Gigi
  11. Sosialiasi Peraturan Optik .
  12. Sosialiasi Peraturan *Perumahsakitan*
- 2) Akreditasi Puskesmas

**i. Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat**

Pelaksanaan program ini didukung dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Promosi Kesehatan
- 2) Penerapan Kawasan Tanpa Rokok
- 3) Peningkatan Peran Serta Masyarakat
- 4) Peningkatan Kinerja Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)

**j. Program Pengembangan Lingkungan Sehat**

- 1) Peningkatan Kesehatan Lingkungan
- 2) Pembangunan IPAL Labkesda dan Gudang Penampungan Limbah B3

**k. Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan**

- 1) Pengadaan Obat-Obatan
- 2) Pengendalian Obat dan Makanan

**m. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular**

- 1) Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular  
Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah :
  1. Workshop PTM Terintegrasi Bagi Petugas Kesehatan
  2. Pelatihan PTM Terintegrasi Bagi Anak Sekolah Tkt SLTA
  3. Deteksi Aktif Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular Bagi Masyarakat Umum
  4. Deteksi Aktif Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular Anak Sekolah Lanjutan Atas
  5. Deteksi Aktif Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular Bagi Masyarakat Khusus
  6. Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Payudara
  7. Bimbingan Teknis Posbindu
  8. Bimbingan Teknis Puskesmas dan Rumah Sakit

**3) Urusan Lingkungan Hidup**

Urusan lingkungan hidup pada Pemerintah Kota Bogor dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP). Pelaksanaan urusan lingkungan hidup dilaksanakan melalui 8 program yang dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

**a. Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup**

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan merupakan program kerja yang mendukung sasaran strategis untuk menurunkan tingkat pencemaran akibat aktifitas perkotaan dan meningkatkan upaya penataan hukum lingkungan. Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pemantauan dan pengawasan terhadap AMDAL, UKL/UPL, SPPL di Kota Bogor



- 2) Pengawasan Implementasi Kegiatan AMDAL di Kota Bogor
- 3) Pengujian dan Analisa Kualitas Lingkungan
- 4) Kegiatan Pemeliharaan Alat Pemantauan Kualitas Udara (ISPU)
- 5) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah
- 6) Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
- 7) Pengujian dan Analisa Kualitas Limbah Cair Kegiatan Usaha dan Industri
- 8) Pengawasan dan Pembinaan Kegiatan Usaha Penghasil Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun(B3)
- 9) Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Berbasis masyarakat

**b. Program Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim**

Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim merupakan program kerja yang mendukung sasaran strategis menurunnya tingkat pencemaran akibat aktifitas perkotaan dan meningkatnya upaya penataan hukum lingkungan sesuai peraturan. Capaian sasaran program diatas dilakukan melalui kegiatan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengembangan Energi Terbarukan
- 2) Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca
- 3) Fasilitasi Penyusunan Strategis Ketahanan Iklim

**c. Program Perlindungan Dan Konservasi Sumberdaya Alam**

Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam merupakan program kerja yang mendukung sasaran strategis meningkatnya upaya pemulihan dan konservasi sumber daya alam dan eningkatnya perlindungan pelestarian dan pengembangan keanekaragaman hayati. Capaian sasaran program diatas dilakukan melalui 6 kegiatan, realisasi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Perlindungan Sumber Mata Air
- 2) Optimalisasi Pemanfaatan Air Tanah Kota Bogor
- 3) Pembuatan Bangunan Konservasi Air
- 4) Perlindungan, pelestarian dan pengembangan biodiversity dengan Sehati, Kehati dan Pemerhati dan Arboretum
- 5) Review Inventarisasi Data Lahan Kritis
- 6) Kajian Nilai Perolehan Air Tanah

**d. Program Kemitraan Lingkungan Hidup**

Program Kemitraan Lingkungan Hidup merupakan program kerja yang mendukung sasaran strategis Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Capaian sasaran program diatas dilakukan melalui 4 kegiatan, realisasi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pembinaan dan Penilaian Sekolah Adiwiyata
- 2) Pengembangan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sekolah Adiwiyata Kota Bogor
- 3) Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan
- 4) Pelaksanaan Kampanye Lingkungan Hidup Kota Bogor

**e. Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Lingkungan**

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Lingkungan merupakan program kerja yang mendukung sasaran strategis tersedianya data dan informasi lingkungan. Tersedianya informasi kualitas lingkungan (dokumen) realisasinya mencapai 200 persen dari target 2 dokumen menjadi 4 dokumen, yaitu :

- 1) Identifikasi Terhadap Kegiatan dan/usaha dan UKM/IKM di Kota Bogor
- 2) Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)
- 3) Pembuatan Sistem Informasi Lingkungan (SIL)
- 4) Penyusunan PDRB Hijau

**f. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau**

Tingkat capaian indikator kinerja penambahan luas taman sebesar 99,24% Uraian mengenai capaian kinerja indikator tersebut sebagai berikut :

- 1) Perencanaan Ruang Terbuka Hijau
- 2) Penyediaan dan Pemutakhiran Data Pertamanan dan Penyusunan Profil RTH
- 3) Pembangunan Ruang Terbuka Hijau
- 4) Pemeliharaan Rutin Ruang Terbuka Hijau
- 5) Pemangkasan Pohon Peneduh Rawan Tumbang

**g. Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)**

P2KH adalah upaya untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan dengan mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan menerapkan delapan atribut hijau berupa:

1. perencanaan dan perancangan kota yang ramah lingkungan;
2. ketersediaan ruangterbuka hijau;
3. konsumsi energi yang efisien;
4. pengelolaan air yang efektif;
5. pengelolaan sampah ramah lingkungan;
6. bangunan hijau;
7. penerapan sistem transportasi yang berkelanjutan; dan
8. peningkatan peran masyarakat sebagai komunitas hijau.

**h. Program Pengembangan Kinerja Pelayanan Persampahan**

Sasaran Program yaitu meningkatnya kualitas Kualitas Sarana Dan Prasarana Persampahan, dengan capaian meningkatnya wilayah pelayanan persampahan 72,20 % dari target 71,37 %.

Adapun kegiatannya adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
- 2) Pelayanan Persampahan
- 3) Pengadaan dan Peremajaan Sarana dan Prasarana
- 4) Pembangunan Landasan Container dan TPS
- 5) Perlombaan Kebersihan Dalam Rangka Hari Jadi Bogor.
- 6) Pengelolaan Sampah Dengan Pola Padat Karya
- 7) Pemeliharaan Landasan Container dan TPS
- 8) Pengelolaan 3R (luncuran APBD 2014)
- 9) Penunjang Jasa Retribusi Pelayanan Persampahan
- 10) FS Pemanfaatan Lahan Kayu Manis
- 11) Kajian Optimalisasi Retribusi Persampahan

- 12) Pemeliharaan Fungsi TPA, melalui pelaksanaan 6 kegiatan yaitu:
  1. Perbaikan Sarana TPA Galuga
  2. Pembangunan Jalan, Gedung, dan Alat Timbangan
  3. Pengelolaan Sampah di TPA
  4. Perpanjangan MoU TPA Galuga
  5. Peningkatan Jalan Akses Menuju TPA

**i. Program Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R**

Program Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R dilaksanakan melalui 4 kegiatan, di antaranya sebagai berikut :

- 1) Pemberdayaan dan Penyiapan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah
- 2) Penyusunan FS dan DED SPA Skala Kawasan Berbasis 3R
- 3) Pembangunan, Revitalisasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana 3R

**4) Urusan Pekerjaan Umum**

Pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum dikelola oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dan Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

**a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan**

Program ini dilakukan melalui pencapaian 3 (tiga) indikator kinerja program yakni jumlah panjang ruas jalan utama (arteri, kolektor & lokal) terbangun sesuai arahan RTRW 2011 - 2031; jumlah simpang yang meningkat kapasitasnya; dan jumlah panjang ruas jalan yang dilebarkan/ditingkatkan kapasitasnya. Adapun kegiatannya adalah sebagai berikut :

- 1) Perencanaan Pengadaan Tanah di Tahun 2015 berupa pengadaan patok terealisasi 32,17%
- 2) Persiapan Pengadaan Tanah di Tahun 2015 berupa pemasangan patok dan pembuatan peta bidang/rincian tidak dapat dilaksanakan karena daerah pembebasan lahan masih melanjutkan pembebasan lahan tahun sebelumnya, belum beranjak pada daerah pembebasan lahan yang baru.
- 3) Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Tahun 2015 dialokasikan pada pembebasan lahan di beberapa titik lokasi yang belum terbebaskan untuk pelaksanaan fisik konstruksi 2015, dan pembebasan lahan di Kelurahan Sindangsari dan Sindangrasa,

**b. Program Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan**

Program ini dilaksanakan berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja program meliputi jumlah panjang ruas jalan yang ditingkatkan strukturnya/kelasnya (km) dan prosentase panjang jalan berkondisi mantap (baik & sedang) dari seluruh panjang jalan (%).

**c. Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong**

Program ini dilaksanakan dengan indikator kinerja program yaitu penurunan jumlah lokasi rawan genangan.

**d. Program Pembangunan Prasarana Pedestrian dan Jalur Pesepeda**

Program ini dilakukan dalam rangka mendukung sasaran strategis meningkatnya kualitas sarana prasarana pejalan kaki dan pengguna sepeda. Berdasarkan RPJMD 2015-2019, dalam program ini terdapat 2 (dua) indikator kinerja program meliputi panjang prasarana pedestrian yang meningkat kapasitasnya (pelebaran prasarana pedestrian) (km) dan Panjang prasarana pedestrian jalan utama terbangun (km).

**e. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sistim Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan**

Penyusunan leger jalan dan kajian teknis kondisi jembatan, merupakan upaya untuk memudahkan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi perencanaan dan pemrograman penanganan jalan maupun jembatan di Kota Bogor. Adapun Kegiatan Kajian Teknis Kondisi Jembatan meliputi 5 (lima) jembatan yang terletak di wilayah Kota Bogor, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Jembatan Bubulak yang terletak di Jalan RE Martadinata.
- 2) Jembatan Gunung Batu yang terletak di Jalan Veteran Gunung Batu Kecamatan Bogor Tengah
- 3) Jembatan Darul Qur'an yang terletak di Jalan Darul Qur'an Kecamatan Bogor Barat.
- 4) Jembatan Empang Pulo yang terletak di Pulo Empang/Pancasan Bogor Selatan.
- 5) Jembatan Empang yang terletak di Jalan Empang/ R Saleh Sarief Bastaman. Berdasarkan hasil kajian,

**f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan**

Program ini dilaksanakan dengan indikator kinerja program yaitu rasio sarana dan prasarana terhadap beban layan. Adapun kegiatannya adalah sebagai berikut :

- 1) Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat
- 2) Penyelenggaraan Pengujian Tanah dan Bahan

**g. Program Penguatan Kebijakan dan Regulasi Kebinamargaan**

Program ini dilaksanakan dengan indikator kinerja program yaitu jumlah peraturan bidang Bina Marga. Hasil dari kegiatan-kegiatan pada program ini adalah sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi Peraturan Penyelenggaraan Jalan
- 2) Penyusunan SOP Kebinamargaan dan SDA

**h. Program Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana**

Program ini dilaksanakan dalam rangka penyediaan dokumen DED untuk pelaksanaan pekerjaan di Bidang Sumber Daya Air dan Bidang Kebinamargaan. Dalam RPJMD 2015-2019, program ini mendukung sasaran strategis tersedianya baseline data yang kuat, akurat dan mutakhir. Informasi dalam mencapai sasaran strategis tersebut.

**i. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya**

Target panjang saluran irigasi berkodisi baik dalam RPJMD 2015-2019 adalah 11 km, sedangkan dalam pelaksanaannya melebihi target, yakni kegiatan pembersihan sepanjang 39km dan penembokan sepanjang 3,542km. Untuk mencapai panjang saluran irigasi berkondisi baik dilakukan dengan pembagian

pengelolaan sumberdaya air dalam dua wilayah kerja, yaitu wilayah I menangani daerah irigasi yang berada di sisi luar Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane; sedangkan wilayah II berada diantara ke dua sungai tersebut.

**j. Program pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya**

Realisasi panjang sungai/saluran berkondisi baik target dalam RPJMD 2015-2019 untuk Tahun 2015 melebihi target, yakni Pembersihan dengan panjang 19,6Km dan Penembokkan sepanjang 5,705Km dari target 2 km. Untuk mencapai panjang saluran irigasi berkondisi baik dilakukan dengan pembagian pengelolaan sumberdaya air dalam dua wilayah kerja, yaitu wilayah I menangani daerah irigasi yang berada di sisi luar Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane; sedangkan wilayah II berada diantara ke dua sungai tersebut. Selain kegiatan pemeliharaan rutin, juga dilakukan kegiatan pembangunan/peningkatan berupa pembangunan / peningkatan saluran. Sedangkan penanganan situ/kolam retensi yang dilaksanakan di Tahun 2015 yaitu pada Situ Anggalena berupa pengerukan sedimentasi, pembersihan, dan penembokan. Selain Situ Anggalena terdapat 2(dua)situ lainnya yang masih berkondisi baik di Kota Bogor yaitu: Situ Gede, dan Situ Panjang.

**k. Program Pengendalian Banjir**

Penanganan terhadap jumlah kawasan rawan banjir pada tahun 2015 pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air melebihi target yakni 40 lokasi/kawasan dari target 4 lokasi dengan panjang penanganan Talud/TPT sepanjang 3,304 Km.

**l. Program Pemulihan Pasca Bencana**

Kegiatan penanganan pasca bencana tidak mencapai target 100%, hal ini disebabkan karena alokasi anggaran untuk penanganan pasca bencana berada pada APBD Perubahan Tahun 2015 dengan waktu pelaksanaan pekerjaan yang relatif singkat hanya  $\pm$  1 bulan, sehingga berakibat pada adanya beberapa pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan Program Pemulihan pasca bencana pada Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman dilakukan dengan pembangunan Tembok Penahan Tanah sebanyak 14 titik atau mencapai 11,67% dari target 100%

**m. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.**

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman meliputi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pembangunan Infrastruktur Sanitasi
- 2) Pembangunan Infrastruktur Air Minum Non PDAM

**n. Program Pengelolaan Areal Pemakaman.**

- 1) Sistem Informasi pelayanan Pemakaman
- 2) Pelayanan TPU. Kegiatan ini meliputi pemeliharaan di TPU Gunung Gadung, TPU Cipaku, TPU Kayu Manis, TPU Cimahpar, TPU Situ Gede dan pembuatan papan nama di 8 TPU
- 3) Penataan Infrastruktur TPU. Kegiatan ini merupakan kegiatan penataan infrastruktur di 8 TPU yaitu TPU Gunung

Gadung, TPU Cipaku, TPU Blender, TPU Dreded, TPU Kayu Manis, TPU Mulyaharja, TPU Situ Gede, TPU Cimahpar.

**o. Program Peningkatan Utilitas Perkotaan.**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyediaan sarana penerangan jalan di dalam kota baik dalam bentuk pemeliharaan serta pemasangan lampu PJU baru.

- 1) Pembayaran Rekening PJU
- 2) Pemeliharaan Panel PJU, Lampu PJU, dan Lampu Highmast
- 3) Pemeliharaan Lampu Taman dan Lampu Hias
- 4) Pemasangan Lampu PJU Jalan Protokol dan Penghubung di Kota Bogor

**5) Urusan Penataan Ruang**

Penanganan urusan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman dan badan Perencanaan Pembangunan daerah, yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dari Misi 3 RPJMD Kota Bogor 2015-2019 yaitu meningkatkan kualitas penataan ruang, yaitu dilaksanakan melali 6 program yang dijabarkan sebagai berikut:

**a. Program Perencanaan Tata Ruang**

- 1) Pemutakhiran Peta Dasar Kota Bogor (Peta Citra Terbaru)
- 2) Penyusunan DEDKawasan Heritage
- 3) Sosialisasi RDTR 2 Wilayah Pelayanan
- 4) Updating Data Prasarana dan Sarana Permukiman
- 5) Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
- 6) Pengadaan Papan Peta RDTR 5 Wilayah Pelayanan
- 7) Penyusunan Panduan Perencanaan Arsitektur Kota
- 8) Penyusunan Siteplan lahan Bekas Rumah Potong Hewan
- 9) Pengadaan Perangkat Lunak Pemetaan

**b. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**

- 1) Koordinasi Penataan Ruang (BKPRD)
- 2) Sistem Informasi Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Tahap III (SIP3R)
- 3) Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 4) Pengendalian Pemanfaatan Ruang

**c. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang**

- 1) Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Wilayah I
- 2) Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Wilayah II
- 3) Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Wilayah III
- 4) Penyusunan Database Bangunan Gedung Berbasis GIS
- 5) Pemeliharaan Database Bangunan Gedung Berbasis GIS
- 6) Verifikasi dan Updating Fasos Fasum (PSU Perumahan)

**d. Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang**

- 1) Sosialisasi Tata Ruang
- 2) Sosialisasi Pengawasan & Pengendalian Bangunan Gedung

**e. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana**

Program ini dilaksanakan dengan 1 (satu) kegiatan, yaitu: **Kegiatan Pemetaan dan Rencana Induk Rawan Bencana** adalah lanjutan dari kegiatan yang sama pada tahun 2014. Jika pada tahun 2014 dikhususkan pada WP A, maka pada tahun 2015



kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi eksisting kawasan rawan bencana dan tersusunnya rencana induk kawasan rawan bencana di WP B, C, D dan E.

**f. Program Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana**

Program ini dilaksanakan dengan 1 (satu) kegiatan, yaitu: Fasilitasi Koordinasi Perencanaan Sarana dan Prasarana Kota. Indikator Program kegiatan ini adalah tingkat Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana mencapai 20% sedangkan indikator Hasil kegiatan ini adalah dokumen perencanaan sarana dan prasarana kota mencapai 100 % pada Tahun 2015 dengan pelaksanaannya untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang fisik yang berkaitan dengan sarana prasarana kota antara lain kegiatan pokja sanitasi, pokja perumahan dan permukiman, pokja transportasi, pokja RPI2JM Kota Bogor dan penyelenggaraan Sanitasi Award.

**6) Urusan perencanaan Pembangunan**

Urusan Perencanaan Pembangunan ditangani oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Urusan Perencanaan Pembangunan dijabarkan dalam 4 program, yaitu: 1) Program Pengembangan Data dan Informasi, 2) Program Perencanaan Pembangunan Daerah, 3) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dan 4) Program Perencanaan Sosial Budaya. Program-program tersebut dilaksanakan dalam 28 kegiatan yang rinciannya sebagai berikut:

**a. Program Pengembangan Data dan Informasi**

- 1) Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Bidang Fisik
- 2) Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Bidang Ekonomi dan Litbang
- 3) Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Bidang Sosial Budaya & Pemerintahan
- 4) Pengelolaan SIMPATIK
- 5) Kegiatan Monitoring Evaluasi Pelaporan Kinerja Program OPD
- 6) Pengelolaan Website Bappeda
- 7) Sosialisasi & Pelatihan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

**b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah**

- 1) Evaluasi dan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMK)
- 2) Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2015
- 3) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2016
- 4) Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016
- 5) Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD 2015
- 6) Pengkajian RKA 2016
- 7) Pengkajian RKA Perubahan 2015
- 8) Perencanaan Umum
- 9) Penelitian Renja OPD
- 10) Monev MDG's dan Inpres Nomor 3 Tahun 2010
- 11) Sinergitas Perencanaan Kabupaten/Kota (Banprov)

**c. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi**

- 1) Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
- 2) Kajian Obligasi Daerah sebagai Alternatif Pembiayaan Daerah.
- 3) Kajian Kesiapan Kota Bogor Menjelang MEA 2015

**a. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya**

- 1) Pembinaan Kota Sehat
- 2) Monitoring dan Evaluasi Kemiskinan
- 3) Komda Lansia

**7) Urusan Perumahan Rakyat**

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

**a. Program Lingkungan Sehat Perumahan**

- 1) Pembangunan/Perbaikan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman
- 2) Dana Pendamping Kegiatan Pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat Yang Bersumber dari Bantuan IDB (Islamic Development Bank)
- 3) Biaya Pemberdayaan Masyarakat untuk Kegiatan Sanimas
- 4) Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (Neighbourhood Development PLBK/ND)
- 5) Perbaikan Sarana Umum di Lokasi Binaan P2WKSS, Lomba Kelurahan dan Lomba Posyandu
- 6) Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan (Banprov Jabar)
- 7) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh (APBN)
- 8) Pengembangan Sarana Prasarana Permukiman Berbasis Komunitas (Pengembangan Neighbourhood Development) (Banprov Jabar).
- 9) Pembangunan Sarana Prasarana Permukiman Pada Kawasan Permukiman Padat Kumuh (Pengembangan RPKPP) (Banprov Jabar).
- 10) Penunjang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
- 11) Pendamping Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)  
Kegiatan ini masuk kategori jenis belanja hibah, sehingga tidak dapat diserap dikarenakan sudah dianggarkan di pos anggaran BPKAD.
- 12) Pengelolaan Rusunawa
- 13) Pemeliharaan dan Perbaikan Rusunawa
- 14) Pengembangan Prasarana Dasar Permukiman & Utilitas Bangunan Rusunawa
- 15) Perencanaan Pembangunan Fisik Kegiatan Prasarana Permukiman Tahun 2016
- 16) Fasilitasi Penyusunan Raperda Kawasan Kumuh
- 17) FS Pengembangan Jaringan Air Limbah Permukiman

**b. Program Penataan dan Pengaturan Bangunan Gedung.**

- 1) Kegiatan Pelayanan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan
- 2) Kegiatan Bantuan Teknis Perencanaan Bangunan Gedung Pemerintahan
- 3) Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG)

- 4) Penyusunan Pedoman Teknis Perencanaan Air Minum Non PDAM
- 5) Penyusunan pedoman teknis pengawasan bangunan gedung pemerintah
- 6) Pembinaan Konsultan Perencanaan dan Konsultan Pengawas Konstruksi
- 7) Penaksiran Bangunan Gedung Pemerintah
- 8) Pembangunan Gedung DPRD Kota Bogor
- 9) Penyusunan Harga Satuan Pekerjaan T.A. 2016.

**c. Program Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan Jasa Konstruksi.**

- 1) Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Jasa Konstruksi
- 2) Pembinaan dan Pelatihan Tenaga Tukang
- 3) Sosialisasi dan Implementasi Pembinaan Teknis dan Pengawasan Jasa Konstruksi
- 4) Updating Database Jasa Konstruksi

**d. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran**

- 1) Pemeriksaan alat pemadam kebakaran dan Hidrant
- 2) Pemasangan Hidrant
- 3) Pelayanan Penanggulangan Bencana
- 4) Pemutakhiran dan Pemeliharaan Sistem Komunikasi Pencegahan Kebakaran
- 5) Gladi Anggota Pemadam Kebakaran, Latihan Relawan Kebakaran dan Latihan Anggota Kebakaran

**8) Urusan Kepemudaan dan Olahraga**

Penanganan urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Kantor Pemuda dan Olahraga melalui Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan, Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga, dan Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga.

**a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan**

- 1) Pemilihan Pertukaran Pemuda Antar Propinsi dan Pertukaran Pemuda Antar Negara.
- 2) Kegiatan Diklat dan Seleksi Paskibraka
- 3) Pemilihan jambore Pemuda
- 4) Gebyar Sumpah Pemuda
- 5) Pemilihan pemuda pelopor

**b. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga**

- 1) Liga Pendidikan Indonesia (LPI)
- 2) Kegiatan Pengembangan olahraga rekreasi/olahraga masyarakat (pekan olahraga rekreasi dan tradisional)
- 3) Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL)
- 4) Pembinaan Olahraga Prestasi / Pembinaan

**c. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga**

- 1) Perbaikan dan Pembuatan Fasilitas Olahraga dan Fasilitas Umum Lainnya

**9) Urusan Penanaman Modal**

Penanganan Urusan Penanaman Modal pada Pemerintah Kota Bogor ditangani oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal yang meliputi perumusan penyusunan kebijakan Penanaman

Modal sampai pelayanan publik. Adapun urusan penanaman modal dijabarkan melalui 2 program yaitu:

**a. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi**

- 1) Sinergitas Perencanaan Penanaman Modal
- 2) Penyelenggaraan Temu Bisnis
- 3) Penyelenggaraan *Bogor Economic Summit* (BES)
- 4) Penyelenggaraan Promosi Dalam Negeri
- 5) Penyelenggaraan Forum Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah (FKPPMD)

**b. Program Peningkatan daya saing penanaman modal**

- 1) Penyusunan Profil Investasi dan Potensi Daerah
- 2) Peningkatan Pelayanan Perizinan Berbasis Online
- 3) Jasa Penyelesaian Pengaduan
- 4) Pelayanan Perizinan Bidang Fisik
- 5) Pelayanan Perizinan Bidang Perekonomian
- 6) Pelayanan Perizinan Bidang Kesra
- 7) Sosialisasi Perizinan dan Penanaman Modal
- 8) Audit Sertifikasi ISO 9001:2008
- 9) Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal di Kota Bogor
- 10) Optimalisasi Perizinan Tata Ruang

**10) Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

Urusan Koperasi dan UKM dilaksanakan oleh Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor dan Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bogor. Urusan dijabarkan dalam enam program yang rinciannya sebagai berikut:

**a. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM**

- 1) Bimbingan Teknis Proposal Dan Intermediasi Bagi Koperasi dan UMKM
- 2) Temu Usaha Bagi Koperasi Dan UMKM
- 3) Gelar Produk UMKM
- 4) Updating data UMKM
- 5) Peningkatan Kualitas Kinerja UMKM

**a. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**

- 1) Pelatihan Perkoperasian
  1. Pelatihan Perkoperasian Konvensional
  2. Pelatihan Perkoperasian Pola Syariah
  3. Pelatihan Perkoperasian bagi LKM
  4. Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Manajer Koperasi
  5. Penyediaan Buku Administrasi Bagi LKM
- 2) Bintek Perubahan AD/ART
  1. Pelatihan Bintek Perubahan AD/ART Koperasi
  2. Penyediaan Brosur Pendirian Koperasi
  3. Pembuatan Badan Hukum Koperasi LKM
- 3) Pelatihan Amt bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi
  1. Pelatihan AMT Bagi Pengurus/Pengawas Koperasi
  2. Pelatihan AMT Bagi LKM
  3. Sosialisasi LKM Bagi Aparatur
  4. Sosialisasi Bagi Pelaku LKM
  5. Sosialisasi Software Koperasi
  6. Peringatan HUT Koperasi

**b. Program Penataan Dan Pemberdayaan PKL**

- 1) Updating Data Dan Pendaftaran PKL
- 2) Penyusunan FS Untuk Lokasi PKL (sentra dan permanen) andal dan DED
- 3) Penyusunan Naskah Akademis Revisi Perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2013
- 4) Sosialisasi Regulasi PKL (Pembuatan Spanduk Dan Papan Nama)
- 5) Pemberdayaan PKL
- 6) Pembangunan Sentra Kuliner Tahap II

**11) Urusan Kependudukan Dan Catatan Sipil**

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor melalui :

**a. Program Penataan Administrasi Kependudukan yaitu :**

- 1) Pembinaan Petugas Register Administrasi Kependudukan
- 2) Pengendalian Penduduk melalui Administrasi kependudukan
- 3) Pengadaan Blangko Kependudukan dan Pencacatan Sipil
- 4) Pengembangan SIAK
- 5) Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil di bidang Perkawinan
- 6) Penyuluhan dan Sosialisasi Administrasi Kependudukan
- 7) Pelayanan Isbat Nikah melalui kerjasama dengan Pengadilan Agama
- 8) Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil
- 9) Penataan Dokumen Kependudukan dan Registrasi Kependudukan
- 10) Penyusunan Profil Kependudukan
- 11) Evaluasi Penilaian dan Pelaporan

**12) Urusan Ketenagakerjaan**

Penanganan urusan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor, melalui 3 Program yaitu program Peningkatan kesempatan kerja, program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan. Tiga program ini diurai dengan berbagai kegiatan untuk menjawab berbagai tantangan dalam penanganan masalah ketenagakerjaan. Pelaksanaan urusan ini berlandaskan pada Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 04 Tahun 2010 tentang Ketenagakerjaan. Sampai dengan bulan Desember 2015 jumlah pencari kerja sebanyak 6.306 orang, sedangkan jumlah lowongan yang tersedia hanya 5.862 lowongan. Hal itu berkesinambungan dengan keberadaan 28 Bursa Kerja Khusus (BKK), yaitu bursa kerja yang berada di lingkungan satuan pendidikan menengah di satuan pendidikan tinggi dan di lembaga pelatihan kerja serta keberadaan 50 Lembaga Pendidikan Keterampilan yang aktif di Kota Bogor.

**a. Program Peningkatan Kesempatan Kerja**

- 1) Bursa Kerja Expo
- 2) Pemberian Kerja Sementara (Padat Karya)
- 3) Implementasi POSYANTEK Ketenagakerjaan Siaga Mandiri

**b. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja**

- 1) Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Pencari Kerja dan Penganggur

- 2) Pelatihan Keterampilan Berbasis Masyarakat (KK Miskin)
- 3) Pelatihan Melalui Pemagangan
- 4) Lembaga Latihan Swasta
- 5) Pelatihan Keterampilan Hidup (Life Skill)

**c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**

- 1) Pembinaan Hubungan Industrial dan Pembinaan Buruh
- 2) Kegiatan Penelitian dan Penetapan Upah Minimum Kota (UMK)
- 3) Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit
- 4) Perlindungan Tenaga Kerja Anak Terpaksa Bekerja
- 5) Pembinaan dan Pengawasan Bagi Tenaga Kerja Asing
- 6) Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

**13) Urusan Ketahanan Pangan**

Penanganan urusan ketahanan pangan dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. Penjabaran dari kedua program tersebut adalah sebagai berikut:

**a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan**

- 1) Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat
- 2) Penanganan Daerah Rawan Pangan (Distribusi Raskin)
- 3) Fasilitasi Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
- 4) Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
- 5) Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan
- 6) Analisis Neraca Bahan Makanan Kota Bogor
- 7) Peningkatan Peran Dewan Ketahanan Pangan Kota Bogor

**b. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani**

- 1) Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Desa Mandiri Pangan (Demapan)
- 2) Penyuluhan dan Pendampingan Petani
- 3) Pemanfaatan Pekarangan Sebagai Sumber Peningkatan Gizi Keluarga
- 4) Metode Penyuluhan Pertanian

**c. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (APBN Dekonsentrasi)**

- 1) Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan
- 2) Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
- 3) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan

**14) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB). Urusan tersebut dilaksanakan melalui tiga program yaitu Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, dan Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan. Ketiga program tersebut dijabarkan melalui kegiatan sebagai berikut:



**a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan**

- 1) Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga  
Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga bertujuan meningkatkan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi serta untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan dalam mengembangkan usaha ekonomi keluarga. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui penyelenggaraan Pelatihan Tata Boga yang diikuti 40 orang perempuan Kepala Keluarga di 2 kelurahan, yaitu di Kelurahan Muarasari sebanyak 20 orang dan Kelurahan Kedunghalang sebanyak 20 orang. Sedangkan pelatihan menjahit dilaksanakan di kelurahan Sindangbarang diikuti sebanyak 20 orang.

**b. Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan**

- 1) Fasilitasi Pengembangan Kota Ramah Anak
- 2) Penguatan Kelembagaan Pokjanal Posyandu
- 3) Pemberdayaan Sistem Informasi Posyandu (SIP)
- 4) Profil Gender dan Anak serta optimalisasi P2TP2A

**c. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan**

- 1) Program terpadu P2WKSS bertujuan meningkatkan peranan perempuan melalui pola pendekatan lintas bidang pembangunan, secara terkoordinasi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dalam mencapai tingkat hidup yang berkualitas.  
Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok binaan, meningkatkan peran status gizi keluarga serta meningkatkan peran serta perempuan dalam mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera.  
Program P2WKSS dilaksanakan terhadap 100 warga binaan di kelurahan Muara Sari Kecamatan Bogor Selatan dan pada tahun 2015 meraih juara I Kategori Peran Perempuan pada penilaian Program Terpadu P2WKSS tingkat Provinsi Jawa Barat. Kegiatan Musyawarah Kelurahan dan Pembekalan bagi warga binaan sebanyak 100 orang dan Pembekalan Kader TP.PKK Tk. Kecamatan dan Tingkat Kelurahan sebanyak 50 orang keterampilan warga binaan (pelatihan menjahit dan pelatihan tata boga sebanyak 65 orang, Pembinaan rutin warga binaan di lokasi binaan P2WKSS RW 08 Kelurahan Muara Sari Kecamatan Bogor Selatan, terlaksananya monev program P2WKSS Kelurahan Mekar Wangi dan Kelurahan Ciluar.

**d. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**

Pengarusutamaan gender merupakan proses yang menjamin perempuan mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan dan kebijakan pemerintah. Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu Kegiatan Pemberdayaan Perempuan di bidang Politik

## 15) **Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera merupakan tanggung jawab Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB). Urusan tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk secara alamiah di Kota Bogor, yang pada tahun 2013 mencapai 1,7 persen dan pada tahun 2014 menurun menjadi 1.6 persen

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera tersebut dilaksanakan melalui 2 (dua) program yaitu, Program Keluarga Berencana dan Peningkatan Penahanan dan Pemberdayaan Keluarga. Kedua program tersebut dijabarkan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut :

### **a. Program Keluarga Berencana**

Program Keluarga Berencana bertujuan menurunkan laju pertumbuhan penduduk yang dilakukan antara lain melalui pengendalian kelahiran. Untuk mencapai tujuan tersebut, telah dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pelayanan Keluarga Berencana dan Pengadaan Alat Kontrasepsi  
Kegiatan tersebut merupakan salah satu program bidang KB-KS yang bertujuan meningkatkan pelayanan KB dan menjamin ketersediaan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin secara terjangkau.
- 2) Intensifikasi Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KB Nasional.

### **b. Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga**

Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kualitas keluarga di masyarakat dalam melaksanakan program KB dan meningkatkan keluarga bahagia dan sejahtera. Untuk mencapai maksud tersebut telah dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penguatan Kelembagaan dan Jaringan KB  
Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Jaringan KB yang telah dilaksanakan adalah :
  1. Kegiatan khusus seperti Hari Keluarga Nasional (Harganas), Bhakti TNI KB Terpadu, dan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan.
  2. Pembinaan Kader UPPKS, Forum Pos KB dan pembinaan Tri Bina (BKB, BKR, BKL)
  3. Kegiatan Dasar Lomba dengan hasil sebagai berikut :
    - Juara I Lomba Kader Pos KB Tingkat Kota Bogor
    - Juara I BKL Tingkat Kota Bogor
    - Juara I PLKB Kota Bogor
    - Juara I KB Lestari 10 Tahun 15 Tahun 20 Tahun Tingkat Kota Bogor
    - Juara I UPPKS Tingkat Kota Bogor
    - Juara I KODIM Tingkat Kota Bogor
    - Juara I Kader BKB Tingkat Kota Bogor
    - Juara I Kelompok BKB Tingkat Kota Bogor
    - Juara I Duta Mahasiswa Tingkat Kota Bogor
    - Juara I Duta PIK R Tingkat Kota Bogor
    - Juara I Keluarga Harmonis Tk Tingkat Kota Bogor
    - Juara I Kesatuan Gerak PKK Tingkat Nasional

- 2) Pembinaan Ketahanan Keluarga  
Kegiatan tersebut mencakup kegiatan Tribina, dan Pemberdayaan Ekonomi melalui Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

## **16) Urusan Perhubungan**

Dalam konteks tersebut, telah disusun strategi-strategi kebijakan transportasi kota Bogor yang diantaranya adalah rasionalisasi jumlah dan ukuran angkutan kota, memaknai transportasi sebagai “pergerakan, bukan perpindahan“ orang melalui jalur sepeda dan pedestrian, serta minimalisasi pergerakan kendaraan melalui penyediaan fasilitas parkir yang tersentralisasi. Penjabaran strategi-strategi tersebut dilakukan melalui empat) program, dengan rinciankegiatan sebagai berikut :

### **a. Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan**

- 1) Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan dan Simpang di Kota Bogor
- 2) Penyusunan Naskah Akademis (revisi PERDA 11/2008 tentang Perubahan atas PERDA 5/2007 tentang PDJT)
- 3) Evaluasi Kinerja Angkutan Umum
- 4) Perparkiran
- 5) UPTD Terminal
- 6) Pembangunan dan Pemasangan Prasarana/ Fasilitas Lalu Lintas

### **b. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas**

- 1) Operasi Penertiban Terpadu dengan Instansi Terkait
- 2) Sosialisasi Sadar Tertib Berlalu Lintas (DARTIBLANTAS)
- 3) Pekan Nasional Keselamatan Jalan
- 4) Kegiatan Pengadaan Media (Sarana) Sosialisasi/ Penyuluhan

### **c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan,**

- 1) Pengoperasian Angkutan Umum Melalui Penerapan Shift Angkutan  
Pelaksanaan penataan angkutan umum dengan menerapkan operasional sistem shift merupakan kegiatan sejak tahun 2009, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pengemudi dan pengusaha, menciptakan keseimbangan antara jumlah penumpang dengan kendaraan angkutan umum yang beroperasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum. Realisasi penerapan sampai dengan tahun 2015 sebanyak 16 trayek.

Realisasi pengurangan jumlah kendaraan angkutan kota dan angkutan perkotaan AKDP sebanyak 16 trayek yang telah melaksanakan operasional sistem shift sampai dengan tahun 2015 sebanyak 1.153 kendaraan atau sekitar 15,3 % dari jumlah angkot yang tidak operasional per hari.

### **d. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor**

- 1) Pelayanan Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor  
Sebagai jaminan keselamatan laik teknis dan laik jalan kendaraan bermotor dalam penyelenggaraan angkutan penumpang umum dan angkutan barang sebagai kendaraan wajib uji, dilakukan Pengujian Kendaraan Bermotor Berkala setiap enam bulan sekali.

## 17) **Urusan Komunikasi dan Informatika**

Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Kantor Komunikasi dan Informatika dan Bagian Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Daerah Kota Bogor. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2015 – 2019, bahwa urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan untuk mendukung Misi ke satu, 'Menjadikan Bogor kota yang cerdas dan berwawasan teknologi informasi dan komunikasi', dengan tujuan meningkatkan implementasi *e-government*, dan tujuan mendorong proses pengambilan keputusan publik yang cerdas.

### **a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa**

- 1) Pengendalian Peredaran Film, VCD dan DVD
- 2) Pengendalian Menara Telekomunikasi
- 3) Pemeliharaan dan Peningkatan Jaringan Intranet dan Internet (Backbone) Kota Bogor
- 4) Pengembangan Infrastruktur Jaringan Kota
- 5) Pengembangan Infrastruktur Jaringan Kelurahan.
- 6) Pengadaan dan Pemeliharaan Perangkat Lab RICE
- 7) Pengadaan dan Pemeliharaan Perangkat Lab RICE
- 8) Pengadaan Bandwith Internet
- 9) Penataan LAN OPD
- 10) Pembangunan Wifi Ruang Publik
- 11) Pengelolaan Radio Sipatahunan
- 12) Pengembangan dan Pengelolaan Web
- 13) Pengembangan Aplikasi e-Gov
- 14) Pemeliharaan Close Circuit Television (CCTV)
- 15) Digitalisasi Profil Kota Bogor
- 16) Pengembangan dan Pengelolaan Data Warehouse
- 17) Pemeliharaan Grounding Listrik dan Erester Internet OPD dan Kelurahan
- 18) Pembangunan Data Center
- 19) Pengembangan Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi
- 20) Pemeliharaan Radio Sipatahunan
- 21) Kegiatan Kajian TV Publik dan Edukasi
- 22) Pengadaan Alat Ukur Telekomunikasi

### **a. Program Peningkatan Pelayanan Informasi**

Program tersebut dijabarkan melalui pelaksanaan 4 kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan Media Publikasi
- 2) Peningkatan Kualitas PPID
- 3) Monitoring dan Evaluasi Informasi
- 4) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
- 5) Pembangunan Opini Publik

### **b. Program Penyelenggaraan Kehumasan**

- 1) Peningkatan Pelayanan Kehumasan
- 2) Pendokumentasian Bidang Kehumasan
- 3) Pembuatan Film Dokumenter

### **c. Program Pengelolaan Hubungan Media**

- 1) Penyampaian Informasi Publik
- 2) Penyebarluasan Informasi

## **18) Urusan Pertanahan**

Penanganan urusan pertanahan dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bogor. Dalam upaya penanganan urusan ini, terdapat beberapa kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kota Bogor dalam bentuk pemberian izin lokasi, pembangunan pilar batas, dan penanganan permasalahan pertanahan. Sesuai dengan kewenangan tersebut, penanganan urusan pertanahan di tahun 2015 dilakukan dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Pilar Batas Antara Kota Dan Kabupaten Bogor
- 2) Penanganan Permasalahan Pertanahan Dan Sosialisasi Peraturan Pertanahan Kota Bogor
- 3) Pemberian Izin Lokasi

## **19) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

Penanganan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor dan Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Bogor. Urusan ini dilaksanakan melalui tiga program yaitu Program Pendidikan Politik Masyarakat, Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Dan Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

### **a. Program Pendidikan Politik Masyarakat**

- 1) Penyelenggaraan Forum Konsultasi Komunikasi Politik (FKKP)
- 2) Sosialisasi Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
- 3) Re-orientasi, Etika Moral dan Budaya Politik
- 4) Pemeliharaan Ketertiban Umum

### **b. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan**

- 1) Bina Ideologi dan Wawasan Kesatuan Bangsa Bagi Pelajar
- 2) Peningkatan Wawasan Kebangsaan
- 3) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
- 4) Penyelenggaraan Kerukunan Etnis
- 5) Pembinaan bagi Aparatur Wilayah Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum
- 6) Forum Konsultasi dan Komunikasi Daerah
- 7) Sosialisasi dan Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
- 8) Penyelenggaraan PHBN (Peringatan Hari Besar Nasional)
- 9) Penyelenggaraan Hari Besar Islam (PHBI)

### **c. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan**

- 1) Pemutakhiran Data Organisasi Kemasyarakatan dan LSM se Kota Bogor

### **d. Program Peningkatan Kamtrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal**

- 1) Piket Anggota Sat. Pol. PP Kota Bogor
- 2) Penertiban PKL
- 3) Penegakan Perda dan Sidang Tipiring
- 4) Penyidikan dan Penindakan
- 5) Pengamanan Hari Besar dan Hari Raya (PHBN)
- 6) Pembinaan Linmas
- 7) Pembongkaran bangunan

**20) Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dilaksanakan oleh Inspektorat, Sekretariat Dewan, Dinas Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat Daerah, dan Kecamatan se-Kota Bogor. Urusan ini dijabarkan melalui 15 Program yaitu:

**a. Program Pematapan Otonomi Daerah Dan Sistem Administrasi Pemerintah Daerah**

- 1) Pelaksanaan Pematapan Batas Antar Kelurahan Di Wilayah Kecamatan Bogor Tengah Tahun 2015
- 2) Kegiatan Pembakuan Nama Rupabumi
- 3) Penyelenggaraan Otonomi Daerah

**b. Program Pengendalian Pembangunan**

- 1) Penyusunan Standar Biaya
- 2) Evaluasi Pelaporan dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2015
- 3) Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan
- 4) Penyelenggaraan e-Procurement
- 5) Pengendalian Administrasi Pembangunan
- 6) Workshop Penyusunan Dokumen Kontrak
- 7) Workshop Mutu Konstruksi Bagi PPK

**c. Program Peningkatan Dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan**

- 1) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
- 2) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dan Informasi LPPD Kota Bogor Tahun 2014.
- 3) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bogor
- 4) Rapat Kerja Daerah
- 5) Evaluasi Kinerja BUMD Kota Bogor
- 6) Kajian Perubahan BPR Bank Pasar Kota Bogor menjadi Bank Umum
- 7) Penyusunan Perencanaan dan Pertanggungjawaban SKPD
- 8) Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial
- 9) Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Bogor .

**d. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

Program ini dilaksanakan oleh Bagian Kemasyarakatan melalui beberapa kegiatan yaitu

- 1) Peningkatan Peran Serta Masyarakat
- 2) Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Kemasyarakatan (SIM KEMAS)

**e. Program Pembinaan Dan Penataan Perangkat Kecamatan Dan Kelurahan**

- 1) Kajian Penempatan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan
- 2) Kegiatan Kajian Pengembangan Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2015

- 3) Evaluasi dan Sosialisasi Paten Kota Bogor Tahun 2015
- 4) Penyusunan, Sosialisasi dan Evaluasi Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2015
- 5) Pembinaan dan Evaluasi terhadap Perangkat Kecamatan dan Kelurahan
- 6) Workshop Etika Pelayanan Bagi Aparatur Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2015
- 7) Workshop Manajemen Leadership Bagi Camat dan Lurah Tahun 2015
- 8) Kajian Pemekaran Wilayah Kecamatan
- 9) Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
- 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan

**f. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Pengelolaan Rumah Tangga OPD
- 3) Pengelolaan Sandi dan Telekomunikasi
- 4) Piket Urdal dan Santel
- 5) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 6) Pelayanan Keprotokolan
- 7) Pengelolaan SIM DPRD
- 8) Pelayanan Kehumasan

**g. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur**

- 1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Inventaris Kantor
- 2) Pengadaan Alat/Perlengkapan Kantor
- 3) Penyusunan Harga Standar
- 4) peningkatan Pelayanan Keprotokolan
- 5) Penyusunan RKBMD/RKPBMMD
- 6) Piket Urdal dan Santel
- 7) Pengelolaan Sandi dan Telekomunikasi
- 8) Pengadaan Inventaris Kantor
- 9) Perencanaan Pengadaan Rumah Jabatan,
- 10) Persiapan Pengadaan Rumah Jabatan,
- 11) Pelaksanaan Pengadaan Rumah Jabatan,
- 12) Penyerahan Hasil Pengadaan Rumah Jabatan,
- 13) Pengadaan Inventaris Rumah Dinas KDH/WKDH

**h. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Program ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengembangan SDM.
- 2) Diklat Prajabatan.
- 3) Diklat Kepemimpinan Tingkat II dan III
- 4) Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
- 5) Diklat Fungsional dan Teknis Umum

**i. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur**

- 1) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)
- 2) Fasilitasi Alih Tugas PNS Antar Instansi, Antar Provinsi dan Antar Kabupaten/Kota
- 3) Pembinaan dan Pengembangan Karir PNS



- 4) Penyusunan Formasi
- 5) Sumpah Janji dan Konversi NIP, Peningkatan Status PNS dan Perpanjangan SK TKK
- 6) Penatausahaan Pegawai
- 7) Pengembangan Karir Jabatan Struktural
- 8) Kesejahteraan Pegawai
- 9) Mutasi Pegawai
- 10) Peringatan Hari Jadi KORPRI Tingkat Kota Bogor
- 11) Bantuan Hukum Kepada Anggota KORPRI
- 12) Pembinaan terhadap Anggota KORPRI
- 13) Pekan Olah Raga Pemerintah Daerah (PORPEMDA)

**j. Program Peningkatan Kerjasama Daerah**

- 1) Keikutsertaan dalam APEKSI, Citynet dan Forum Kerjasama lainnya
- 2) Optimalisasi Kerjasama Daerah
- 3) Kerja Sama Luar Negeri
- 4) Optimalisasi CSR Kota Bogor
- 5) Optimalisasi Penyehatan PD Jasa Transportasi Tahun 2015
- 6) Optimalisasi Pengajuan Alokasi Raskin Tingkat Kota

**k. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja**

Program ini dilaksanakan oleh Bagian Organisasi dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
- 2) Penyusunan Indikator Kinerja Utama

**l. Program Penataan Dan Penguatan Organisasi**

Program ini dilaksanakan oleh Bagian Organisasi melalui kegiatan sebagai berikut :

- 1) Evaluasi dan Penataan Organisasi Perangkat Daerah
- 2) Evaluasi Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja OPD

**m. Program Penataan Tatalaksana**

Program ini dilaksanakan oleh Bagian Organisasi melalui Kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :

- 1) Evaluasi dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur
- 2) Evaluasi Penggunaan Pakaian Dinas
- 3) Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja

**n. Program Penataan Sistem Manajemen Sdm Aparatur**

Program ini dilaksanakan oleh Bagian Organisasi melalui kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Evaluasi Jabatan
- 2) Pengembangan Jabatan Fungsional

**o. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah**

- 1) Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor (PAK-JFA)
- 2) Pemutakhiran Data
- 3) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Reviu LKPD) Tahun 2015.
- 4) Pengelolaan LP2P PNS Gol.III/b ke atas di lingkungan Pemerintah Kota Bogor
- 5) Audit Operasional (PKPT dan Non PKPT)

- 6) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Satuan Tugas
- 7) Bantuan Operasional Pemeriksaan Bantuan Hibah dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015
- 8) Peningkatan Kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
- 9) Rencana Aksi Daerah Pemberantas Korupsi (RAD-PK)

**p. Program Penataan Perundang-Undangan**

Program ini dilaksanakan oleh Bagian Hukum Setda Kota Bogor yang dijabarkan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Produk Hukum Daerah
- 2) Pengolahan JDI Hukum, Pengolahan Lembaran Daerah dan Berita Daerah serta Sosialisasi
- 3) Pengkajian dan Analisa Produk Hukum Daerah.
- 4) Pengelolaan Sistem Informasi Hukum

**q. Program Penegakan hukum dan Penerapan HAM**

- 1) Penunjang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM)
- 2) Fasilitasi Penanganan Perkara Perdata dan TUN
- 3) Penyuluhan Hukum
- 4) Pembinaan Kadarkum (Kelurahan Sadar Hukum)
- 5) Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin

**r. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah,**

Program ini bertujuan memberikan dukungan dan kemudahan kepada anggota DPRD Kota Bogor dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Program ini diharapkan membantu pencitraan yang baik bagi DPRD Kota Bogor sebagai lembaga legislatif daerah di Kota Bogor. Melalui program ini terjalin komunikasi timbal balik antara DPRD Kota Bogor dengan Pemerintah Kota Bogor, masyarakat serta *stakeholders* Kota Bogor dalam rangka *good governance* serta terwujudnya sinkronisasi dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bogor. Program ini terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan, yaitu :

- 1) Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah
- 2) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 3) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah,
- 4) Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan,
- 5) Reses
- 6) Rapat-rapat Paripurna
- 7) Koordinasi dan Konsultasi
- 8) Pengadaan Pakaian Dinas
- 9) Peningkatan SDM dan Profesionalisme Pimpinan dan Anggota DPRD

**s. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.**

Program ini bertujuan memberikan dukungan dan fasilitasi bagi sekretariat DPRD untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Asosiasi Sekretaris DPRD Seluruh Indonesia (ASDEKSI) dan penyusunan satuan biaya dewan (SB Dewan) serta peningkatan wawasan SDM sekretariat DPRD. Program ini terdiri dari 1 kegiatan, yaitu :

- 1) Pelayanan Administratif DPRD  
Kegiatan ini berupa koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan oleh sekretariat DPRD dalam menunjang pelaksanaan tugas Pokok dan fungsi dalam menunjang pelaksanaan tugas fungsi DPRD kota Bogor. Dalam kegiatan ini juga diakomodir iuran tahunan ASDEKSI dan keikutsertaan dalam workshop ASDEKSI (Asosiasi Sekretris DPRD Kota Seluruh Indonesia) serta Rapat Kerja Tim Penyusunan Standar Biaya Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan dan Belanja Penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.

**t. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah**

- 1) Penunjang Kedinasan Walikota dan Wakil Walikota
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah

**u. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**

- 1) Penelitian Pertanggungjawaban Keuangan Sekretariat
- 2) Pelaporan Keuangan Sekretariat
- 3) Pembinaan Administrasi Keuangan
- 4) Penyusunan APBD dan Penjabaran APBD.
- 5) Penelitian Pertanggungjawaban SKPD
- 6) Penyusunan Perubahan APBD
- 7) Penelitian DPA SKPD
- 8) Penelitian DPPA SKPD
- 9) Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis APBD
- 10) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- 11) Asistensi Penatausahaan Keuangan SKPD.
- 12) Pengadministrasian Gaji Pegawai Kota Bogor
- 13) Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan Dana Perimbangan, Bagi Hasil dan Dana Tugas Pembantuan
- 14) Pemeliharaan SIMBADA.
- 15) Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD)
- 16) Evaluasi Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.
- 17) Pemetaan BMD
- 18) Pengadministrasian Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
- 19) Pensertipikatan Tanah Pemerintah Kota Bogor.
- 20) Asuransi Kendaraan dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Bogor
- 21) Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Barang Milik Daerah.
- 22) Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dalam Penguasaan Langsung Pengelola BMD.
- 23) Inventarisasi Barang Milik Daerah sebagai pendukung Neraca Daerah.
- 24) Penilaian Barang Milik Daerah untuk Updating Nilai Neraca Daerah.
- 25) Penggunaan Barang Milik Daerah.

- 26) Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah kepada Pengurus dan Penyimpan Barang.
- 27) Kajian Optimalisasi Aset Daerah
- 28) Penyusunan Perencanaan dan Pertanggungjawaban SKPD
- 29) Pendataan Wajib Pajak Daerah
- 30) Uji Potensi Pajak Daerah
- 31) Penelitian dan Penghitungan Pajak Daerah
- 32) Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah
- 33) Intensifikasi Penagihan Piutang Pajak Daerah
- 34) Sosialisasi dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- 35) Pemeriksaan dan Penertiban Pajak Daerah
- 36) Analisa/Kajian dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah
- 37) Penyebaran Ketetapan Pajak Daerah
- 38) Pemeliharaan Basis Data PBB
- 39) Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pajak Daerah
- 40) Surveilliance ISO Pelayanan PBB P2
- 41) Sistem Pajak Daerah Online
- 42) Pendataan Potensi Reklame Permanen
- 43) Pemeliharaan Panggung Reklame dan Papan Hibauan
- 44) Penilaian Pajak Daerah
- 45) Kajian Potensi PAD Kota Bogor
- 46) Kajian Penerapan Pemungutan Pajak Dengan Sistem Online
- 47) Kajian Optimalisasi Retribusi dan Pajak Parkir
- 48) Kajian Pola Penyebaran Tata Letak Reklame
- 49) Penyusunan Zona Nilai Tanah (Geospasial)
- 50) Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah
- 51) Intensifikasi Penagihan Pajak Daerah

•  
**v. Program Pemberdayaan Lembaga Sosial**

- 1) Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Umat Islam
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Kota Bogor dan STQ Tingkat Provinsi
- 3) Penyelenggaraan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Kota Bogor
- 4) Sosialisasi dalam rangka pemberian gelar daerah kepada tokoh masyarakat Kota Bogor
- 5) Sosialisasi dalam rangka Peningkatan Manajemen dan Pengelolaan Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT).

**21) Urusan Pemberdayaan Masyarakat**

Urusan ini diurai melalui 3 program meliputi Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan, Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan, dan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan. Kegiatan-kegiatan dari setiap program tersebut adalah sebagai berikut :

**a. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan**

- 1) Peningkatan Pencapaian dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)
- 2) Pemberdayaan Ekonomi Syariah
- 3) Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
- 4) Pembinaan Kelompok Khusus Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (Poksus UP2K) PKK Kelurahan dan Penilaian UP2K terbaik Tingkat Kota dan Provinsi.

**b. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan.**

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Kelurahan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pemberdayaan Posdaya (Pos Pemberdayaan Keluarga) di Kelurahan.
- 2) Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)  
Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) merupakan kegiatan nasional yang diadakan rutin setiap tahun untuk menumbuh kembangkan budaya gotong royong masyarakat baik melalui kegiatan fisik maupun non fisik di bidang kemasyarakatan, bidang ekonomi, bidang sosial, budaya dan agama serta bidang lingkungan.
- 3) TNI Manunggal Satata Sariksa (TMSS)  
TMSS dilakukan melalui Kegiatan :
  - Pembangunan Sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan masyarakat di kelurahan
  - Kegiatan Fisik di kecamatan Tanah Sareal
  - Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dalam menunjang kegiatan TMSS sebanyak 120 orang
- 4) Pembinaan PKK  
Kegiatan Pembinaan PKK merupakan salah satu upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui Tim Penggerak PKK Kota, TP PKK Kecamatan dan TP PKK Kelurahan dengan berbagai kegiatan diantaranya:
- 5) Peningkatan Kemandirian Lembaga Kemasyarakatan

**c. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan**

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu Perlombaan kelurahan

Perlombaan Kelurahan dilaksanakan dengan beberapa kegiatan diantaranya :

- Kelurahan yang dinilai untuk perlombaan kelurahan tingkat kota sebanyak 6 kelurahan
- Pembinaan Kelurahan terpilih sebanyak 1 kelurahan
- Pembinaan kelembagaan kelurahan terpilih terhadap 50 orang
- Kelurahan yang dinilai untuk perlombaan kelurahan tingkat provinsi sebanyak 1 kelurahan
- Pembinaan kelurahan terhadap 50 Kelurahan
- Kelurahan untuk rechecking perlombaan kelurahan tingkat provinsi sebanyak 1 kelurahan
- Kelurahan untuk perlombaan kelurahan tingkat nasional sebanyak 1 kelurahan
- Pembuatan buku rt/rw sebanyak 2.100 buku
- Pembuatan buku dasa wisma, PKK RT, PKK RW di lokasi lomba kelurahan, P2WKSS, Posyandu, UP2K, dan 10 program PKK sebanyak 550 buku

**d. Program pengembangan data / informasi statistik daerah.**

Program pengembangan data / informasi statistik daerah dilaksanakan dengan Penyusunan Profil Kelurahan sebagai implemementasi dari Permendagri No. 12 Tahun 2007. Tujuan program tersebut untuk mengetahui gambaran menyeluruh tentang karakter desa dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia,

kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi kelurahan dan ter-updatenya data potensi profil kelurahan serta tercetaknya buku profil kelurahan sebanyak 100 buku.

## **22) Urusan Sosial**

Sasaran dalam penanganan urusan sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), dan Panti/Orsos/Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)/Karang Taruna (KT) untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel (terlampir). Selain itu jumlah panti asuhan yang terdapat di Kota Bogor sebanyak 74 (Tujuh Puluh Empat) buah, jumlah rumah singgah sebanyak 4 (empat) buah, termasuk rumah singgah yang ada di Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan Transmigrasi Kota Bogor.

### **a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya**

- 1) Penyelenggaraan Perlindungan Sosial
- 2) Monitoring dan Pembinaan Program Keluarga Harapan (PKH)
- 3) Pemutakhiran Data dan Pusat Informasi Kesejahteraan Sosial
- 4) Pemberdayaan Lanjut Usia
- 5) Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi
- 6) Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial

### **b. Program Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial**

- 1) Pemeliharaan TMP Dreded
- 2) Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat
- 3) Pemberdayaan Potensi Sosial dan Sumbangan Sosial
- 4) Penumbuhan Wahana Kesejahteraan Berbasis Masyarakat (WKSBM)

### **f. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo**

- 1) Pembinaan Yayasan Sosial/Orsos/Panti Sosial  
Kegiatan ini dilaksanakan melalui pembinaan kepada yayasan sosial/panti sebanyak 40 (empat puluh) yayasan/panti dari 74 yayasan/panti, peningkatan SDM pengelola panti sebanyak 74 (tujuh puluh empat) orang, pemberian penghargaan bagi yayasan/panti terbaik sebanyak (tiga) panti yaitu:
  - a) Peringkat I adalah Panti Wredha Hanna;
  - b) Peringkat II adalah Yayasan Pembina Kesejahteraan Keluarga Semplak Bogor;
  - c) Peringkat ketiga adalah Yayasan Panti Asuhan Candra Naya.

### **g. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**

- 1) **Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial**  
Kegiatan ini bertujuan untuk mengatasi, membangun, memperbaiki dan merubah permasalahan sosial yang menimpa individu sehingga dapat hidup wajar di tengah masyarakat. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah dengan melakukan pembinaan berupa bimbingan sosial, pemberian motivasi serta sosialisasi untuk

pemulihan sikap dan perilaku kepada anak jalanan (anjali), gelandangan dan pengemis (gepeng), dan Wanita Tuna Susila (WTS).

**2) Pembinaan Taruna Siaga Bencana**

Kegiatan ini dilaksanakan melalui pemberian pelatihan bagi anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana) sebanyak 65 (lima puluh) orang dan penanganan bencana kebakaran sebanyak 51 (lima puluh satu) kejadian, longsor sebanyak 90 (sembilan puluh) kejadian, banjir sebanyak 26 (dua puluh enam) kejadian, angin puting beliung sebanyak 26 (dua puluh enam) kejadian, rumah roboh 48 (delapan puluh empat) kejadian, orang hanyut 4 (empat) kejadian dan kejadian lainnya sebanyak 15 (lima belas) kejadian yang ditangani oleh anggota Tagana, sedangkan hasil yang dicapai adalah tertangani dan terbantunya korban bencana tepat waktu.

**h. Program Pembinaan Anak Terlantar**

- 1) Pembinaan Anak Terlantar dan Anak Jalanan
- 2) Penanganan PMKS di Rumah Singgah

Kegiatan ini dilaksanakan melalui pembinaan PMKS di rumah singgah, adapun yang termasuk PMKS didalamnya adalah :

- pelayanan sosial bagi Kelompok Minoritas, WTS, ODHA;
- pembinaan bagi anak jalanan (anjali) antara lain terdiri dari identifikasi, assesment, konsultasi, dan bimbingan lanjutan;

**i. Program Pembinaan Penyandang Caca dan Trauma**

- 1) Pembinaan Penyandang Cacat, Trauma dan Korban Bencana
- 2) Pemeliharaan Loka Bina Karya Penyandang Cacat dan PMKS lainnya

**j. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks. Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)**

- 1) Pembinaan Bagi Korban Narkotika dan HIV/AIDS dan WTS  
Kegiatan ini mempunyai output yaitu bimbingan sosial dan latihan keterampilan serta pembinaan kepada 40 (empat puluh) orang yang terdiri dari ODHA, WTS, Waria dan Korban Napza.
- 2) Pembinaan Korban Tindak Kekerasan, Trafficking  
Kegiatan ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap anak, perempuan, keluarga, dan perdagangan orang (*trafficking*) yang dilaksanakan melalui sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, penanganan kasus sebanyak 37 orang baik melalui konseling, *case conference* dan pemberian rujukan bagi korban ke lembaga sosial yang menangani hal tersebut. Bimbingan teknis bagi tokoh masyarakat, kader, Puskesmas dalam penanganan masalah korban tindak kekerasan sebanyak 50 orang.
- 3) Pembinaan Trauma dan Eks Psikotik

Kegiatan ini mempunyai output yaitu pelaksanaan bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan telur asin bagi 25 orang eks psikotik dan keluarganya sebanyak 25 orang . Adapun sasarannya adalah 25 orang eks psikotik beserta keluarganya.

### **23) Urusan Kebudayaan**

Pelaksanaan Program Pengelolaan Keragaman Budayadan Pengembangan Nilai Budaya pada Seksi Kesenian, Bidang Kebudayaan, Dinas Kebudayaan, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Bogor Selama Tahun 2015 telah melaksanakan berbagai kegiatan yang meliputi Program Pengelolaan Keragaman Budaya dan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya. Adapun Program dan Kegiatan yang telah kami laksanakan tersebut adalah sebagai berikut:

#### **a. Program Pengelolaan Keragaman Budaya:**

- 1) Pergelaran Kesenian, meliputi:
  1. Pementasan Kacapi Suling;
  2. Pergelaran Insidentil sebanyak 20 (Dua puluh ) kali terealisasi pada kegiatan:
  3. Pementasan/Pagelaran Di Kota Bogor
  4. Pergelaran Kesenian di Luar daerah Kota Bogor terdiri dari :
  5. Kegiatan Festival Kesenian
- 2) Malam Anugerah Budaya

#### **b. Program Pemeliharaan dan pengembangan Nilai Tradisional**

Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Nilai Tradisional yaitu berupa pelestarian dan pengembangan Potensi Budaya dan Nilai Nilai Tradisional yang tumbuh dimasyarakat dan harus dijaga keberadaannya, dan merupakan kearifan lokal. Adapun kegiatannya yaitu sebagai berikut :

- 1) Workshop Bahasa Sunda Dan Kaulinan Urang Lembur Tahun 2015
- 2) Pagelaran Wayang Golek
- 3) Lomba Permainan Anak Tradisional/ Kaulinan Urang Lembur Tk. Kota Bogor
- 4) Kaulem (Kaulinan Urang Lembur) Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2015.
- 5) Kegiatan Binojakrama Padalangan Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2015.
- 6) Lomba Kawih Sunda Anggana Sekar Tahun 2015.
- 7) Lomba Rampak Sekar Tahun 2015.
- 8) Lomba Tari Permainan Anak Tradisional / Kaulinan Urang Lembur Tahun 2015.
- 9) Pelestarian Benda Cagar Budaya

#### **c. Program Pengembangan Nilai Budaya :**

##### **1) Bantuan Hibah Peralatan Kesenian Tradisional**

Program Kegiatan pemberian bantuan hibah peralatan Kesenian Tradisional adalah merupakan apresiasi Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Kebudayaan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Bogor dalam rangka pembinaan terhadap komunitas yang ada di Kota Bogor.



## 24) **Urusan Statistik**

Selama tahun 2015, urusan statistic dijabarkan melalui Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

### a. **Program Pengembangan Data / Informasi Statistik Daerah**

- 1) Data Pokok Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor
- 2) Penyusunan Indikator Makro Ekonomi (IME)

Kegiatan ini bertujuan untuk menyajikan informasi tentang gambaran kondisi ekonomi makro Kota Bogor sebagai bahan pengambilan keputusan bagi para pemangku kepentingan. Hasil kegiatan ini berupa publikasi data IME yang terdiri dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bogor Tahun 2014, Data Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) Kota Bogor Tahun 2014, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bogor Tahun 2014 dan Data Inflasi atau Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Bogor Tahun 2015. Secara lebih rinci, publikasi data IME tersebut disampaikan sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bogor Tahun 2014
2. Data Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) Kota Bogor Tahun 2014
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bogor Tahun 2014

## 25) **Urusan Kearsipan**

Penanganan Urusan Kearsipan dilaksanakan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah (KAPD) Kota Bogor yang dijabarkan melalui dua program yaitu Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan serta Program Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah. Kegiatan yang diselenggarakan untuk mewujudkan program-program tersebut adalah:

### a. **Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan. Perbaikan sistem administrasi kearsipan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan diantaranya :

- 1) Pengadaan Sarana Kearsipan
- 2) Pembinaan dan Supervisi Kearsipan Berbasis Teknologi Informatika (TI)

### b. **Program Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah**

Tujuan dari pelaksanaan program ini adalah peningkatan jumlah unit kerja yang mengintegrasikan arsipnya ke KAPD agar dapat diselamatkan dan dilestarikan. Upaya penyelamatan dan pelestarian dokumen atau arsip dilakukan melalui beberapa kegiatan di antaranya adalah :

- 1) Penyusutan, Perawatan dan Pemanfaatan Arsip

## 26) **Urusan Perpustakaan**

Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah (KAPD) Kota Bogor yang dijabarkan melalui Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan serta Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan minat baca dan jumlah bahan bacaan untuk masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**

- 1) Sosialisasi Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan
- 2) Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Daerah
- 3) Pengembangan Minat Baca
- 4) Pemeliharaan Peralatan dan Sistem Jaringan Informasi Perpustakaan

**b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan**

Dalam rangka mewujudkan minat baca masyarakat, salah satu hal yang menjadi faktor penunjang adalah peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan. Sarana dan Prasarana memiliki peran strategis dalam mendukung kualitas layanan yang dibutuhkan para pemustaka. Sarana dan prasarana yang representatif dan nyaman akan membuat para pemustaka untuk selalu tertarik dan merasa bahwa di perpustakaanlah kebutuhan pengembangan diri dapat terpenuhi. Dalam pelaksanaan RPJMD tahun 2015, program ini didukung oleh kegiatan pembuatan DED pembangunan perpustakaan bertaraf internasional. Namun, tidak dapat dilaksanakan, hal ini disebabkan oleh faktor teknis maupun faktor non teknis. Diantaranya adalah ketersediaan lahan yang diusulkan tidak representatif, sehingga direncanakan pada tahun 2017 akan dilaksanakan pengadaan lahan, pembuatan DED dan pembangunan perpustakaan bertaraf internasional. Perlu juga diperhatikan mengenai mekanisme dan syarat penilaian perpustakaan bertaraf internasional, sehingga pada waktunya nanti keberadaan perpustakaan bertaraf internasional di Kota Bogor diakui oleh masyarakat dunia dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Bogor.

### **2.5.1.2 Urusan Pilihan**

**1) Urusan Perikanan**

Urusan perikanan ditangani oleh Bidang Perikanan pada Dinas Pertanian Kota Bogor melalui Program Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perikanan, dan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Peternakan dan Perikanan.

**a. Program Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perikanan.**

Untuk tahun 2015 program ini mempunyai target capaian, produksi ikan konsumsi bisa mencapai 4.897 ton, produksi benih ikan di Balai Benih Ikan (BBI) mencapai 250.000 ekor dan produksi ikan hias mencapai 16.000.000 ekor. Target program Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perikanan telah diupayakan dicapai dengan melaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut :

- 1) Optimalisasi Potensi Sumberdaya Perikanan
- 2) Dana Pendamping Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Budidaya dan Pengolahan
- 3) Optimalisasi Balai Benih Ikan
- 4) Peningkatan Produksi Ikan Hias Unggulan Kota Bogor
- 5) Pemagaran dan Operasional Holding Ground Ikan Hias di Terminal Agribisnis Rancamaya

**b. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Peternakan dan Perikanan**

Program ini mempunyai target pencapaian berupa jumlah produk pertanian yang sudah dikemas. Target tersebut berupa jumlah produk olahan hasil perikanan yang dibina dinas sebanyak 10 produk, jumlah komoditas perikanan yang dipasarkan di depo ikan hias sebanyak 22 produk dan jumlah komoditas perikanan yang dipasarkan di Depo Pemasaran Hasil Perikanan (fishmart) sebanyak 20 produk.

Untuk mencapai target Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Peternakan dan Perikanan tersebut, telah dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyediaan Sarana Pengolahan Hasil Perikanan
- 2) Peningkatan Mutu Hasil Perikanan
- 3) Peningkatan Produksi Pindang Kota Bogor
- 4) Jaringan Pemasaran dan Jejaring Bisnis Hasil Perikanan
- 5) Penguatan Kelembagaan Kelompok Perikanan

**2) Urusan Pertanian**

Penanganan urusan pertanian ditangani oleh Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian Kota Bogor. Dilaksanakan melalui Program Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Peternakan dan Perikanan, dan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dan Ikan serta Penyediaan pangan Hewani Yang Aman Sehat Utuh dan Halal.

**a. Program Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perikanan**

Program Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perikanan dijabarkan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Naskah Akademis Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan..
- 2) Pengembangan Penangkaran Tanaman Hortikultura
- 3) Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
- 4) Pengembangan Kultur Jaringan
- 5) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Rumah Potong Hewan (RPH)
- 6) Optimalisasi Rumah Potong Hewan
- 7) Peningkatan Pelayanan Produksi Peternakan
- 8) Dana Pendamping Pengembangan Usaha Agribisnis Perkotaan (PUAP)
- 9) Optimalisasi Sumberdaya Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura)
- 10) Kajian Analisa Kebutuhan dan Optimalisasi Lahan Pertanian Kota.

**b. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan serta Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal**

Program ini mempunyai indikator dan target yang harus dicapai pada Tahun 2015 diantaranya adalah Jumlah hewan yang divaksin dengan target 202.800 ekor, jumlah obat untuk biosecurity dengan target 544 liter, luas pengendalian hama dan penyakit tanaman dengan target 70 Ha, dan sampel pemeriksaan

produk pangan dengan target 160 sampel. Kegiatan yang mendukung program ini adalah:

- 1) Peningkatan Pelayanan Pengendalian Penyakit Hewan Menular Zoonosis
- 2) Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman
- 3) Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner Terhadap Peningkatan Mutu Pangan Asal Hewan (PAH)

**c. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Peternakan dan Perikanan**

Program ini mempunyai beberapa indikator dan target yang harus dicapai pada tahun 2015, yaitu jumlah produk olahan hasil pertanian yang dibina dinas sebanyak 15 produk, jumlah produk olahan hasil peternakan yang dibina dinas sebanyak 7 produk, jumlah komoditas yang dipasarkan di STA sebanyak 6 produk, jumlah produk yang dipasarkan di pasar tani sebanyak 15 produk. Untuk mencapai target tersebut telah dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil dan Pemasaran Tanaman Pangan Hortikultura
- 2) Pengembangan Produk Halal Asal Hewan
- 3) Optimalisasi STA Rancamaya

**3) Urusan Pariwisata**

Urusan Pariwisata ditangani oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Bogor melalui :

a. Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata Daerah, yang dijabarkan melalui kegiatan :

- 1) Promosi Pariwisata Kota Bogor  
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk :
  1. Pameran Musrembang
  2. Pameran dan Roadshow a land of Harmoni 2015.
  3. Istana Untuk Rakyat (ISTURA),
  4. Pameran Bogor Expo 2015.
  5. Pameran Indonesia City Expo 2015
  6. Kegiatan Pasanggih Mojang dan Jajaka tingkat Kota Bogor
  7. Kegiatan pasanggih Mojang dan Jajaka tingkat Provinsi Jawa Barat
  8. Kegiatan Pameran Bali Investment Tourism dan Trade Expo 2015
- 2) Pembinaan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) Usaha Jasa Sarana Pariwisata,  
Bagian seksi Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata telah melaksanakan kegiatan-kegiatannya, meliputi :
  1. Memperkenalkan Aplikasi *Cloud Bogor City eTourism* (BceT),
  2. Sosialisasi Perijinan Kepariwisata dan Penataan Ruang Publik sesuai UU No 24 tahun 2009 Kota Bogor 2015
- 3) Pengembangan Pemasaran Pariwisata Penunjang Pariwisata Daerah  
Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
  1. Pembentukan Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR) di 6 (enam) Kecamatan.
  2. Pembangunan Gedung Destinasi Wisata Kuliner

- 4) Pengembangan Ekonomi Kreatif
  1. Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya
  2. Kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis Media, Desain dan IPTEK (EKMDI)
  3. Sosialisasi Ekonomi Kreatif
  4. Kegiatan sosialisasi ekonomi kreatif dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2015 bertempat di Wisma Bogor Permai Jl. Sawojajar Bogor.
  5. Fasilitasi Pameran Hasil Ekonomi Kreatif

#### 4) **Urusan Perindustrian**

Pelaksanaan urusan perindustrian sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2015-2019 dilaksanakan melalui Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah serta Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya jumlah Industri kecil menengah yang produktif, pelatihan kewirausahaan industri kreatif dan Jumlah IKM yang menerapkan teknologi.

##### **a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah**

Program ini dilaksanakan dengan cara memberikan fasilitasi dan pembinaan bagi pengembangan IKM sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program ini dijabarkan melalui kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelatihan Manajemen dan Desain Kemasan
- 2) Peningkatan Daya Saing Produk IKM
- 3) Pemasarakatan dan Penerapan Gugus Kendali Mutu (GKM)
 

Gugus Kendali Mutu (GKM) bertujuan untuk :

  1. Membudayakan GKM di kalangan Industri Kecil dan Menengah;
  2. Memberikan dan menumbuhkan motivasi dalam lingkungan Industri Kecil dan Menengah (pimpinan dan karyawan) agar secara kontinyu melaksanakan penerapan GKM;
  3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan produktifitas usahanya;
  4. Peningkatan mutu dan peningkatan nilai tambah;
  5. Peningkatan kemampuan menyelesaikan pekerjaan sesuai target;
  6. Peningkatan moral kerja dengan mengubah tingkah laku;
  7. Peningkatan keterampilan dan keselamatan kerja;
  8. Peningkatan kepuasan kerja.
- 4) Pengawasan, Monitoring dan Pemetaan IKM
 

Monitoring dan Pemetaan IKM dilakukan untuk menghasilkan suatu sistem penyusunan database dan penyajian data peta potensi IKM melalui media website dan aplikasi perangkat seluler berbasis android, Sasarannya adalah :

  1. Pengidentifikasian metode pengumpulan data digital;
  2. Perancangan aplikasi mobile berbasis android;
  3. Perancangan antarmuka website pengguna;

4. Perancangan antarmuka website administrator;
  5. Penyajian data dalam bentuk peta dan tabulasi database.
- 5) Pelatihan Standar Nasional Indonesia  
Kegiatan ini sebagai upaya dalam meningkatkan mutu produk IKM dan meningkatkan penghasilan IKM serta memberikan perlindungan bagi konsumen, pelaku usaha, masyarakat dalam aspek K3L (kesehatan, keselamatan dan keamanan serta kelestarian lingkungan hidup)

**a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**

Program ini dilaksanakan guna meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dan meningkatkan rasa aman dalam kegiatan perdagangan. Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya pengetahuan konsumen akan hak-haknya dan terjaminnya kualitas barang-barang yang diperdagangkan. Program ini dijabarkan melalui kegiatan sebagai berikut:

- 1) Sistem Jaminan Halal Bagi IKM
- 2) Penerapan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi IKM

**b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah**

Program ini dilaksanakan dengan cara memberikan pembinaan bagi IKM/UKM. Hasil yang diharapkan adalah peningkatan pembinaan kepada IKM/UKM melalui sosialisasi dan pelatihan bagi IKM/UKM. Program ini dijabarkan melalui kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pelatihan Produk Alas Kaki  
Berlakunya Masyarakat Ekonomian Asean (MEA) membuat sejumlah pelaku industri merumuskan berbagai strategi. Salah satu yang masuk dalam katagori defisit adalah industri alas kaki karena industri alas kaki merupakan industri padat karya atau industri yang menyerap banyak tenaga kerja. Upaya untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui pelatihan IKM Produk Alas Kaki dengan jumlah peserta 40 IKM Kota Bogor.

**c. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri**

Program ini dilaksanakan dengan cara memberikan pendampingan dan pembinaan bagi IKM. Hasil yang diharapkan adalah peningkatan jumlah IKM yang menerapkan teknologi di dalam proses produksi. Program ini dijabarkan melalui Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penerapan dan Pengembangan Teknologi  
Peningkatan kualitas produk yang dihasilkan dengan menerapkan teknologi yang tepat sehingga sesuai dengan standar mutu produk akan meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan IKM.

**5) Urusan Perdagangan**

Penanganan urusan perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor. Pada tahun 2015, urusan ini dijabarkan melalui Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan serta Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor yang terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut :

**a. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri**

Program ini bertujuan membangun struktur perdagangan dalam negeri yang kokoh, dengan sasaran mendorong terciptanya mekanisme pasar, persaingan sehat serta kenyamanan pasar. Program ini dilaksanakan melalui 2 indikator, yaitu Jumlah Kerjasama Dengan Jaringan dan Jumlah Kegiatan Survey Pasar, yang dijabarkan secara lebih rinci sebagai berikut:

- 1) Promosi Perdagangan Dalam Negeri
- 2) Pembinaan Pelaku Usaha Melalui Kegiatan Pelatihan/Sosialisasi/ Temu Usaha

**b. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dilaksanakan melalui 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu Jumlah Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Yang Dilakukan di Pasaran, Sosialisasi Perlindungan Konsumen, dan Jumlah Kasus yang Diselesaikan. Secara lebih rinci dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Pengendalian dan Pengawasan Distribusi Barang Beredar dan Pengujian Mutu Barang.
- 2) Pengawasan Rokok yang menggunakan Cukai Ilegal / Pita Cukai Palsu
- 3) Sosialisasi Perlindungan Konsumen
- 4) Penyelesaian Sengketa Konsumen
- 5) Rekrutmen Anggota BPSK Periode 2015-2020
- 6) Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang UTTP
- 7) Pendataan, Pengujian dan Pembinaan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)
- 8) Pengawasan dan Pembinaan Kemetrollogian
- 9) Pendataan dan Ukur Ulang SPBU, Gas LPG dan Ukur Panjang

**c. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor**

Program ini ditujukan untuk peningkatan ekspor non migas di Kota Bogor melalui peningkatan dan perluasan akses pasar luar negeri, pengembangan komoditi ekspor, pengendalian impor, penerapan sistem manajemen mutu produk ekspor, pengujian dan sertifikasi mutu komoditi ekspor, fasilitasi pengembangan pembiayaan ekspor, pengembangan koridor ekonomi pendukung ekspor dan investasi, peningkatan koordinasi dan sinergitas program bidang perdagangan luar negeri dan untuk mendukung upaya peningkatan daya saing global produk Indonesia, khususnya produk Kota Bogor serta meningkatkan peranan ekspor dalam memacu pertumbuhan ekonomi Kota Bogor. Indikator kinerja program ini adalah meningkatnya jumlah produk berkualitas ekspor. Dalam pelaksanaannya, program ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Profil Potensi Ekspor Impor Kota Bogor
- 2) Peningkatan dan Perluasan Akses Pasar Luar Negeri.
- 3) Peningkatan Kemampuan Pelaku Usaha (Ekspotir dan Calon Ekspotir) dan Importir
- 4) Temu Usaha Bisnis Antara Produsen Dengan Ekspotir/ Calon Ekspotir

## 6) **Urusan Transmigrasi**

Penanganan urusan transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan Transmigrasi Kota Bogor. Dalam pelaksanaan urusan ini perlunya dilaksanakan kerja sama antar daerah agar pemerintah daerah asal dan penempatan bisa saling mengawasi. Daerah asal berkewajiban untuk memberi pelatihan kepada calon transmigran dan memberi pendampingan melalui APBD. Adapun kewajiban daerah penempatan adalah menyiapkan lahan produktif dan permukiman. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut dilaksanakan Program Pembinaan dan Penempatan Transmigrasi dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

### **a. Program Pembinaan dan Penempatan Transmigrasi**

- 1) **Sosialisasi dan Rekrutmen serta Pembekalan Calon Transmigran**  
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan minat dan animo masyarakat untuk bertransmigrasi melalui Sosialisasi dan Rekrutmen serta Pembekalan calon Transmigrasi Sosialisasi Program Transmigrasi di 30 (Tiga Puluh ) Kelurahan di Kota Bogor
- 2) **Penjajakan, Pendampingan Ke Lokasi Transmigrasi**  
Kegiatan ini dilaksanakan pada Bulan Januari, Februari dan Desember Tahun 2015. Untuk Kegiatan Penjajakan dilaksanakan ke dua Lokasi yaitu 1. Ke Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Tanjung Selapan Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Provins Sumatera Selatan 2. Ke Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Tanjung Satai Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat.  
Untuk Kegiatan Pendampingan ke Lokasi Transmigrasi dilaksanakan pada bulan Desember 2015 ke Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Tanjung Satai Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat.

### **2.5.1.3 Prioritas Pembangunan Tahun 2015**

#### **1. Penataan Transportasi dan Angkutan Umum.**

Terdapat stigma negatif yang melekat untuk Kota Bogor selama ini yaitu “kota sejuta angkot“. Stigma ini melekat bersamaan dengan berbagai permasalahan transportasi yang muncul lainnya seperti kemacetan dan isu lainnya seperti transportasi ramah lingkungan. Bidang prioritas ini akan memuat program-program untuk mengatasi segala permasalahan tersebut sekaligus membangun fondasi bagi pengembangan transportasi kota yang berkelanjutan di masa mendatang. Strategi-strategi yang digunakan diantaranya adalah rasionalisasi jumlah dan ukuran angkutan kota, memaknai transportasi sebagai “pergerakan, bukan perpindahan“ orang melalui jalur sepeda dan pedestrian, serta meminimalisasi pergerakan kendaraan melalui penyediaan fasilitas parkir yang tersentralisasi. Penataan transportasi dan angkutan umum akan diwujudkan dengan lima program yang akan dilaksanakan pada kurun waktu RPJMD 2015-2019, sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelayanan Angkutan;
2. Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Jasa Transportasi;
3. Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi;
4. Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi;
5. Pengembangan Transportasi Ramah Lingkungan

Adapun pencapaian kinerja pembangunan dalam penanganan Penataan Transportasi dan Angkutan Umum Kota Bogor Tahun 2015 adalah sebagaimana tabel 2.12 berikut:



**Tabel 2.12**  
**Target Capaian Kinerja dan Realisasi Pembangunan Penataan**  
**Transportasi dan Angkutan Umum Kota Bogor Tahun 2015**

Program	Indikator Program	Target Capaian Kinerja 2015	Realisasi Tahun 2015	OPD
Peningkatan Pelayanan Angkutan;	Operasional (Jumlah) Koridor BTS Trans Pakuan	4	3	Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
	Jumlah Trayek Feeder	10	6	
	Penurunan Jumlah Becak	1.300/425	325	
	Jumlah koridor bus sekolah	0	-	
	Angkutan wisata dalam kota (paket)	0	-	
Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Jasa Transportasi	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Teknis	29	19	Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
	Luas lahan yang di Bebaskan (Hektar)	8,25	-	
	Jumlah Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana & Sarana Perhubungan	12	9	
Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Jumlah Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Terpasang	8	3	Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
	Jumlah Pelaksanaan Operasi Penertiban Gabungan	108	108	
Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi	Jumlah Peserta Penyegaran Petugas Operasional LLAJ	100	100	Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
	Jumlah Peserta Sosialisasi	900	5.050	
Pengembangan Transportasi Ramah Lingkungan	Pelaksanaan Uji Petik Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor	12	12	Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
	Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	21.925	22.925	
	Jumlah Kendaraan Umum Berbahan Bakar Alternatif	200	250	

**2. Penataan Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Kota.**

Menjaga karakter Kota Bogor sebagai kota yang hijau dan penuh dengan taman menjadi tantangan tersendiri ketika menghadapi permasalahan soal sampah. Kompleksitas pengelolaan sampah selalu berkorelasi positif dengan jumlah penduduk, dan dengan jumlah penduduk yang sudah menembus angka satu juta jiwa (dan ini yang menjadi definisi kawasan metropolitan), maka kompleksitasnya membutuhkan penanganan yang tidak hanya sekadar *business as usual*. Bidang

prioritas ini menyoasar pengelolaan sampah secara holistik, mulai dari level bangkitan timbulan (penghasil sampah baik rumah tangga maupun non rumah tangga), pengangkutan, penampungan, pengolahan, hingga pembuangan. Pengelolaan ini dimulai dari level pertama, sekaligus menjadi tantangan terbesar, yaitu bagaimana timbulan sampah dikurangi sejak dari tingkat rumah tangga. Terwujudnya pelayanan persampahan dan kebersihan kota didukung oleh empat program yakni:

1. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
2. Perbaikan, Optimalisasi, Operasional dan Pemeliharaan Fungsi TPA;
3. Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R;
4. Pengembangan Lingkungan Sehat.

Adapun pencapaian kinerja pembangunan dalam penanganan Penataan Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Kota Kota Bogor Tahun 2015 adalah sebagaimana tabel 2.13 berikut :

**Tabel 2.13**  
**Target Capaian Kinerja dan Realisasi Pembangunan Penataan Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Kota Bogor Tahun 2015**

Program	Indikator Program	Target Capaian Kinerja 2015	Realisasi Tahun 2015	OPD
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Volume Sampah Terangkut (persen)	71,37	72,20	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
	Jumlah kelompok masyarakat (Pokmas) pengelola sampah berbasis 3R (Pokmas per kelurahan)	2	8	Kecamatan
Perbaikan, Optimalisasi, Operasional dan Pemeliharaan Fungsi TPA;	Volume sampah yang diolah di TPA Galuga (m <sup>3</sup> )	1.791	1.928	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
	Persentase volume sampah yang diolah di TPA (%)	98,16	107,6	
	Jenis pengolahan/pemrosesan akhir sampah	12	12	
	Jumlah fasilitas pengolahan/pemrosesan akhir sampah	6	6	
	Kapasitas pengolahan (m <sup>3</sup> /hari)	2.587	2.872	
	Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R	Reduksi Sampah (%)	3,5	3,20
Jumlah TPS 3R di daerah yang belum terlayani oleh angkutan (lokasi)		14	25	
Jumlah Bank Sampah (lokasi)		25	56	

	Pengembangan kemitraan (kelompok)	5	5	
	Terpenuhinya target retribusi (%)	100	100	
	Persentase pengelolaan sampah di tingkat rumahtangga	14	13,8	
Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase akses jamban keluarga(%)	80,5	96,5	Dinas Kesehatan
	Persentase akses air bersih (%)	89	92,8	
	Persentase akses SPAL yang memenuhi syarat (%)	29,5	71,7	
	Persentase akses pengelolaan sampah (%)	68,7	77	
	Persentase kelurahan STBM (%)	40	88,235	
	Persentase kelurahan ODF (%)	1	0	
	Persentase air minum yang memenuhi syarat(%)	89	98	
	Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas dengan RTH (%)	20	10	
	Persentase Industri dengan sanitasi layak(%)	25	80	
	Persentase Peskontrol yang memenuhi syarat(%)	55	33,3	

### 3. Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Sejarah krisis moneter di Indonesia menunjukkan bahwa sektor non formal seperti pedagang kaki lima adalah sektor dengan daya tahan yang tangguh terhadap segala macam guncangan ekonomi. Sektor ini dapat bertahan dan mampu menjadi penyelamat bagi ratusan ribu, mungkin jutaan, orang yang menggelutinya sebagai profesi dan jauh lebih banyak lagi dari sisi keluarga yang dihidupi.

Di sisi lain, muncul banyak ekkses negatif dari aktivitas Pedagang Kaki Lima yang tidak tertata seperti kemacetan, kekumuhan, terampasnya ruang publik, hingga premanisme. Oleh karenanya, penataan Pedagang Kaki Lima mutlak dilakukan sehingga sebagai aktivitas ekonomi, Pedagang Kaki Lima dapat dipertahankan namun dengan ekkses negatif yang tetap diminimalkan.

Beberapa strategi yang diambil adalah penyediaan lokasi pengganti (melalui relokasi berdasar *zoning regulation* dan revitalisasi pasar), menguatkan kelembagaan Pedagang Kaki Lima sehingga anggotanya yang berprofesi sebagai Pedagang Kaki Lima itu jelas dan terdata, kemudian kampanye hingga strategi terakhir adalah penindakan, baik oleh Satpol PP maupun dukungan bantuan dari TNI/Polri. Dua program yang mendukung penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima antara lain:

1. Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
2. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Adapun pencapaian kinerja pembangunan dalam penanganan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Bogor Tahun 2015 adalah sebagaimana tabel 2.14 berikut :

**Tabel 2.14**  
**Target Capaian Kinerja dan Realisasi Pembangunan Penataan dan**  
**Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Bogor Tahun 2015**

Program	Indikator Program	Target Capaian Kinerja 2015	Realisasi Tahun 2015	OPD
Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Persentase PKL yang terlokasikan berdasarkan zona	100	100	Dinas Koperasi dan UMKM
	Persentase Pedagang Kaki Lima yang direlokasi dan mendapatkan pembinaan (%)	100 (358)	67,88 (243)	
Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Titik rawan PKL yang menjadi titik tertib PKL (titik lokasi)	10	10	Satuan Polisi Pamong Praja
	Anjal yang terjaring	850	581	
	Titik-titik rawan anjal menjadi bebas anjal	2	2	
	Aktivitas penegakan Perda dan ketertiban umum (kali)	420	319	
	Jumlah Linmas (orang)	3.895	3630	
	Kapasitas aparat dan masyarakat dalam pelaksanaan SIMSWAKARSA (aparat)	69	69	
	Penertiban pedagang dan pendatang ilegal (kali)	12	12	

**4. Penataan ruang publik, pedestrian, taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, Bogor adalah kota dengan karakter hijau, sebuah kota di dalam taman. Penataan ruang publik, pedestrian, taman dan Ruang Terbuka Hijau lainnya menjadi penguat akan karakter tersebut, dan dapat menjadi pembeda dengan kota-kota lainnya. Ruang yang disasar khususnya adalah ruang sepanjang sungai (bantaran), sepanjang jalan, aset-aset (baik milik daerah maupun pihak lainnya) yang bisa dioptimalisasi menjadi Ruang Terbuka Hijau, dan ruang privat (pekarangan rumah). Selain itu, mekanisme insentif dan disinsentif juga perlu dikembangkan baik bagi individu maupun institusi yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pelaksanaan prioritas ini. Program yang mendukung terwujudnya penataan ruang publik, pedestrian, taman dan RTH adalah:

- 1) Pembangunan Prasarana Pedestrian dan Pesepeada;
- 2) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Adapun pencapaian kinerja pembangunan dalam penanganan Penataan ruang publik, pedestrian, taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH Kota Bogor Tahun 2015 adalah sebagaimana tabel 2.15 berikut :

**Tabel 2.15**  
**Target Capaian Kinerja dan Realisasi Pembangunan Penataan ruang publik, pedestrian, taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH Kota Bogor Tahun 2015**

Program	Indikator Program	Target Capaian Kinerja 2015	Realisasi Tahun 2015	OPD
Pembangunan Prasarana Pedestrian dan Pesepeda	Panjang prasarana pedestrian yang meningkatkan kapasitasnya (pelebaran prasarana pedestrian) (km)	4.854 Km (5,399 km)	4,045 km (6.375 km) 131,33 %	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
	Panjang prasarana pedestrian jalan utama terbangun (km)	250,62	252,902	
	Jalur sepeda yang dikembangkan (koridor)	0	-	Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas Taman yang memenuhi kriteria ramah anak, lansia dan difabel (m2)	408.328	405.262.7 2	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
	Jumlah taman tematik	2	3	
	Jumlah taman yang dikelola komunitas	2	2	
	Jumlah Hutan Kota yang terbangun (lokasi)	0	-	Badan Pengelola Lingkungan Hidup

**5. Transformasi budaya dan reformasi birokrasi**

Reformasi birokrasi telah menjadi agenda nasional untuk sekian lamanya namun tak kunjung juga memperlihatkan hasil nyatanya. Salah satu penyebab utama dari lambatnya reformasi birokrasi bergulir adalah bahwa segala permasalahan di dalam birokrasi yang hendak direformasi ini bukanlah sekadar permasalahan struktural semata, melainkan sudah menjadi permasalahan budaya/kultur. Soal struktural akan lebih mudah untuk ditangani karena cukup diselesaikan di level kebijakan saja, akan tetapi soal kultural, dengan praktek dan kebiasaan yang telah menurun selama puluhan tahun lamanya, menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, bidang prioritas kelima dari Walikota Kota Bogor adalah “Transformasi budaya dan reformasi birokrasi”, karena birokrasi yang berubah tidak dapat dipisahkan dengan budaya yang bertransformasi.

Pada akhirnya, mengubah budaya ini harus diawali dengan menerapkan sistem yang baik dan mampu memaksa anggota sistemnya untuk berperilaku sebagaimana digariskan. Mengawali pembentukan kebiasaan baru adalah dengan pemaksaan, dan pemaksaan yang elegan (bukan arogan), adalah pemaksaan melalui sebuah sistem.

Pada tataran sistem, pemerintah pusat telah menyiapkan berbagai instrumen kebijakan dengan sedemikian lengkapnya mencakup *Grand Design*, *Road Map* dan berbagai pedoman bagi daerah untuk melaksanakan reformasi birokrasi. Kota Bogor bertekad mendukung kebijakan nasional ini dengan tidak hanya melaksanakannya saja, tetapi juga melakukan percepatan. Sebagai salah satu katalisator untuk percepatan ini, hendak digagas kerja sama antara Kota Bogor dengan

Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, kebijakan-kebijakan lainnya yang akan diambil adalah penempatan jabatan secara terbuka dengan kualifikasi yang terstandarisasi, pengembangan mekanisme insentif sebagai motivasi ekstra bagi aparatur sipil negara, meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah sehingga memungkinkan kontrol sosial, serta penerapan *e-government* untuk meningkatkan pelayanan publik, transparansi, dan kepastian.

Sebagai bagian dari reformasi birokrasi ini, pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan senantiasa mengedepankan prinsip efisiensi dan realokasi anggaran. Efisiensi anggaran ialah penghematan anggaran pada pos-pos yang anggarannya masih memungkinkan untuk dikurangi tanpa mengorbankan *output* atau *outcomes*, dan dana hasil efisiensi itu kemudian direalokasikan untuk pos-pos lain yang dibutuhkan bagi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Program-programnya adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
- 2) Penataan Tata Laksana;
- 3) Penataan dan Penguatan Organisasi;
- 4) Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- 5) Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan;
- 6) Pembinaan dan Penataan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan;
- 7) Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
- 8) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
- 9) Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa;
- 10) Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
- 11) Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12) Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah;
- 13) Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Adapun pencapaian kinerja pembangunan dalam penanganan Transformasi budaya dan reformasi birokrasi Kota Bogor Tahun 2015 adalah sebagaimana tabel 2.16 berikut :

**Tabel 2.16**  
**Target Capaian Kinerja dan Realisasi Pembangunan Transformasi budaya dan reformasi birokrasi Kota Bogor Tahun 2015**

Program	Indikator Program	Target Capaian Kinerja 2015	Realisasi Tahun 2015	OPD
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;	Indeks kepuasan masyarakat pada seluruh SKPD yang memberikan pelayanan publik	2,65	2,65	(Bag. Organisasi)
Penataan Tata Laksana;	Persentase SKPD yang menetapkan SOP pelayanan publik (%)	60	60	(Bag. Organisasi)
Penataan dan Penguatan Organisasi;	Organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (%)	100	100	
Penguatan Akuntabilitas Kinerja;	Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	C	CC	(Bag. Organisasi)
Pengembangan	Tingkat pelaksanaan	100	100	

Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan;	urusan yang dilimpahkan kepada kecamatan dan kelurahan (%)			
Pembinaan dan Penataan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan;	Tingkat kemampuan dan pengetahuan aparatur kecamatan kelurahan (%)	Meningkat	Meningkat	Kecamatan
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;	Pengisian jabatan yang memenuhi standar kompetensi	0,6	0,6	BKPP
	Persentase pegawai yang terlayani administrasi kepegawaian secara lengkap (%)	95	95	
	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi dasar sesuai kebutuhan (%)	70	70	
	Gedung pendidikan dan pelatihan	0	65	
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;	Pemeringkatan jabatan untuk setiap jabatan pada OPD (%)	50	50	(Bag. Organisasi)
	Pengaturan jabatan fungsional dalam rangka pengembangan karir dan profesionalisme aparatur (Kepwal)	1	1	
Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa;	SKPD yang menyediakan informasi publik sesuai Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (%)	20	80	Bag. Humas
	Jumlah regulasi tentang implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Perwali)	5	1	
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;	Ketaatan SKPD terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku (%)	20	20	Inspektorat
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;	Dokumen keuangan (APBD dan DPA SKPD), laporan keuangan, dan pelayanan keuangan yang dihasilkan secara tepat waktu (%)	100	100	BPKAD
	Tingkat tertib administrasi pengelolaan keuangan (ketepatan waktu penyampaian dokumen laporan keuangan daerah) (%)	100	100	(Bag. Keuangan)



	Jumlah Objek Pajak (OP) PBB yang telah dimutakhirkan (OP)	30.000	25.513	Dinas Pendapatan Daerah/Kecamatan
Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah;	Pelaporan, inventarisasi, pemeliharaan, dan pengamanan Barang Milik Daerah (%)	100	100	BPKAD
Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Pengaduan masyarakat yang ditangani (%)	100	100	

## 6. **Penanggulangan Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan masalah global yang dihadapi setiap daerah di negeri ini. Penanggulangan kemiskinan pun merupakan agenda penting yang selalu menjadi perhatian Kepala Negara dan Kepala Daerah dengan targetnya untuk terus diturunkan. Lahirnya Perpres Nomor 1 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 42 Tahun 2010 mengamanatkan daerah untuk menyusun dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagai komitmen pemerintah untuk menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai dasar pembangunan. Kemiskinan merupakan permasalahan lintas sektor yang dalam penanggulangannya memerlukan kerja keras dari berbagai pihak, sehingga strategi penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan dengan menyelaraskan berbagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, dan para pihak yang peduli. Data yang dirilis oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada 2011 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Kota Bogor pada tahun 2010 adalah sebesar 9,47%. Meskipun tingkat ini lebih baik daripada tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat yang sebesar 11,27%, tetap upaya penanggulangan kemiskinan harus terus dilakukan dan ditingkatkan demi harkat, martabat, dan kesejahteraan masyarakat.

Hal yang patut diperhatikan adalah bahwa permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi. Permasalahan ini tidak hanya menyangkut soal pendapatan rumah tangga atau pekerjaan saja, tetapi juga mengenai akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, pangan, air bersih, hingga sanitasi. Oleh karena itu, kemiskinan bukan lagi kondisi kekurangan kebutuhan dasar saja, melainkan merupakan kondisi tidak tercapainya suatu standar kehidupan yang dianggap layak oleh masyarakat. Strategi penanggulangan kemiskinan Kota Bogor difokuskan pada pemenuhan hak dasar dengan sasaran pada tiga kategori miskin (miskin, hampir miskin, dan rentan miskin). Terdapat 20 program pemerintah Kota Bogor dalam RPJMD yang mendukung pelaksanaan penanggulangan kemiskinan ini yaitu:

- 1) Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;
- 2) Upaya Kesehatan Masyarakat;
- 3) Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;



- 4) Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata;
- 5) Perbaikan Gizi Masyarakat;
- 6) Peningkatan Ketahanan Pangan;
- 7) Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak;
- 8) Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;
- 9) Pendidikan Menengah;
- 10) Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- 11) Peningkatan Kesempatan Kerja;
- 12) Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;
- 13) Lingkungan Sehat Perumahan;
- 14) Pengembangan Lingkungan Sehat;
- 15) Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya;
- 16) Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
- 17) Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, psk, narkoba dan penyakit sosial lainnya);
- 18) Pembinaan Anak Terlantar;
- 19) Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
- 20) Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Adapun pencapaian kinerja pembangunan dalam penanganan kemiskinan di Kota Bogor Tahun 2015 adalah sebagaimana tabel 2.17 berikut :

**Tabel 2.17**  
**Target Capaian Kinerja Pembangunan Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Bogor Tahun 2015**

Program	Indikator Program	Target Capaian Kinerja 2015	Realisasi Tahun 2015	OPD
1) Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;	Persentase Jumlah kunjungan masyarakat miskin di sarana kesehatan dasar dan rujukan (%)	100	100	DKK
	Persentase integrasi jamkesda ke JKN (jumlah peserta Jamkesda yang diintegrasikan ke BPJS dibagi jumlah peserta Jamkesda)(%)	30%	75,3	
2) Upaya Kesehatan Masyarakat;	Jumlah kunjungan masyarakat di sarana kesehatan dasar	1.330.000	1.434.463	
	Persentase kunjungan remaja yang melakukan konseling(%)	5	8,4	
	Persentase sekolah yang memiliki Perconselor(%)	50	97,3	
	Persentase sekolah yang memiliki guru terlatih PKPR(%)	93	97,3	
	Persentase sekolah memiliki Dokcil(%)	55	57,3	
	Persentase kasus KTA yang ditangani(%)	13	13	

	Persentase penjangkauan kesehatan siswa(%)	100	100	
	Persentase anemia remaja putri anak sekolah (SMP & SMA kelas 1)(%)	9	8,7	
	Persentase puskesmas yang melaksanakan PTM terintegrasi(%)	80	100	
	Persentase posbindu yang melaksanakan PTM terintegrasi(%)	35	$242/391=62\%$	
	Persentase kunjungan rawat jalan gigi dalam wilayah puskesmas yang tertangani (%)	100	100	
	Persentase keluarga rawan kesehatan yang dibina(%)	100	100	
	Persentase keluarga mandiri(%)	83	83	
	Persentase POS UKK yang dibina(%)	7	7	
	Persentase penanganan pasien gangguan kesehatan jiwa di puskesmas(%)	85	85	
	Persentase puskesmas siaga sehat jiwa(%)	20,80	20,80	
	Persentase penanganan kasus gangguan refraksi pada anak sekolah(%)	70	70	
	Jumlah operasi katarak pada masyarakat miskin	160	154	
	Persentase Pengobat tradisional yang dibina(%)	50	50	
3) Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;	Jumlah puskesmas/pustu yang terbangun	56	3	
	Jumlah Puskesmas perawatan	4	4	
	Tersedianya Sistem informasi rujukan/kesehatan	0	1	
	Sarana Kesehatan pemerintah dengan sistem pengelolaan keuangan BLUD(%)	20	-	
	Sarana kesehatan swasta yang dibina(%)	71	60	
4) Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah	Rumah Sakit Umum Daerah	1	1	RSUD/ DKK
	Persentase Perawatan per tempat tidur(%)	55	68,89	
	Persentase Jumlah tempat tidur Kelas III RS Pemerintah(%)	30	40,09	
	Cakupan pelayanan	100	100	

Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata;	kesehatan untuk BPJS(%)			
	Persentase Jumlah RS dengan proporsi 25% ruang tidur bagi kelas III(%)	25		
5) Perbaikan Gizi Masyarakat;	Persentase Balita gizi Buruk(%)	0,35	0,09	DKK
	Persentase Balita pendek (%)	9,3	3,42	
	Persentase cakupan ASI Eksklusif(%)	77	107,4	
	Persentase Balita mendapat kapsul Vitamin A(%)	91	70,4	
	Persentase Balita yang ditimbang(%)	80	94,74	
	Persentase Remaja Putri Mendapat Fe(%)	15	30,86	
	Persentase Ibu hamil anemia(%)	19	7.08	
6) Peningkatan Ketahanan Pangan;	Skor Pola Pangan Harapan (%)	90		KKP
	Stabilitas harga dan pasokan pangan (%)	100	100	
7) Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak;	Persentase pelayanan ibu hamil (K4)(%)	96	96,5	DKK
	Persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan(%)	92	92,8	
	Persentase Komplikasi ibu bersalin yang ditangani (%)	76	71,7	
8) Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;	Rasio Guru dengan Siswa SD/MI	1	1 :33	Disdik
	Rasio Murid dengan Rombel SD/MI	1:26	1 :32	
	Jumlah sekolah yang melayani pendidikan inklusif SD	1:32	1 :5	
	Persentase Sekolah yang memiliki Perpustakaan SD/MI(%)	7	65 %	
	Jumlah siswa SD/ MI yang menerima bantuan BOS	70	94	
	Persentase ruang kelas SD/MI yang memadai(%)	79	96	
	Rasio Murid dengan Rombel SMP/MTs	1:32	1:33	
	Persentase Sekolah yang memiliki Perpustakaan SMP/MTs(%)	70	86	

	Persentase Jumlah ruang kelas SMP/MTs yang memadai (%)	88	96	
	Jumlah SMP yang mengadakan Kelompok Ilmiah Remaja (KIR)	5	5	
9) Pendidikan Menengah;	Rasio Murid dengan Rombel SMA/MA/SMK	1:32	1:31	Disdik
	Persentase Sekolah yang memiliki Perpustakaan SMA/SMK/MA(%)	68	70	
	Jumlah jam efektif pembelajaran MULOK tingkat SMA/MA/SMK (jam)	4	4	
	Jumlah siswa SMAN/SMKN yang menerima bantuan BOS	15.147	17.177	
	Persentase ruang kelas SMA/SMK yang memadai(%)	94	95	
	Jumlah SMA/SMK yang mengadakan Kelompok Ilmiah Remaja (KIR)	6	10	
10) Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;	Jumlah pencari kerja yang dilatih di BLK	128	96	Disnaker sos
	Jumlah pencari kerja yang magang di perusahaan	50	35	
	Jumlah Keluarga Miskin yang dialih	105	120	
	Persentase Lembaga Latihan Swasta (LLS) yang dibina (%)	100	100	
	Jumlah Balai latihan kerja	1	1	
11) Peningkatan Kesempatan Kerja;	Jumlah penyerapan tenaga kerja	1.347	1.069	Disnaker sos
	Jumlah wirausaha baru	253		
	Persen pencari kerja yang dilatih di BLK yang terserap di pasar kerja	27	30	
12) Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;	Jumlah pekerja anak	100	25	Disnaker sos
	Upah Minimum Kota sesuai Kriteria Hidup Layak (Rp)	2.493.941	2.711.000 242	
	Jumlah Angka Kecelakaan Kerja	333	242	
13) Lingkungan Sehat Perumahan;	Peningkatan Jumlah Rumah layak huni (unit)	272		Diwasbangkim
	Pengurangan Jumlah titik lokasi kawasan kumuh (titik)	3	3 (mulyaharja, Cimahpar, Pasirjaya)	

	Terpeliharanya jalan lingkungan dalam kondisi baik (m2)	100.000	206.520,03 m	
	Berkurangnya lokasi rawan longsor di lingkungan permukiman (titik)	120	254 titik +14 Titik Pascabencana	
	Peningkatan Panjang saluran pembuangan air hujan perumahan (m2)	20	16.327,72	
	Jumlah Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) yang dibangun	6	19 unit	
	Peningkatan jumlah hunian Rusunawa/Rusunami (unit)	518	198 unit	
	Cakupan rumah tangga yang dilayani Sanimas (SR)	6.200	600 SR	
14) Pengembangan Lingkungan Sehat;	Persentase akses jamban keluarga(%)	80,5	83,5	DKK
	Persentase akses air bersih (%)	89	99	
	Persentase akses SPAL yang memenuhi syarat (%)	29,5	30	
	Persentase akses pengelolaan sampah (%)	68,7	77	
	Persentase kelurahan STBM (%)	40	88,235	
	Persentase kelurahan ODF (%)	1	0	
	Persentase air minum yang memenuhi syarat(%)	89	98	
	Persentase Puskesmas dengan RTH (%)	20	10	
	Persentase Industri dengan sanitasi layak(%)	25	80	
	Persentase Peskontrol yang memenuhi syarat(%)	55	33,3	
15) Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya;	Domunen Profil Bidang Sosial	1	0	Dinsosnaker
	Jumlah operator, Pendamping dan Rumah Tangga Sangat Miskin(RTSM)/KSM Program Keluarga Harapan (PKH) yang dibina	10.419	8.999	
	Rumah Tangga Sangat Miskin(RTSM)/KSM Eks Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)	160	160	
	Jumlah Lanjut Usia yang ditangani	150	75	

	Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang ditangani	90	150	
	Terpabilitasnya dan Terlayani Pemulangan OT Ke Tempat Asalnya	100	58	
	Pengurusan / Pemulasaran Bagi Mayat Terlantar	100	100	
16) Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;	Jumlah Anjal, Gepeng, dan PSK yang ditangani			Dinsosn aker
	Anjal	125	140	
	Gepeng	221	216	
	PSK	104	46	
17) Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, psk, narkoba dan penyakit sosial lainnya);	Jumlah Korban Narkotika dan HIV/AIDS/WTS yang dibina	250		Dinsosn aker
	Jumlah Eks Psikotik yang dibina	100	30	
	Sosialisasi Pencegahan Korban Tindak Kekerasan dan Trafficking (%)	100	100	
18) Pembinaan Anak Terlantar;	Jumlah Anak Terlantar / Anak Jalanan yang dibina	50	50	Dinsosn aker
19) Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;	Jumlah makam pahlawan yang terpelihara/terawat	1.065	1065	Dinsosn aker
	Jumlah PSKS yang terbina	82	90	
	Jumlah PSKS yang menerima bantuan	10		
20) Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terselesaikan (%)	67	22/49= 44,90 %	BPMKB

Keterangan warna :

- 1) Hijau = tercapai
- 2) Kuning = belum tercapai
- 3) Merah = tidak tercapai

## 2.6 Permasalahan Pembangunan Daerah

Proses pembangunan akan sangat bergantung dengan apa yang dimiliki daerah tersebut sebagai modal dalam penyokong keberhasilan pembangunan. Namun pada perjalanannya pembangunan daerah juga kerap kali harus menghadapi berbagai permasalahan yang dapat menghambat keberhasilan

dalam mencapai target-target pembangunan. Permasalahan tersebut baik yang telah dan tengah berlangsung, ataupun permasalahan yang dapat terjadi pada masa yang akan datang. Permasalahan umum pembangunan di Kota Bogor tersebar di berbagai bidang pemerintahan. Sebagai salah satu kota besar Indonesia, Kota Bogor tumbuh dengan berbagai kemajuan yang masih diiringi permasalahan perkotaan yang juga kerap muncul. Seringkali secara umum seperti terjadi juga di kota besar lainnya, fenomena pertumbuhan penduduk, pergeseran sektor unggulan, meningkatnya aktivitas perkotaan yang mulai mereduksi kelestarian lingkungan, perubahan budaya perkotaan yang belum diimbangi dengan potensi kota dan kesiapan masyarakat, dan hal lainnya, terjadi pula di Kota Bogor. Ada beberapa permasalahan pembangunan di Kota Bogor yang perlu mendapat perhatian antara lain :

### **1. Pendidikan**

Antara lain beberapa permasalahan mendasar yang memerlukan penanganan segera mencakup :

- 1) Belum Terpenuhinya Wajib Belajar 12 Tahun
- 2) Mutu dan akses pelayanan pendidikan masih belum merata
- 3) Penyediaan sarana prasarana pendidikan belum sepenuhnya memenuhi Standar Pelayanan Minimal.
- 4) Masih terdapat Masyarakat yang masih Buta Aksara dan putus jenjang.
- 5) Ruang kelas yang belum memadai.

### **2. Kesehatan**

Antara lain beberapa permasalahan mendasar yang memerlukan penanganan segera mencakup :

- 1) Mutu layanan kesehatan yang masih belum merata dan belum memadai
- 2) Masih rendahnya Pola Hidup Bersih dan Sehat;
- 3) Masih terdapat penyakit yang disebabkan oleh faktor epidemi.
- 4) Masih terdapat anak balita gizi kurang

### **3. Kepemudaan dan Olah Raga**

Pembinaan olahraga yang belum tertata secara sistematis antara olahraga pendidikan di lingkungan persekolahan, olahraga rekreasi dan olah raga tradisional di lingkungan masyarakat, dan olahraga prestasi untuk kelompok atlet yang menjadi tulang punggung Kota Bogor dalam pentas kompetisi olahraga nasional. Sedangkan permasalahan dibidang kepemudaan masih terbatasnya sarana dan prasana untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri.

### **4. Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak**

Masih sangat terbatasnya program/kegiatan terutama yang terkait dengan kesempatan usaha, masih terdapat perempuan dan anak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, serta belum optimalnya peran lembaga sosial masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak.

### **5. Budaya**

Belum sepenuhnya tergali dan termanfaatkannya potensi dan kearifan budaya lokal (*indigeneos knowledge*) sebagai modal sosial dalam pembangunan. Selain itu perlu ditingkatkan ketahanan budaya masyarakat akibat imbas pengaruh globalisasi.

### **6. Sosial**

Adanya kecenderungan peningkatan jumlah dan jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Hal ini tampak dari merebaknya kasus-kasus permasalahan sosial seperti perdagangan manusia (*trafficking*),

HIV AIDS, dan penyalahgunaan narkoba. Peran serta masyarakat dalam penanganan masalah sosial masih relatif rendah sebagai akibat pola pikir masyarakat yang masih menganggap tabu untuk mengungkap permasalahan sosial, meskipun berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat.

## **7. Penanaman Modal**

Pertumbuhan investasi belum mampu meningkatkan keterkaitan dengan usaha ekonomi lokal dan belum mampu menyediakan lapangan/kesempatan kerja untuk mengimbangi jumlah penganggur/ pencari kerja. Beberapa kendala dalam upaya peningkatan investasi di Kota Bogor, antara lain:

- 1) Belum efisien dan efektifnya birokrasi, belum adanya kepastian hukum dan kepastian berusaha serta jaminan keamanan berusaha dalam bidang penanaman modal, dan masih rendahnya infrastruktur pendukung.
- 2) Masih tingginya angka pengangguran yang disebabkan antara lain tidak sebandingnya jumlah pertumbuhan angkatan kerja dengan laju pertumbuhan kesempatan kerja, serta rendahnya kompetensi tenaga kerja. Akibatnya, angkatan kerja yang begitu besar di Kota Bogor belum terserap secara optimal oleh sektor-sektor formal.
- 3) Investasi yang masuk di Kota Bogor lebih kepada investasi padat modal, bukan padat karya, sehingga penyerapan tenaga kerja tidak maksimal.

## **8. Otonomi Daerah**

Permasalahan dalam urusan ini adalah perlunya peningkatan penatausahaan keuangan yang akuntabel, penataan organisasi, penataan naskah dinas, penataan perijinan, peningkatan pelayanan publik. Pendayagunaan aparatur sesuai dengan keahlian (reformasi birokrasi), pembangunan sarana kantor yang memadai, peningkatan sarana dan prasarana kerja yang memadai. Permasalahan lain yang memerlukan perhatian adalah pelimpahan kewenangan kepada camat dan lurah agar mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

### **2.7 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

#### **1. Penataan Transportasi dan Angkutan Umum.**

Penataan Sistem Transportasi yang Belum Maksimal

#### **2. Penataan Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Kota.**

Pengelolaan Sampah yang Belum Terpadu

#### **3. Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL).**

- 1) Kesadaran para pelaku usaha informal masih rendah
- 2) Konsistensi dalam penegakan hukum dan penertiban PKL belum optim

#### **4. Penataan ruang publik, pedestrian, taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

Tingginya Tingkat Pencemaran Lingkungan

#### **5. Transformasi budaya dan reformasi birokrasi**

Menurunnya Nilai dan Budaya Masyarakat

#### **6. Penanggulangan Kemiskinan**

- 1) Tingginya Angka Pengangguran
- 2) Belum Tangguhnya Ketahanan Pangan Daerah
- 3) Tingginya Tingkat Kemiskinan dan Kelompok Masyarakat Marjinal Perkotaan
- 4) Belum Terpenuhinya Wajib Belajar 12 Tahun
- 5) Belum Terpenuhinya Layanan Kesehatan Masyarakat secara Optimal



**BAB III**  
**RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN**  
**KEUANGAN DAERAH**

**3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

**3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Kota Bogor**

Perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari besarnya PDRB serta cepat atau lambatnya perekonomian wilayah tersebut yang dilihat dari kinerja laju pertumbuhan ekonominya. Perekonomian Kota Bogor ditinjau dari PDRB nya senantiasa mengalami pertumbuhan yang signifikan, walaupun mengalami sedikit perlambatan pada tahun 2013 dan 2014 sebagai efek krisis nasional dan global. PDRB Kota Bogor tahun 2014 adalah 29, 102 triliun rupiah. Adapun rincian PDRB Kota Bogor tahun 2010-2014 adalah sebagaimana tabel 3.1 berikut :

**Tabel 3.1**  
**Nilai PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Bogor (Juta Rupiah)**

Kategori	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	200.988,74	211.573,26	221.051,69	231.430,61	241.575,71
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	3.822.693,47	4.143.202,83	4.472.511,44	4.837.978,73	5.393.074,47
D	Pengadaan Listrik dan Gas	899.195,89	1.011.352,81	1.267.307,38	1.514.730,25	1.960.761,41
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah dan Daur Ulang	19.158,72	21.603,61	24.469,56	27.431,17	28.821,37
F	Konstruksi	2.138.836,93	2.323.578,55	2.620.430,97	2.964.539,77	3.280.102,82
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.225.205,30	4.720.252,91	5.290.523,34	5.927.802,78	6.476.574,46
H	Transportasi dan Pergudangan	2.025.167,89	2.241.937,22	2.549.233,55	2.894.270,96	3.151.053,52
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	830.187,22	911.535,94	1.014.412,50	1.170.326,11	1.294.452,08
J	Informasi dan Komunikasi	759.826,98	892.304,20	1.001.661,83	1.085.808,51	1.284.855,52
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.238.123,83	1.368.609,36	1.523.198,13	1.805.303,27	1.975.033,74
L	Real Estat	398.205,12	448.943,31	510.487,49	580.016,40	653.307,73
M, N	Jasa Perusahaan	349.744,45	417.781,85	471.293,84	533.352,85	593.665,21
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	586.209,72	660.127,28	746.018,69	787.881,00	880.975,97
P	Jasa Pendidikan	438.186,32	483.019,10	576.118,91	660.764,24	753.231,12
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	209.080,47	226.001,57	245.706,73	269.763,21	318.087,37
R, S, T, U	Jasa Lainnya	634.777,53	684.358,01	720.443,42	765.906,80	816.656,40
<b>PDRB Total</b>		<b>18.775.588,58</b>	<b>20.766.181,81</b>	<b>23.254.869,47</b>	<b>26.057.306,66</b>	<b>29.102.228,90</b>

Sumber: BPS Kota Bogor, 2015

Struktur perekonomian Kota Bogor dapat ditinjau dari besarnya proporsi peranan masing-masing kategori ekonomi terhadap total pembentukan PDRB Kota Bogor. Pada tahun 2014, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (22,25 persen) dan Kategori Industri Pengolahan (18,53 persen) mendominasi struktur perekonomian Kota Bogor. Struktur ekonomi ini sangat sesuai dengan karakteristik masyarakat Kota Bogor sebagai Kota Urban. Adapun distribusi PDRB menurut lapangan usaha di Kota Bogor Tahun 2010-2014 sebagaimana tabel 3.2 berikut :

**Tabel 3.2**  
**Distribusi Persentase PDRB tahun 2010-2014**  
**Menurut Lapangan Usaha di Kota Bogor (Persen)**

Kategori	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,07	1,02	0,95	0,89	0,83
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	20,36	19,95	19,23	18,57	18,53
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,79	4,87	5,45	5,81	6,74
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah dan Daur Ulang	0,10	0,10	0,11	0,11	0,10
F	Konstruksi	11,39	11,19	11,27	11,38	11,27
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	22,50	22,73	22,75	22,75	22,25
H	Transportasi dan Pergudangan	10,79	10,80	10,96	11,11	10,83
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,42	4,39	4,36	4,49	4,45
J	Informasi dan Komunikasi	4,05	4,30	4,31	4,17	4,41
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,59	6,59	6,55	6,93	6,79
L	Real Estat	2,12	2,16	2,20	2,23	2,24
M, N	Jasa Perusahaan	1,86	2,01	2,03	2,05	2,04
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,12	3,18	3,21	3,02	3,03
P	Jasa Pendidikan	2,33	2,33	2,48	2,54	2,59
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,11	1,09	1,06	1,04	1,09
R, S, T, U	Jasa Lainnya	3,38	3,30	3,10	2,94	2,81
<b>PDRB Total</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Kota Bogor, 2015

Kontribusi kategori yang menggambarkan struktur perekonomian Kota Bogor ini juga dapat digunakan untuk menentukan sektor ekonomi andalan wilayah. Sektor andalan atau *leading sector* ini memiliki peranan yang cukup vital dalam pembentukan PDRB serta memberikan *multiplier effect* yang besar bagi pertumbuhan sektor ekonomi lainnya. Diharapkan penerapan kebijakan yang tepat terutama pada *leading sectors* dapat memacu pertumbuhan ekonomi wilayah dengan lebih cepat

### 3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan perekonomian Kota Bogor pada tahun 2014 sedikit mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor pada tahun 2014 mencapai level 5,97 persen. Perlambatan ini secara langsung maupun tidak langsung sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional dan global yang juga mengalami tekanan dan perlambatan laju pertumbuhannya.

Jika dilihat lebih dalam, maka Kategori Informasi dan Komunikasi mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dibandingkan kategori lainnya. Kategori ini tumbuh 18,69 persen pada tahun 2014, atau mencapai dua kali lipat pertumbuhan pada tahun 2013 yang hanya tumbuh sebesar 9,41 persen. Pertumbuhan yang sangat cepat ini dipengaruhi oleh peralihan budaya yang sangat mengandalkan daring (internet). Peningkatan akses terhadap internet mengakibatkan sektor informasi dan komunikasi berkembang pesat. Hal ini juga semakin mendorong semakin ketatnya persaingan usaha pada sektor tersebut.

Kategori lain yang pertumbuhannya juga cukup signifikan dengan laju diatas 10 persen adalah Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (13,30 persen) dan Kategori Jasa Pendidikan (10,30 persen). Sementara itu, Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menjadi kategori lapangan usaha yang paling lambat tumbuh di Kota Bogor, hanya berkisar 2 persen pada setiap tahunnya.

Fakta yang cukup menarik untuk dikaji lebih dalam adalah laju pertumbuhan pada Kategori Industri Pengolahan yang secara umum tumbuh sebesar 5,53 persen. Beberapa golongan industri bahkan tumbuh di atas pertumbuhan kategori Industri Pengolahan secara umum. Golongan Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik tumbuh paling cepat dibandingkan golongan lain, yaitu 7,04 persen. Fenomena menariknya adalah terjadinya pertumbuhan negatif yang cukup tinggi pada Golongan Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekam sebesar 9,55 persen. Pertumbuhan negatif ini mengindikasikan terjadinya penurunan output yang cukup signifikan pada industri ini.

### **3.1.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Bogor**

#### **3.1.3.1. Proyeksi Global dan Nasional**

Dalam periode tahun 2015-2019, untuk mewujudkan ekonomi yang lebih mandiri dan mendorong bangsa Indonesia ke arah yang lebih maju dan sejahtera, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Untuk itu, perlu diupayakan langkah-langkah yang sungguh-sungguh dalam mendorong investasi, ekspor, konsumsi, maupun pengeluaran pemerintah

Untuk mewujudkan perekonomian yang lebih mandiri, industri-industri (berdasarkan PDB dengan tahun dasar 2010, sebutan sektor diubah menjadi industri) strategis ekonomi domestik akan lebih digiatkan dengan prioritas pada kedaulatan pangan, kemaritiman, kedaulatan energi serta upaya untuk mendorong industri pengolahan dan pariwisata. Langkah-langkah tersebut akan didukung dengan upaya perwujudan kedaulatan keuangan yang ditopang oleh kebijakan fiskal dan moneter yang efektif. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga akan disertai upaya-upaya perluasan dan keberpihakan kesempatan kerja kepada kelompok kurang mampu yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan memperkecil kesenjangan.

Transformasi ekonomi melalui industrialisasi yang berkelanjutan ini menjadi kunci keberhasilan pembangunan nasional. Kesemuanya ini digambarkan dalam prospek ekonomi 2015-2019 yang diperkirakan akan dapat tercapai dengan asumsi: (1) perekonomian dunia terus mengalami pemulihan; (2) tidak ada gejolak dan krisis ekonomi dunia baru yang terjadi pada periode tahun 2015- 2019; serta (3) berbagai kebijakan yang telah ditetapkan dalam agenda pembangunan dapat terlaksana

Dengan berbagai kebijakan, pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat tajam sejak tahun 2016, menjadi 7,1 persen pada tahun 2017, dan terus meningkat pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebesar 7,5 persen dan 8,0 persen. Dengan tingkat pertumbuhan ini, pendapatan perkapita naik dari Rp. 47,8 Juta (USD3.918,3) pada tahun 2015 hingga mencapai Rp. 72,2 Juta (USD 6.018,1) pada tahun 2019. Dari sisi pengeluaran, investasi didorong dan mencapai sekitar 10,4 persen pada tahun 2017, dan 12,1 persen pada tahun 2019. Dorongan kuat dari investasi akan meningkatkan kontribusi ekspor barang dan jasa, serta konsumsi. Ekspor diperkirakan tumbuh 8,8 persen pada tahun 2017, dan mencapai 12,2 persen pada tahun 2019. Konsumsi masyarakat dan konsumsi pemerintah tumbuh secara bertahap dan masing-masing mencapai 6,1 persen dan 2,5 persen pada tahun 2019. Dari sisi produksi, industri pengolahan dalam lima tahun diperkirakan tumbuh rata-rata sebesar 7,4 persen per tahun, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu industri pertanian, kehutanan dan perikanan diperkirakan tumbuh rata-rata sebesar 4,5 persen. Seiring dengan pertumbuhan PDB secara keseluruhan, industri tersier juga mengalami kenaikan dengan pertumbuhan tertinggi pada industri informasi dan komunikasi yang mencapai 13,4 persen pada tahun 2019, ditopang oleh

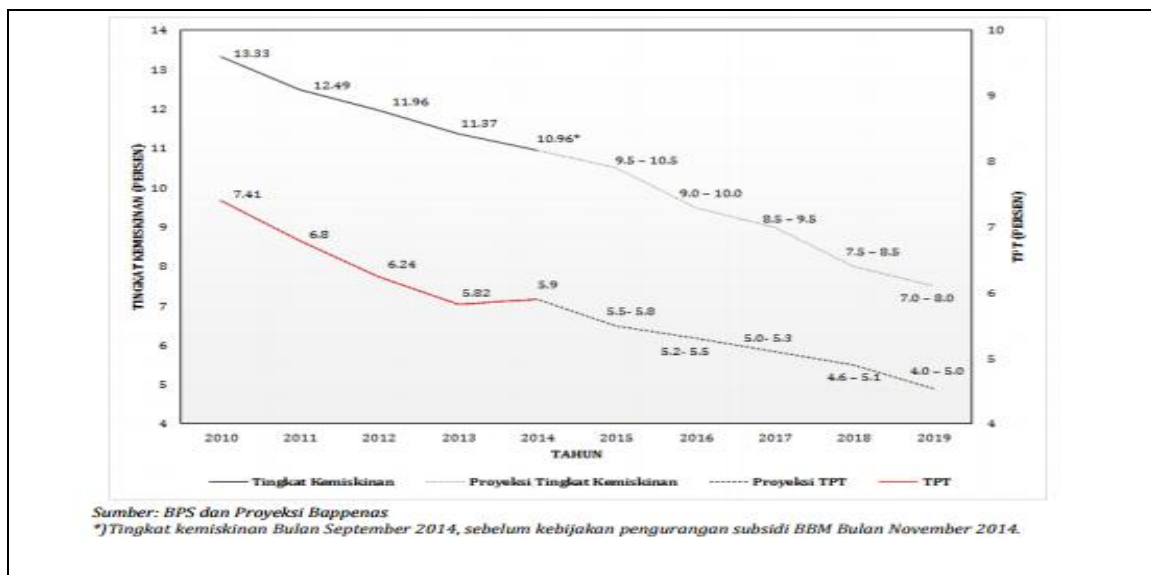
membbaiknya infrastruktur dan meningkatnya pemakaian alat telekomunikasi

Dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, tingkat kemiskinan diupayakan terus menurun dan mencapai sekitar 7,0-8,0 persen pada akhir tahun 2019, dan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,0-5,0 persen pada akhir tahun 2019. Untuk mencapai sasaran tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan ditempuh langkah-langkah konkret untuk mendorong terciptanya kesempatan kerja yang berkualitas, diantaranya:

- 1) Meningkatkan produktivitas dengan melakukan akselerasi penyerapan tenaga kerja ke industri yang mempunyai nilai tambah dan produktivitas tinggi termasuk industri pertanian yang merupakan pemberi kesempatan kerja besar serta industri pengolahan yang mempunyai potensi dapat menggerakkan pertumbuhan, menciptakan kesempatan kerja dan membawa perbaikan pada kesejahteraan hidup;
- 2) Meningkatkan standar hidup pekerja termasuk pekerja miskin, melalui penyediaan lapangan kerja produktif;
- 3) Transformasi struktur tenaga kerja dengan mempersiapkan infrastruktur pengembangan kompetensi pekerja untuk mengubah low-skilled industries menjadi skills-based industries; dan
- 4) Memberikan insentif bagi investasi yang menciptakan kesempatan kerja besar (padat pekerja) dan bagi pelaku usaha kecil menengah. Keseimbangan dalam penciptaan lapangan kerja dan perlindungan pekerja yang memadai akan tercapai bila pertumbuhan ekonomi yang tercipta dapat memberikan kesempatan kerja yang baik dan tingkat pendapatan pekerja lebih besar dan lebih merata dalam sektor-sektor pembangunan.

Adapun secara rinci tentang proyeksi penurunan tingkat kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nasional adalah sebagaimana grafik 3.1 berikut.

**Grafik 3.1**  
**Proyeksi Tingkat Kemiskinan dan TPT 2015-2019**



Untuk mencapai sasaran pertumbuhan yang telah ditetapkan kebutuhan investasi selama lima tahun sebesar Rp. 26.557,9 triliun (harga berlaku) atau meningkat dengan rata-rata 14,8 persen per tahun. Peranan investasi masyarakat meningkat dari 29,2 persen PNB pada tahun 2015 menjadi 31,0 persen PNB pada tahun 2019, sedangkan peranan investasi pemerintah pusat dan daerah diproyeksikan meningkat sebesar rata-rata 5,4 persen pada periode yang sama. Dengan demikian, jumlah investasi pemerintah pusat dan daerah pada tahun 2015-2019 diperkirakan akan



mencapai Rp. 4.023,8 triliun. Pembiayaan kebutuhan investasi tersebut dibiayai terutama dari tabungan dalam negeri, baik yang bersumber dari tabungan pemerintah maupun dari tabungan masyarakat. Seiring meningkatnya penerimaan negara serta relatif terkendalinya pengeluaran rutin, tabungan pemerintah diperkirakan bergeser dari sebesar -0,2 persen PNB pada tahun 2015 menjadi sebesar 3,1 persen PNB pada tahun 2019. Adapun tabungan masyarakat diperkirakan meningkat dari 30,5 persen PNB pada tahun 2015 menjadi 33,0 persen pada tahun 2019. Sementara itu, tabungan luar negeri yang diperkirakan surplus sebesar 3,0 persen PNB tahun 2015 secara berangsur bergeser menjadi hanya sebesar 1,1 persen tahun 2019.

Dari sisi pembiayaan, institusi keuangan untuk membiayai investasi masyarakat dikategorikan sebagai berikut: (i) peran perbankan akan meningkat dari 6,4 persen PNB pada tahun 2015 menjadi 8,8 persen PNB pada tahun 2019, sejalan dengan upaya BI untuk meningkatkan likuiditas ke masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi; (ii) peran luar negeri selama lima tahun meningkat menjadi 5,6 persen PNB tahun 2019, sejalan dengan masuknya aliran modal; (iii) peran saham akan naik dari 0,6 persen PNB pada tahun 2015 menjadi 1,2 persen PNB pada tahun 2019, peran obligasi akan naik dari 3,7 persen PNB pada tahun 2015 hingga mencapai 5,0 persen PNB pada tahun 2019; dan (iv) peran dana internal perusahaan (returned earning) dalam berinvestasi akan semakin berkurang, yaitu dari 13,2 persen PNB pada tahun 2015 hingga menjadi 10,5 persen PNB pada tahun 2019 karena peran lembaga keuangan yang semakin baik. Adapun rincian kebutuhan investasi dan sumber pembiayaan adalah sebagaimana tabel.... Berikut :

**Tabel 3.3**  
**Kebutuhan Investasi dan Sumber Pembiayaan**

	Perkiraan 2014	Jumlah (2010-14)	Proyeksi Jangka Menengah					Jumlah (2015-19)
			2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Sumber Pembiayaan Investasi Masyarakat (triliun Rp)</b>	3.143,7	12.430,7	3.451,6	3.827,1	4.424,8	5.041,6	5.789,0	22.534,1
a. Kredit Perbankan	646,4	2.480,0	752,4	894,4	1.077,8	1.323,4	1.646,1	5.694,1
<i>persentase terhadap PNB (%)</i>	6,1	5,8	6,4	6,8	7,3	8,0	8,8	7,6
b. Luar Negeri	570,2	2.111,1	616,9	702,9	799,2	910,6	1.039,8	4.069,4
<i>persentase terhadap PNB (%)</i>	5,4	5,0	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,4
c. Penerbitan Saham	41,0	270,5	74,0	103,0	152,0	181,0	224,0	734,0
<i>persentase terhadap PNB (%)</i>	0,4	0,6	0,6	0,8	1,0	1,1	1,2	1,0
d. Penerbitan Obligasi	350,0	1.203,5	443,0	606,0	705,0	803,0	925,0	3.482,0
<i>persentase terhadap PNB (%)</i>	3,3	2,8	3,8	4,6	4,8	4,9	5,0	4,6
e. Dana Internal Masyarakat	1.536,1	6.365,6	1.565,3	1.520,8	1.690,9	1.823,6	1.954,1	8.554,6
<i>persentase terhadap PNB (%)</i>	14,4	14,9	13,2	11,5	11,4	11,0	10,5	11,4

Sumber : BPS dan Proyeksi Bappenas

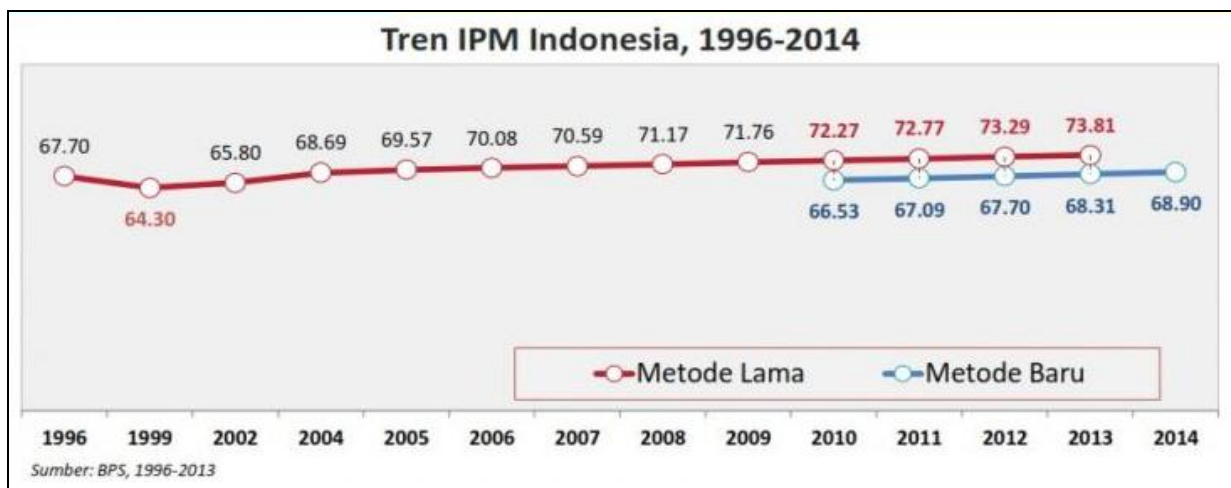
Sebagai gambaran umum, bahwa salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu negara termasuk di Indonesia adalah dengan

mempergunakan Indeks Pembangunan Manusia. IPM Indonesia berdasar metode lama dari tahun-ketahun terus mengalami peningkatan, padatahun 1996 IPM Indonesia berada pada kisaran 67,70 dan pada akhir tahun 2013 berada pada kisaran 73,81.

Belum lama ini, Badan Pusat Statistik (BPS) meluncurkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dihitung dengan menggunakan metode baru. Metode tersebut mengadopsi teknik perhitungan IPM yang telah digunakan oleh United Nations Development Programme (UNDP) dalam penyusunan laporan tahunan pembangunan manusia (Human Development Report) sejak tahun 2010. Seperti diketahui, IPM merupakan indeks komposit hasil agregasi tiga jenis indeks yang masing-masing mewakili dimensi pembangunan manusia, yakni indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks standar hidup

Perubahan mendasar dalam perhitungan IPM dengan metode baru mencakup penggunaan indikator harapan lama sekolah (HLS) menggantikan indikator angka melek huruf (AMH) dalam perhitungan indeks pendidikan dan penggunaan indikator pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita menggantikan produk domestik bruto (PDB) per kapita dalam perhitungan indeks standar hidup. Adapun perbandingan IPM Metode lama dengan metode Baru Tingkat Nasional adalah sebagaimana grafik 3.2 berikut

**Grafik 3.2**  
**Perbandingan IPM Metode lama dengan metode Baru Tingkat Nasional Tahun 1996-2014**



Sumber BPS Pusat

### 3.1.3.2 Proyeksi Provinsi Jawa Barat

Indek Harga Konsumen (IHK) Gabungan Jawa Barat yang meliputi 7 kota yaitu Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok dan Kota Tasikmalaya mengalami kenaikan indeks. IHK dari 121,03 di Desember 2015 menjadi 121,74 di Januari 2016; dengan demikian terjadi inflasi sebesar 0,59 persen. Dari tujuh kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi yaitu Kelompok Bahan Makanan sebesar 2,84 persen, Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau sebesar 0,41 persen, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar sebesar 0,30 persen, Kelompok Sandang sebesar 0,12 persen, Kelompok Kesehatan sebesar 0,49 persen, dan Kelompok Pendidikan, Rekreasi & Olahraga sebesar 0,19 persen. Sementara Kelompok Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan mengalami deflasi sebesar 1,06 persen.

Dari tujuh kota pantauan IHK di Jawa Barat Januari 2016, seluruhnya mengalami inflasi yaitu Kota Bogor sebesar 0,88 persen, Kota Sukabumi

sebesar 0,67 persen, Kota Bandung sebesar 0,53 persen, Kota Cirebon sebesar 0,50 persen, Kota Bekasi sebesar 0,37 persen, Kota Depok sebesar 0,68 persen dan Kota Tasikmalaya sebesar 0,93 persen. Kelompok Bahan Makanan menjadi penyumbang inflasi tertinggi Januari 2016, kelompok pengeluaran ini mengalami inflasi sebesar 2,84 persen. Sub kelompok yang mengalami inflasi tertinggi yaitu sub kelompok bumbu-bumbuan sebesar 8,04 persen. Sementara komoditi yang mengalami inflasi tertinggi dari sub kelompok ini yaitu bawang merah, bawang putih, cabe merah.

Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Jawa Barat pada bulan September 2015 sebesar 4.485.654 orang (9,57 persen), untuk daerah perkotaan sebanyak 2.706.520 orang (8,58 persen terhadap jumlah penduduk perkotaan) sedangkan di daerah perdesaan sebanyak 1.779.134 orang (11,61 persen terhadap total penduduk perdesaan). Garis kemiskinan Jawa Barat bulan September 2015 sebesar Rp. 318.602,- Untuk daerah perkotaan garis kemiskinan bulan September 2015 sebesar Rp. 318.297,- dan Garis kemiskinan di daerah perdesaan sebesar Rp. 319.228,-

Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) terhadap Garis Kemiskinan (GK) sebesar 70,33 persen untuk daerah perkotaan. Sedangkan di daerah perdesaan sebesar 75,54 persen. Secara total peranan komoditi makanan terhadap GK adalah sebesar 72,03 persen.

Pada periode Maret 2015 - September 2015 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sama-sama menunjukkan kecenderungan mengalami kenaikan. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauh dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga cenderung melebar, terutama Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 1,628 pada keadaan Maret 2015 menjadi 1,674 pada keadaan September 2015 sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kenaikan dari 0,435 pada keadaan Maret 2015 menjadi 0,491 pada keadaan September 2015. Sementara di daerah perdesaan kondisinya semakin parah karena baik P1 maupun P2 mengalami kenaikan yang sangat signifikan, yaitu P1 meningkat dari 1,875 menjadi 2,233 dan P2 meningkat dari 0,469 menjadi 0,678. Hal ini mengindikasikan kondisi penduduk miskin semakin parah. Untuk lebih jelasnya adalah sebagaimana tabel 3.4 berikut :

**Tabel 3.4**  
**Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Barat Menurut Daerah Maret 2015 – September 2015**

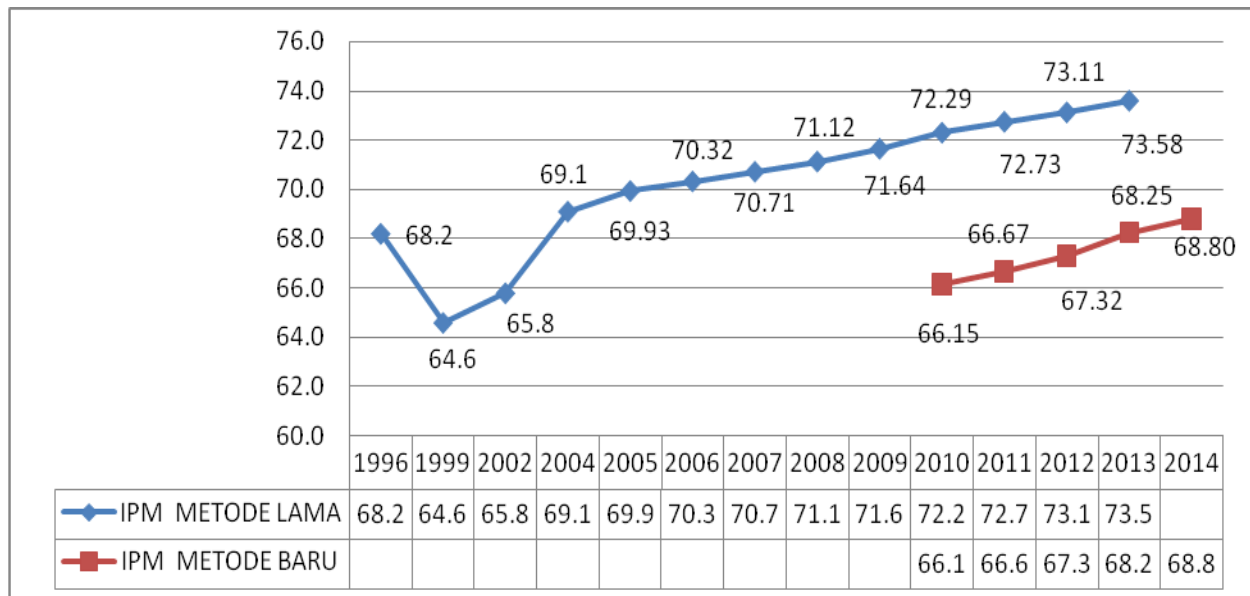
Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)			Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin (%)
	Makanan	Bukan Makanan	Total		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
<b>Perkotaan</b>					
Maret 2015	213.479	94.009	307.487	2.638.383	8,43
September 2015	223.843	94.454	318.297	2.706.520	8,58
<b>Perdesaan</b>					
Maret 2015	231.259	74.358	305.618	1.797.316	11,82
September 2015	241.132	78.096	319.228	1.779.134	11,61
<b>Perkotaan + Desa</b>					
Maret 2015	219.290	87.586	306.876	4.435.699	9,53
September 2015	229.494	89.107	318.602	4.485.654	9,57

Sumber : Susenas 2015

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Propinsi Jawa Barat pada tahun 2014 dengan mempergunakan metode baru mencapai 68.80, meliputi

Indek pendidikan sebesar 59,26 poin Indeks kesehatan sebesar 80,35 poin dan Indek daya belim sebesar 68,40 poin, Sedangkan perbandingan IPM Propinsi Jawa Barat dengan menggunakan metode lama dan metode baru adalah sebagaimana grafik 3.3 berikut :

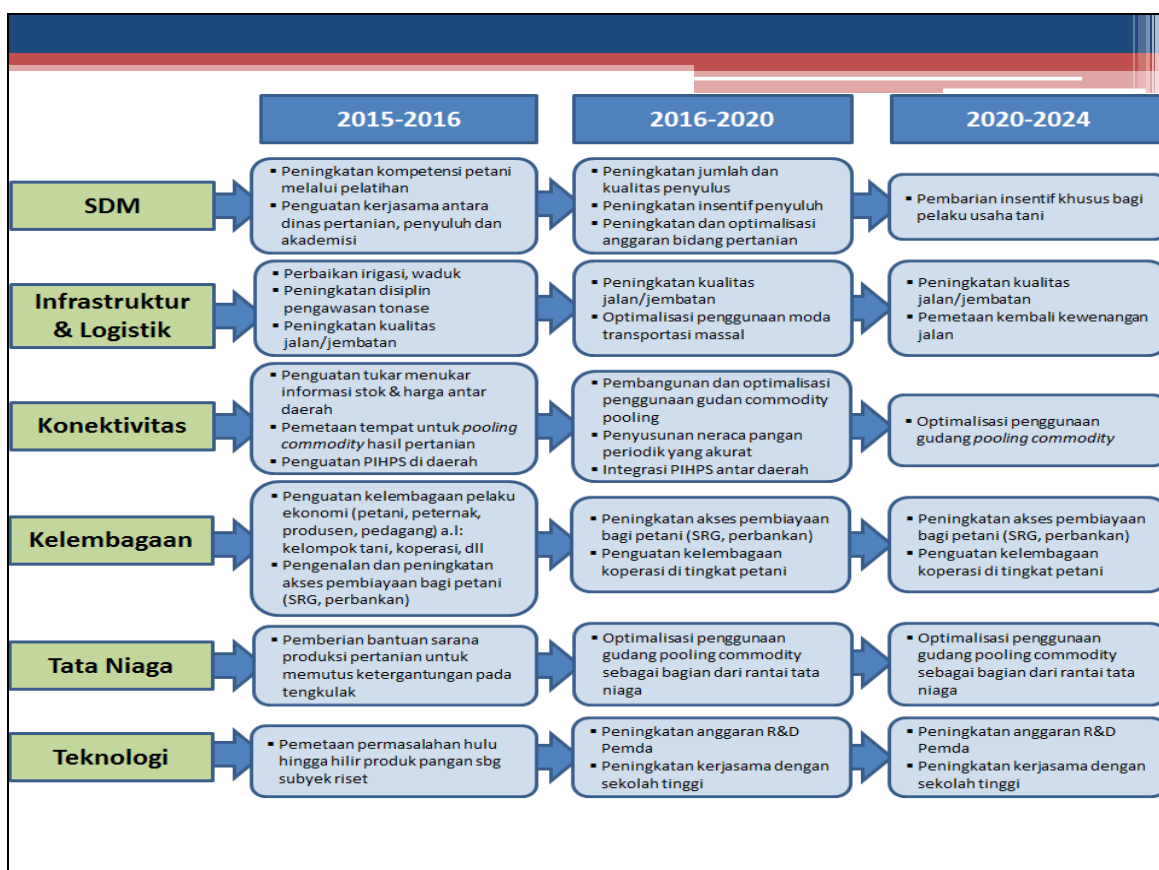
**Grafik 3.3**  
**Perbandingan IPM Metode lama dengan metode Baru Tingkat Propinsi Jawa Barat Tahun 1996-2014**



Sumber BPS Propinsi Jawa Barat

Adapun upaya Pemerintah Propinsi Jawa Barat dalam mengendalikan inflasi antara lain dengan membuat Roadmap pengendalian inflasi di Jawa Barat dengan rencana program sebagaimana tabel 3.5 berikut :

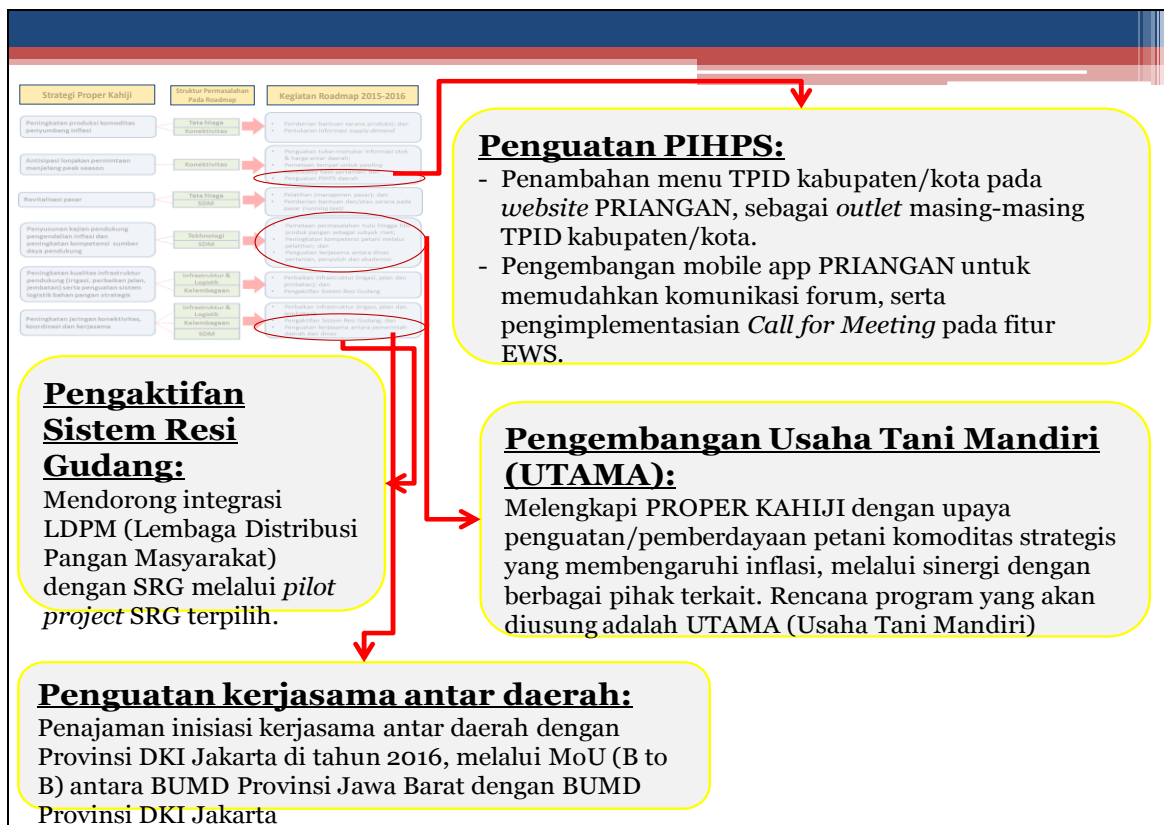
**Tabel 3.5**  
**Roadmap Pengendalian Inflasi Jawa Barat 2015-2024**





Sedangkan rencana strategis pengendalian inflasi Jawa Barat pada tahun 2016 adalah sebagaimana tabel 3.6 berikut :

**Tabel 3.6**  
**Rencana Kegiatan Strategis Tahun 2016**



### 3.1.3.3 Proyeksi Kota Bogor

Dalam RPJPD Kota Bogor tahun 2005-2025 yang tercantum dalam Misi pertama yaitu mengembangkan perekonomian masyarakat dengan itik berat pada jasa dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada. Pada tahun 2015-2019 arah pembangunan Kota Bogor lebih difokuskan kepada sektor tersier sebagai sektor unggulan pemantapan regulasi bagi peningkatan investasi, mempertahankan iklim investasi yang kondusif dalam mendukung perekonomian Kota Bogor

Tantangan yang paling besar adalah masih relatif besarnya para pencari kerja yang mencapai 3.515 orang dengan rincian Kecamatan Tanah Sareal sebanyak 589 orang, Kecamatan Bogor Utara sebanyak 567 orang, Kecamatan Bogor Barat sebanyak 1.101 orang, Kecamatan Bogor Tengah sebanyak 420 orang, Kecamatan Bogor Selatan sebanyak 587 orang dan Kecamatan Bogor Timur sebanyak 244 orang.

Pada tahun 2013, jumlah lowongan kerja yang tersedia mencapai 4.843 lowongan, sedangkan pada tahun 2012 telah mencapai 8.170 lowongan. Pada saat yang sama, jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor belum dapat mengisi seluruh lowongan yang tersedia. Hal ini disebabkan antara lain kompetensi yang dimiliki oleh pencari kerja tidak sesuai dengan lowongan yang tersedia dan lowongan pekerjaan kurang/ tidak diminati oleh para pencari kerja.

Tantangan lainnya adalah keberadaan jumlah organisasi bidang ketenagakerjaan yang mencapai 21 organisasi yang terdiri dari 20 organisasi pekerja dan 1 organisasi pengusaha yaitu APINDO yang memiliki anggota 40 perusahaan. Sedangkan jumlah pekerja yang tergabung dalam 20 organisasi pekerja tercatat kurang lebih 6,102 orang. Diluar itu, penanganan masalah

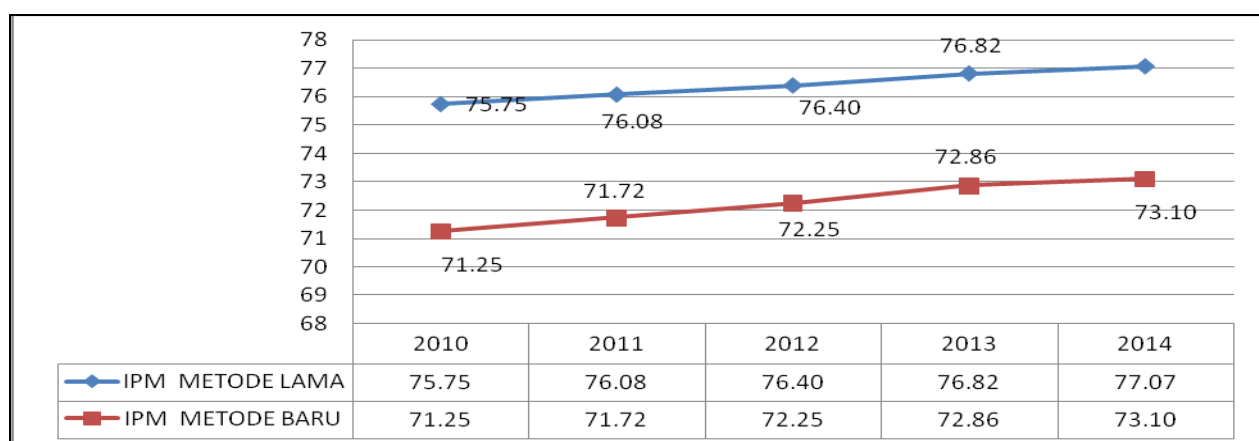
ketenagakerjaan memiliki potensi dan daya dukung yang besar. Hal itu didasarkan dengan keberadaan 24 Bursa Kerja Khusus (BKK), yaitu bursa kerja yang berada di lingkungan satuan pendidikan menengah di satuan pendidikan tinggi dan di lembaga pelatihan kerja serta 7 Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yaitu lembaga yang berbadan hukum yang memiliki ijin untuk melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja serta keberadaan 50 Lembaga Pendidikan Keterampilan yang aktif dari 68 lembaga serupa di Kota Bogor. Daya dukung lain adalah jumlah perusahaan yang terdata sepanjang tahun 2013 mencapai 944 perusahaan yang terdiri dari perusahaan skala kecil, skala menengah, dan skala besar. Jumlah perusahaan di tahun 2013 meningkat sebanyak 100 perusahaan dibandingkan tahun 2012.

Laju inflasi Kota Bogor pada bulan Maret 2014 sebesar 0.28 persen dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 112.43. Inflasi terjadi karena secara umum adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks dan deflasi terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan dengan penurunan indeks. Perubahan indeks tersebut yaitu : Kelompok bahan makanan 0.03 persen; Kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 0.72 persen; kelompok pendidikan rekreasi, dan olah raga 0.07 persen dan kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan 0.06 persen.

Disisi lain adanya pasar bebas akan mempengaruhi industri kecil di Kota Bogor dalam melakukan persaingan. Persaingan ini tidak hanya dalam hal produk tapi juga menyangkut faktor produksi diantaranya SDM. Tingkat pengangguran dan kemiskinan yang masih cukup tinggi juga akan terus mewarnai tantangan perekonomian Kota Bogor di tahun 2017, hal inilah yang turut berpengaruh terhadap perekonomian Kota Bogor. Pada tahun 2017 perekonomian Kota Bogor diperkirakan akan lebih baik dan diharapkan dapat tumbuh mencapai 6,0%-6,5%. Selain itu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Bogor dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan, pada tahun 2012 persentase TPAK Kota Bogor mencapai 59,60 % peningkatan pada tahun 2013 sebesar 59,74 % dan pada tahun 2014 menjadi 59,96 %. Begitu pula dengan persentase pengangguran pada tahun 2012 sebesar 9,50 % meningkat pada tahun 2013 menjadi 9,80 % dan pada tahun 2014 terjadi penurunan sekitar 0,32 % atau 9,48 %.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Propinsi Kota Bogor pada tahun 2014 dengan mempergunakan metode baru mencapai 73,10, meliputi Indeks pendidikan sebesar 67,33 poin Indeks kesehatan sebesar 80,89 poin dan Indeks daya belim sebesar 71,72 poin, Sedangkan perbandingan IPM Kota Bogor dengan menggunakan metode lama dan metode baru adalah sebagaimana grafik 3.4 berikut :

**Grafik 3.4**  
**Perbandingan IPM Metode lama dengan metode Baru Tingkat Kota Bogor**  
**Tahun 2010-2014**



Sumber BPS Kota Bogor

## 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

### 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 13, pendapatan daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dikelompokkan atas :

1. Pendapatan Asli daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD pada umumnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang Sah;
2. Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus;
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, DBH pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya.

Berdasarkan data APBD Tahun 2015-2016, secara keseluruhan pendapatan daerah mengalami peningkatan dengan persentase kenaikan berfluktuatif. Secara persentase dan nominal hanya kelompok komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang secara konsisten mengalami kenaikan, begitu juga dengan kelompok dana perimbangan yang menunjukkan kecenderungan peningkatan baik secara nominal dan persentase kontribusi terhadap pendapatan daerah, seperti terlihat pada tabel 3.7 berikut :

**Tabel 3.7.**  
**Realisasi Pendapatan Kota Bogor Tahun 2015 dan**  
**Proyeksi Tahun 2016-2017**

NO.	PELAKSANA / JENIS PUNGUTAN	APBD Tahun 2015	APBD Tahun 2016	Target 2017
1	2	3	4	5
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>617,062,227,085</b>	<b>681,623,897,863</b>	<b>705,994,446,212</b>
1	Pajak Daerah	395,428,650,000	447,951,032,639	469,000,000,000
2	Retribusi Daerah	57,149,708,057	56,982,625,000	56,982,625,000
3	Bagian Laba Usaha Daerah	25,256,473,551	15,996,857,686	17,194,621,774
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	139,227,395,477	160,693,382,538	162,817,199,438
	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>840,331,669,000</b>	<b>1,247,772,417,920</b>	<b>1,247,772,417,920</b>
1	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	93,571,811,000	92,553,276,000	92,553,276,000
2	Dana Alokasi Umum	737,833,158,000	806,089,544,000	806,089,544,000
3	Dana Alokasi Khusus	8,926,700,000	349,129,597,920	349,129,597,920

	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>369,614,377,843</b>	<b>201,530,553,559</b>	<b>201,530,553,559</b>
1	Bagi Hasil Pajak Provinsi	165,521,033,843	198,530,553,559	198,530,553,559
2	Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus	201,093,344,000		0
3	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000
		<b>1,827,008,273,928</b>	<b>2,130,926,869,342</b>	<b>2,155,297,417,691</b>

Sumber : BPKAD Kota Bogor dan Proyeksi Bappeda

Dari berbagai komponen pendapatan daerah, sumber utama penerimaan daerah yang berpotensi besar adalah pajak restoran, menunjukkan peningkatan. Dari tahun ke tahun penerimaan dari pajak daerah menunjukkan tren meningkat. Hal ini, antara lain disebabkan adanya potensi komponen dana bagi hasil pajak bersumber dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang diserahkan kepada kabupaten/kota, sehingga terjadi pelimpahan kewenangan pemungutan pajak dari Provinsi ke Kabupaten / Kota, yaitu untuk Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, dimana setiap pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah dikenakan pajak sebesar 20% dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dimana dikenakan pajak sebesar 5%.

Dengan demikian dari ketiga komponen pendapatan tersebut, pada tahun 2016 sebesar Rp.2.130.926.869.342,00, sedangkan Tahun 2017 diproyeksikan pendapatan daerah mencapai Rp. 2.155.297.417.691,00 ada kenaikan sebesar Rp. 24,370,548,349,00. Target pendapatan daerah Tahun 2017 ini telah mempertimbangkan peningkatan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang 28 Tahun 2009 dan pajak dari PBB Perdesaan Perkotaan (PBB P2) yang dialihkelolakan menjadi pajak Daerah Kota Bogor.

### **3.2.2.Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Kebijakan Keuangan Daerah tahun anggaran 2017 yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Kota Bogor sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah:

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan, bahwa pada tahun 2016 telah dikeluarkan beberapa kebijakan diantaranya :
  - a. Penyesuaian terhadap Nilai Jual Obyek Pajak PBB-P2 dengan asumsi dapat meningkatkan rasa keadilan diantara para wajib pajak, sekaligus dapat mendekati nilai jual obyek pajak dengan harga pasar.
  - b. Pengurangan pembayaran PBB-P2 sampai dengan 100 % bagi warga miskin yang memiliki SPPT PBB-P2 sampai dengan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
  - c. Pemeliharaan basis data PBB-P2 dengan melakukan pemetaan di 68 Kelurahan
  - d. Evaluasi pemberian pengurangan PBB-P2 kepada pensiunan, warga berpenghasilan rendah serta wajib pajak yang mengalami kenaikan ketetapan pajak di atas 100 %, sebagai antisipasi penyesuaian Nilai Obyek Pajak (NJOP).
2. Menyesuaikan terhadap tarif pajak penerangan jalan yang semula sebesar 3 % naik menjadi 5 %, terkait dengan penyesuaian tersebut

- dilakukan penyusunan Peraturan Daerah tentang Tarif Pajak Penerangan.
3. Memantapkan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
  4. Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah;
  5. Meningkatkan koordinasi sinergis dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan OPD Penghasil;
  6. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
  7. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
  8. Meningkatkan peran OPD Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
  9. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.
  10. Memberikan penghargaan kepada OPD penghasil yang memenuhi atau melebihi target pencapaian retribusi, serta Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi atau melebihi target pencapaian PBB.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan upaya intensifikasi Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN, PPh Pasal 21);
2. Meningkatkan akurasi data, dan Sumber Daya sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.

### **3.2.3.Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama, termasuk penanganan 6 Prioritas Pembangunan Kota Bogor Tahun 2015-2019 yaitu: Penataan Tansportasi dan Angkutan Umum, Penataan Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Kota, Penataan dan Pemberdayaan PKL, Penataan Ruang Publik, Pedestrian, Taman dan RTH, Transformasi Budaya dan Reformasi Birokrasi serta Penanggulangan Kemiskinan.

Belanja daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pada dasarnya terdapat dua jenis belanja menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang

mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Belanja penyelenggaraan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik, pemanfaatan alokasi belanja diupayakan agar bisa efisien, efektif, dan proporsional.

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2017 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan. Kebijakan belanja daerah tahun 2017 tetap diarahkan untuk mendukung peningkatan IPM, diperlukan perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pencapaian IPM. Dengan perencanaan anggaran yang konsisten dan fokus, diproyeksikan pencapaian IPM Kota Bogor pada akhir tahun 2019 mencapai 79,77% yang diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan suprastruktur.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan target pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, dituangkan dalam tabel 3.8 sebagai berikut.

**Tabel 3.8.**  
**Realisasi Belanja Daerah Tahun 2015 dan Proyeksi 2016- 2017**

NO.	PELAKSANA / JENIS PUNGUTAN	APBD 2015	APBD 2016	Proyeksi 2017
1	2	3	4	5
	BELANJA DAERAH			
	BELANJA TIDAK LANGSUNG			
	Belanja Pegawai ( Bel. Tidak Langsung )	818,447,053,251	1,040,914,494,359	1,263,381,935,467
	Belanja Bunga	6,603,600,000	4,938,951,956	5.000.000.000
	Belanja Subsidi	-		9.000.000.000
	Belanja Hibah	45,274,828,729	22,611,511,500	22,611,511,500
	Belanja Bantuan Sosial	49,274,000,000	29,748,900	29,748,900.000
	Belanja Bantuan Keuangan	1,115,203,192	1,115,203,192	1,115,203,192
	Belanja Tidak Terduga	12,202,182,360	15,382,843,082	18,563,503,804
	<b>JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>932,916,867,532</b>	<b>1,084,992,752,989</b>	<b>1,319,791,902,863</b>
	BELANJA LANGSUNG			
	<b>JUMLAH BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1,105,630,661,497</b>	<b>1,257,914,726,353</b>	<b>2.155.629.643.181</b>
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	<b>2,038,547,529,029</b>	<b>2,342,907,479,342</b>	<b>3,466,421,546,044</b>

Sumber : BPKAD Kota Bogor dan Proyeksi Bappeda

Kebijakan belanja daerah tahun 2017 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:

- a. Efisiensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (*welfare state*) oleh karena

itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat.

- b. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan program pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel.
- c. Mengalokasikan anggaran untuk 6 (enam) prioritas Pembangunan yaitu:
  - 1) Penataan transportasi dan angkutan umum
  - 2) Penataan pelayanan persampahan dan kebersihan kota
  - 3) Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), dengan strategi
  - 4) Penataan ruang publik, pedestrian, taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
  - 5) Transformasi budaya dan reformasi birokrasi
  - 6) Penanggulangan Kemiskinan
- d. Meningkatkan anggaran untuk pendidikan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional harus mengalokasikan 20 %. Alokasi anggaran tidak termasuk untuk kegiatan yang belum selesai tahun sebelumnya, dalam upaya peningkatan indeks pendidikan yang meliputi Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah (AMH dan RLS).
- e. Meningkatkan alokasi anggaran untuk kesehatan, menuju 10% sesuai UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan guna peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka peningkatan indeks kesehatan masyarakat, terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak.
- f. Sesuai dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang pembangunan berkeadilan, yang bertujuan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan pencapaian target MDGs serta kebijakan pembangunan pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat.
- g. Mengalokasikan kebutuhan belanja *fixed cost*, *regular cost*, dan *variable cost* secara terukur dan terarah.
- h. Peningkatan efektivitas penggunaan dana PDPMK oleh masyarakat dalam mendukung kualitas pelayanan publik dan sinkronisasi implementasi antara rencana pembangunan Kota Bogor dengan masyarakat melalui kelurahan;
- i. Mengalokasikan anggaran untuk percepatan pembangunan Kota Bogor.

### **3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

#### **3.2.4.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Jika Pendapatan Daerah lebih kecil dari Belanja Daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang defisit dan harus ditutupi dengan Penerimaan Daerah. Jika Pendapatan Daerah lebih besar dari Belanja Daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang surplus dan harus digunakan untuk Pengeluaran Daerah. Oleh sebab itu, Pembiayaan Daerah terdiri Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.

Pembiayaan daerah tahun 2017, memperlihatkan bahwa penerimaan pembiayaan selama ini hanya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA). Besaran SiLPA yang relatif besar ini, terutama disebabkan melebihi target pendapatan dan efisiensi penggunaan anggaran. Besaran SiLPA dari kegiatan yang belum terlaksana ditargetkan/diupayakan terus menurun, sehingga disparitas antara perencanaan pendapatan dan belanja daerah dengan pelaksanaan semakin mengecil.

Kebijakan pembiayaan dirumuskan berdasarkan asumsi bahwa kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat akan berimplikasi

pada kemungkinan terjadinya defisit anggaran. Untuk itu perlu dilakukan antisipasi dan dapat ditempuh melalui:

- a. Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan semakin menurun sebagai akibat dari optimalnya perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan (rata-rata SiLPA diupayakan maksimum 5% dari APBD tahun sebelumnya).
- b. Penerimaan Pinjaman Daerah dari dalam maupun luar negeri atau dalam bentuk pinjaman lainnya digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik terutama pelayanan air minum.

Adapun pembiayaan tahun 2015-2016 dan target tahun 2017 penerimaan pembiayaan daerah sebagaimana tabel 3.9. dibawah ini :

**Tabel 3.9.**  
**Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah**  
**Tahun 2015 dan Proyeksi 2016 - 2017**

NO.	PELAKSANA / JENIS PUNGUTAN	APBD 2015	APBD 2016	Proyeksi 2017
1	2	3	4	5
	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH			
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya	211,539,255,101	254,500,000,000	82,997,651,000
	Pencairan Dana Cadangan			
	Penerimaan Pinjaman Daerah			
	Penerimaan Pengembalian Pinjaman Daerah			
	Penerimaan Piutang Daerah	936,048,000	936,048,000	936,048,000
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>212,475,303,101</b>	<b>255,436,048,000</b>	<b>83,933,699,000</b>

Sumber : BPKAD Kota Bogor dan Proyeksi Bappeda

### 3.2.4.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah meliputi penyertaan modal, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah dengan rincian sebagaimana tabel 3.10. berikut:

**Tabel 3.10.**  
**Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah**  
**Tahun Anggaran 2015 dan Proyeksi 2016 - 2017**

NO.	PELAKSANA / JENIS PUNGUTAN	APBD 2015	APBD 2016	Proyeksi 2017
1	2	3	4	5
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH			
	Pembentukan Dana Cadangan			-
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		42,519,390,000	42,519,390,000
	Pembayaran Pokok Utang			
	Pemberian Pinjaman Daerah	936,048,000	936,048,000	936,048,000
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>936,048,000</b>	<b>43,455,438,000</b>	<b>43,455,438,000</b>
	<b>PEMBIAYAAN NETO</b>	<b>211,539,255,101</b>	<b>211,980,610,000</b>	<b>40,478,261,000</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)</b>			

Sumber : BPKAD Kota Bogor dan Proyeksi Bappeda



## BAB IV

### PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Pembangunan Daerah tahun 2017 merupakan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2015-2019, yang menekankan pada diversifikasi pembangunan Kota Bogor menuju pemantapan perwujudan visi pembangunan secara menyeluruh, untuk mencapai Visi Pemerintah Kota Bogor Tahun 2015-2019 yaitu:

#### **“Kota Bogor yang Nyaman, Beriman dan Transparan”**

Untuk mempercepat pencapaian Visi Pemerintah Kota Bogor Tahun 2015-2019, ditetapkan 6 misi yang memiliki tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, sebagaimana tabel berikut:

1. Menjadikan Bogor kota yang cerdas dan berwawasan teknologi informasi dan komunikasi.

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>
1. Meningkatkan implementasi e-government	Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mempermudah pertukaran data dan informasi serta proses komunikasi antar unit pemerintah. Untuk itu, dibutuhkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang terintegrasi antar OPD.
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Meningkatkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam memberikan pelayanan publik sehingga pelayanan dapat diberikan secara <i>online</i> yang cepat, mudah dan transparan. OPD-OPD yang ada didorong mengembangkan pelayanan semacam ini melalui pembuatan dan operasionalisasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang terintegrasi.
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem informasi dan komunikasi	Meningkatkan akses terhadap internet dalam fungsi edukasi dan produktif di ruang

		publik, instansi pemerintah, dan lokasi strategis lainnya. Hal ini harus dibarengi dengan upaya <i>eliteracy</i> (melek internet) bagi masyarakat luas.
2. Menciptakan Lingkungan Belajar Dengan Modal Sosial yang Kuat	Berkembangnya minat baca dan belajar di masyarakat	Menyusun dan mengembangkan beragam fasilitas baca dan perpustakaan serta lokasi khusus pasar buku murah untuk mempermudah akses masyarakat terhadap bahan bacaan.
	Berkembangnya ruang kreasi, inovasi, dan berbagi untuk masyarakat	Menyediakan ruang dan aktivitas yang dapat menumbuhkan aktivitas kreatif dan inovatif
3. Mendorong Pengambilan Keputusan yang Cerdas	Proses Publik Meningkatnya partisipasi masyarakat yang berkualitas dalam perencanaan pembangunan	Mengembangkan sistem perencanaan dan pembangunan yang meningkatkan kepedulian dan partisipasi publik terutama dalam proses pembangunan formal strategis
	Meningkatnya partisipasi masyarakat yang berkualitas dalam pelaksanaan pembangunan	Perhatian perlu diberikan pada fenomena "kelelahan berpartisipasi" ( <i>participation fatigue</i> ),
	Meningkatnya pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dalam proses pembangunan	dimana masyarakat jenuh untuk berpartisipasi akibat implementasi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Fenomena ini dapat diminimalkan melalui sedikitnya dua cara yaitu (i) kejelasan anggaran yang disediakan, dan (ii) integrasi antara hasil Musrenbang Kelurahan, Kecamatan, dan Kota.
	Tersedianya <i>baseline</i> data yang kuat, akurat dan mutakhir	Membangun sistem basis data antar instansi secara akurat dan terintegrasi yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan kebijakan

		<p>publik yang andal. <i>Baseline</i> data ini harus diperankan sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan (<i>decision supporting system</i>) sehingga harus dapat menyajikan berbagai indikator pembangunan seperti pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Utama (IKU). Selain itu, perlu dikembangkan mekanisme untuk mengoptimalkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagai bagian dari <i>baseline</i> data dan <i>decision supporting system</i>.</p>
4. Mengembangkan Kualitas dan Pemerataan Akses Pendidikan Dalam Upaya Mencetak Generasi Muda yang Tangguh dan Berkompeten	Berkembangnya kegiatan pendidikan yang mendukung kompetensi dan karakter	Mengembangkan pola pendidikan yang berlandaskan pada nilai dan karakter disamping muatan akademik dan keterampilan. Selain nilai dan karakter yang bersifat universal, nilai dan karakter lokal juga perlu diperkuat sebagai tercermin dalam budaya dan kearifan tradisional yang ada.
	Meningkatnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan formal, non formal dan informal	Memeratakan akses pendidikan dan memenuhi standar kualifikasi pendidik dan lembaga pendidikan sehingga mampu mendorong lingkungan pendidikan yang lebih berkualitas
	Terciptanya generasi muda yang berprestasi	Memberikan pembinaan dan insentif dalam peningkatan prestasi kualitas pemuda dalam beragam bidang.

2. Menjadikan Bogor kota yang sehat dan makmur

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>
1. Meningkatkan Kesadaran Dan Kemampuan Masyarakat Untuk Hidup Dan Berperilaku Sehat	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan	Mengembangkan program untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap fasilitas kesehatan. Berbagai program ini haruslah inheren dengan program nasional khususnya BPJS.
	Menurunnya kasus penyakit menular	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui perbaikan kualitas kesehatan keluarga dan penurunan penyakit menular
	Meningkatnya kualitas kesehatan individu dan keluarga	Meningkatkan dan memperbaiki kualitas kesehatan individu dan keluarga dengan pengembangan program-program KB, dan program-program yang mengarah pada perbaikan kesehatan kelompok perempuan, anak, remaja, dan lansia.
	Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai perilaku bersih dan sehat bagi diri sendiri dan lingkungannya	Mengembangkan program yang secara kontinyu memberikan perubahan kesadaran dan perilaku kesehatan masyarakat
2. Meningkatkan Kualitas Permukiman	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pengelolaan air limbah yang layak	Menciptakan standar dan mengembangkan kualitas permukiman yang sehat melalui perbaikan kualitas sanitasi, <i>redesign</i>
	Berkurangnya kawasan permukiman kumuh	permukiman kumuh, dan akses terhadap air minum yang layak.
	Tersedianya pelayanan air minum yang memadai	
3. Merevitalisasi Ruang Perkotaan yang Lebih Sehat dan Nyaman untuk Semua Elemen Masyarakat (Termasuk Anak, Perempuan, Lansia, Dan Difabel)	Meningkatnya jumlah dan kualitas taman-taman kota sebagai ruang publik yang sehat, asri, aman, dan ramah pengguna	Merevitalisasi taman-taman kota dengan peremajaan dan pemeliharaan tanaman, dan pengadaan fasilitas yang ramah anak, lansia, dan difabel. Selain itu, juga diupayakan
4.		

	<p>Terpenuhinya kebutuhan kelompok berkebutuhan khusus di ruang publik</p>	<p>penambahan taman-taman baru sehingga taman sebagai ruang publik dapat diakses secara lebih luas oleh masyarakat. Untuk itu pembangunan taman akan lebih mengutamakan pada perencanaan berbasis masyarakat. Hal ini dilakukan selain untuk menguatkan karakter Kota Bogor, juga dalam rangka pengayaan dan pemeliharaan jangka panjang taman-taman kota</p>
<p>5. Meningkatkan Ketahanan Kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</p>	<p>Tertangani dan terfasilitasinya kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</p>	<p>Menertibkan dan membina PMKS sehingga menjadi warga yang lebih produktif dan mandiri melalui beragam lembaga sosial yang ada serta program-program jangka pendek yang menekankan pada pembentukan mental hidup.</p>
	<p>Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan kualitas hidup warga miskin</p>	<p>Melakukan pembinaan terhadap kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), sehingga menjadi warga yang lebih produktif dan mandiri melalui beragam lembaga sosial yang ada serta program-program jangka pendek yang menekankan pada peningkatan taraf hidup warga miskin dan kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).</p>
	<p>Terwujudnya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan</p>	<p>Menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak melalui pembinaan, pengembangan sarana pengaduan serta penindakan yang tegas terhadap pelaku kekerasan</p>

6. Meningkatkan Produktifitas dan Akses Masyarakat Terhadap Penghidupan yang Layak	Meningkatnya kegiatan perekonomian dan aksesibilitas masyarakat terhadap lapangan pekerjaan yang produktif	Mengembangkan sistem ketenagakerjaan terpadu melalui pengembangan keterampilan dan mental wirausaha serta sistem informasi kerja yang <i>up-to-date</i> dan iklim bekerja
	Meningkatnya jiwa kewirausahaan dan iklim yang kondusif untuk berkreasi dan berusaha di masyarakat	
	Berkembangnya Agribisnis perkotaan	Mengembangkan pertanian dengan memanfaatkan lahan pertanian yang produktif untuk komoditas tanaman hias, ikan hias, dan pengembangan produk olahan
	Terjaminnya kualitas dan kebutuhan pangan masyarakat	Meningkatkan ketersediaan bahan pangan

### 3. Menjadikan Bogor kota yang berwawasan lingkungan

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>
1. Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang	Tersusunnya kebijakan penataan ruang yang berwawasan lingkungan	Mengimplementasikan penataan ruang secara tegas dengan
	Meningkatnya implementasi rencana tata ruang dan kendali terhadap pemanfaatan ruang	mengembalikan kenyamanan Kota Bogor melalui peran serta masyarakat dalam pengendalian
	Meningkatnya luasan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota	Membebaskan sempadan sungai atau sumber air lainnya dan memanfaatkan aset yang belum dioptimalkan serta mengoptimalkan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) eksisting.
	Tertatanya Pedagang Kaki Lima (PKL) serta pasar tradisional	Menciptakan ruang ekonomi yang memfasilitasi ekonomi tradisional dan pentaan Pedagang Kaki Lima (PKL).
2. Meningkatkan Kualitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Kota	Menurunnya tingkat pencemaran akibat aktivitas perkotaan	Mengimplementasikan regulasi standar kualitas pencemaran yang diiringi dengan perubahan sistem kota yang lebih ramah lingkungan

	Meningkatnya upaya pemulihan dan konservasi sumber daya alam	Memulihkan dan konservasi sumber daya alam dengan prioritas pada sumber air baku.
	Terwujudnya penataan dan pelestarian Daerah Aliran Sungai (DAS)	Mewujudkan kota <i>riverfront</i> melalui sterilisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dari aktivitas budidaya yang mengganggu. Memperlakukan dua sungai utama yang melalui Kota Bogor yaitu Ciliwung dan Cisadane sebagai <i>ecoregion</i> sehingga pengelolaannya harus dilaksanakan secara lintas daerah.
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan	Mewujudkan kota yang lebih ramah lingkungan dengan menekankan pada perubahan kesadaran dan perilaku masyarakat melalui pendidikan formal dan pembinaan secara kontinyu.
3. Mengembangkan Transportasi Kota yang Mengutamakan Angkutan Umum Massal, Pejalan Kaki dan Pesepeda	Terwujudnya sistem angkutan umum kota yang nyaman dan ramah lingkungan	Mewujudkan sistem pergerakan yang efisien dan ramah lingkungan yang berdasarkan pada sistem angkutan massal yang memadai
	Meningkatnya kualitas sarana prasarana pejalan kaki dan pengguna sepeda	Peningkatan kenyamanan dalam berjalan kaki yang ramah bagi setiap kalangan. Model sarana pedestrian ideal yang dikembangkan bersama Program <i>Sustainable Urban Transport Improvement Project</i> (SUTIP GIZ) akan menjadi percontohan untuk dikembangkan selanjutnya. Pengembangan jalur pesepeda akan dimulai pada koridor jalan utama yang telah ada, kemudian dalam proses evaluasi akan dikembangkan jalur lain yang memadai.

	Berkurangnya kemacetan	Menargetkan pengurangan jumlah kendaraan pribadi dengan meningkatkan pelayanan angkutan umum yang memadai disertai dengan evaluasi dan pengembangan kawasan parkir. Pengadaan gedung parkir pada pusat kota akan memanfaatkan pada akuisisi lahan dan land banking
4. Mendorong Pembangunan Kota yang Tanggap Risiko Bencana dan Dampak Perubahan Iklim	Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Mewujudkan masyarakat dan pemerintah yang siap-tanggap dalam menghadapi bencana di beberapa daerah
	Meningkatnya tanggap darurat saat bencana	prioritas. Selain itu, menjadikan Kota Bogor sebagai bagian dari komunitas internasional yang secara bersama-sama mengurangi pemanasan global diantaranya melalui penghijauan kota, <i>green building</i> , dan partisipasinya dalam berbagai kampanye seperti <i>Earth Hour</i> .
	Meningkatnya pemulihan pasca bencana	
	Meningkatnya pengelolaan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim	
5. Menerapkan Pengelolaan Sampah yang Terpadu dan Berkelanjutan	Meningkatnya pelayanan persampahan	Meningkatkan pelayanan sampah melalui kerjasama antardaerah untuk Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) yang menerapkan sistem <i>sanitary landfill</i> serta pelayanan pengangkutan sampah.
	Meningkatnya Pengelolaan Sampah Berbasis 3R ( <i>Reduce, Reuse, Recycle</i> )	Mereduksi jumlah sampah yang diangkut melalui upaya 3R ( <i>Reuse Reduce Recycle</i> ) yang didasarkan pada penerapan teknologi dan perubahan kesadaran dan perilaku masyarakat khususnya di tingkat rumah tangga, RT, RW dan kelurahan. Maka dalam penenerapan budaya di masyarakat,
	Internalisasi pengelolaan sampah sebagai bagian dari budaya hidup masyarakat	



		peran dan kewenangan kecamatan akan lebih ditingkatkan. Pengembangan bank sampah dapat dikerjasamakan dengan pihak pemulung dengan memulai pada wilayah percontohan yang ditentukan.
--	--	---

4. Menjadikan Bogor sebagai kota jasa yang berorientasi pada kepariwisataan dan ekonomi kreatif

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>
1. Menjadikan Warisan Budaya Sebagai Aset Kota	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan warisan budaya	Mendorong keaktifan beragam organisasi dan lembaga dalam kegiatan pelestarian budaya baik yang bendawi maupun non bendawi
	Terpeliharanya kelestarian warisan budaya	Memperkuat upaya pelestarian warisan budaya melalui pembuatan regulasi, kemitraan antar pihak, dan sarana prasarana pendukung khususnya di kawasan cagar budaya
	Tersedianya kebijakan/peraturan daerah yang mengatur warisan budaya	
2. Memperkuat Identitas dan Citra Kota Bogor ( <i>City Branding</i> )	Meningkatnya fungsi kawasan penyangga kebun raya secara fisik, visual dan ekologis	Menguatkan fungsi Kebun Raya Bogor (KRB) sebagai pusat identitas Kota Bogor melalui perencanaan kawasan penyanggannya
	Diterapkannya konsep perencanaan kota ( <i>urban design</i> ), termasuk <i>street furniture</i> , yang meningkatkan citra kota	Membangun beragam tapak di Kota Bogor melalui konsep dan rancangan kota yang jelas dan mendukung imaji kota yang berdasarkan pada panduan rancang kota dan <i>City Branding</i>
	Dijadikannya Bogor sebagai pusat pengetahuan dan penelitian bidang pertanian dan botani	Mengaktifkan kembali potensi penelitian dan peningkatan pengetahuan pertanian dan botani Kota Bogor melalui kerjasama dalam negeri dan luar negeri.
	Tumbuh berkembangnya aktivitas MICE ( <i>Meeting, Incentives,</i>	Memfasilitasi berkembangnya aktivitas MICE dengan

	<i>Conferences/ Convention, Exhibitions/ Events)</i>	menerapkan regulasi yang tegas, membangun infrastruktur MICE berskala internasional, dan mendorong sertifikasi hotel dalam batas-batas yang dikendalikan sehingga tidak kontraproduktif terhadap sisi kenyamanan kota.
3. Mengembangkan Pariwisata Kota Bogor yang Berkarakter	Berkembangnya destinasi wisata	Mengembangkan industri pariwisata yang terintegrasi antara pengembangan paket, dengan sarana prasarana, promosi dan pemasaran pariwisata.
	Meningkatnya peran kelembagaan pariwisata	
4. Mengembangkan Iklim Ekonomi Kreatif	Terciptanya iklim industri kreatif	Menginisiasi penciptaan iklim yang kondusif bagi ekonomi kreatif melalui penciptaan ruang kreatif, pembinaan SDM kreatif, dan kemitraan sebagai sarana transfer pengetahuan dan praktikal melalui tahapan berikut: 1. <i>Creative-waves</i> , yaitu menciptakan gelombang kreatifitas; 2. <i>Creative-network</i> , yaitu membangun jejaring sesama pelaku ekonomi kreatif; 3. <i>Creative-preneur</i> , yaitu membangun orang-orang kreatif sebagai wirausahawan
	Terjalannya kemitraan antar pelaku industri kreatif	
	Terciptanya SDM yang kreatif dan wirausahawan kreatif	Dibutuhkan model <i>triple-helix</i> dalam pengembangan ekonomi kreatif, ialah pelibatan tiga pihak utama meliputi pemerintah, pebisnis, dan kaum intelektual. Hanya saja, intervensi pemerintah perlu dilakukan secara hati-hati dan terukur mengingat kreatifitas justru bisa tenggelam oleh intervensi yang bersifat keproyekan

5. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan transparan

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>
1. Mempercepat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Membangun pemerintahan yang berintegritas dengan perbaikan kinerja keuangan dan akuntabilitas melalui komitmen terhadap pemberantasan korupsi dan standarisasi kompetensi jabatan
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Memperkuat relasi pemerintah dan masyarakat melalui perbaikan kualitas pelayanan publik dan penyediaan informasi publik secara lebih mudah dan terbuka
	Meningkatnya pemenuhan hak masyarakat akan informasi publik	
2. Meningkatkan Koordinasi dan Kerja Sama Antar Daerah dan Internasional	Terbangunnya kesepahaman bersama antar daerah mengenai isu-isu lintas wilayah dalam bidang ekonomi dan pengembangan wilayah, pelayanan publik, serta lingkungan hidup	Memperkuat kerjasama antar daerah dalam pembangunan dalam bidang - bidang prioritas. Selain itu, kerja sama ini juga dilakukan dalam rangka menguatkan posisi Kota Bogor dalam Konstelasi Jabodetabek-punjur
	Menguatnya kelembagaan kerja sama antar daerah dan internasional	
3. Meningkatkan Sinergitas Antara Pemerintah Kota Dengan Elemen Masyarakat	Meningkatnya event-event yang memunculkan ikatan dan kecintaan antara warga dan kotanya	Memfasilitasi interaksi antara kota dengan masyarakat dan komunitas melalui beragam kegiatan yang melibatkan pemerintah dan masyarakat didalamnya. Sebagai contoh diantaranya adalah Lomba Mulung

		di Ciliwung Antar Kelurahan yang dilakukan setiap Hari Jadi Kota Bogor.
	Terfasilitasinya organisasi, komunitas dan sejenisnya yang memiliki fokus terhadap pembangunan kota	
	Optimalisasi keberadaan dan peran serta berbagai perguruan tinggi, perusahaan swasta, BUMN, BUMD dan lembaga swadaya masyarakat setempat dalam pembangunan kota Bogor	Menggunakan kajian dan kepakaran IPTEK dan inovasi perguruan tinggi dan LSM kompeten dalam pengambilan kebijakan pembangunan
	Tersedianya ruang bagi elemen warga untuk turut memberi pertimbangan dalam segala pengambilan kebijakan mengenai pembangunan kota	Memfasilitasi terbentuknya Dewan Kota atau nama lain sebagai sarana peningkatan proses partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik strategis
4. Memperkuat Perundang-undangan Daerah	Tersusunnya perundang-undangan daerah yang sinkron dan sinergis	Menyusun peraturan perundang-undangan yang tidak tumpang tindih melalui harmonisasi perundang-undangan daerah
	Harmonisnya perundang-undangan daerah	
	Tegaknya perundang-undangan daerah	Menegakkan peraturan perundang-undangan daerah, terutama untuk menjaga ketertiban dan keamanan, kenyamanan, dan konsistensi tata ruang.

6. Mengkokohkan peran moral agama dan kemanusiaan untuk mewujudkan masyarakat madani.

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>
1. Meningkatkan Integrasi Nilai-Nilai Agama dan Kemanusiaan Dalam Implementasi Kehidupan	Digunakannya nilai-nilai agama dan kemanusiaan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari	Mengimplementasikan nilai agama dan kemanusiaan untuk meningkatkan kualitas nilai kehidupan. Hal ini terekspresikan dalam penurunan kriminalitas dan penyakit masyarakat

2. Mendorong Harmonisasi dan Kerukunan Antar Umat Beragama	Terselenggaranya aktivitas lintas agama	Mewujudkan pemahaman antar umat beragama melalui dialog dan aktivitas rutin antar agama untuk menurunkan potensi konflik horizontal.
	Terdeteksi dan tertanganinya potensi permasalahan antar umat beragama	Mengembangkan deteksi dini dalam potensi konflik dengan melakukan intermediasi dan pencerdasan publik melalui media
3. Mendorong Peran Lembaga-Lembaga Agama dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Meningkatkan Kualitas Kehidupan Umat	Meningkatnya peran lembaga agama dan organisasi kemasyarakatan dalam aktivitas pembangunan masyarakat	Memfasilitasi lembaga keagamaan dan kemasyarakatan untuk berkontribusi dalam pembangunan khususnya pemberantasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi rakyat, diantaranya melalui pemanfaatan zakat atau bentuk-bentuk dana umat lainnya. Termasuk didalam lembaga keagamaan tersebut adalah lembaga penyelenggara pendidikan seperti Diniyah Takmiliyah dengan kontribusinya pada pembangunan sumber daya manusia dan karakter.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor Tahun 2011-2031 menetapkan Wilayah Pengembangan (WP), dan Sub Wilayah Pengembangan (SWP) ditetapkan dengan pertimbangan adanya batasan fisik, batasan administrasi, kesesuaian karakteristik alam dan pemanfaatan lahan, kesamaan tipologi penanganan, kesatuan cakupan pelayanan dan posisinya dalam struktur kota. WP A disebut juga dengan wilayah pusat kota; Pembagian Rencana Pengembangan WP dan SWP adalah sebagai berikut :

- a. WP A disebut juga dengan wilayah pusat kota, ditetapkan sebagai berikut :
  1. Pengendalian perkembangan kegiatan perdagangan jasa skala kota dan regional di sepanjang koridor jalan utama seperti Jalan Raya Pajajaran, Jalan Ir.H.Juanda, Jalan Suryakencana, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Kapten Muslihat, Jalan Merdeka, Jalan MA Salmun, Jalan Dewi Sartika, Jalan Nyi Raja Permas, Jalan Mayor Oking, dan Jalan Pahlawan;

2. Revitalisasi kawasan Stasiun Kereta Api Bogor, Taman Topi dan Taman Ade Irma Suryani, Pasar Kebon Kembang, Kawasan Jembatan Merah, serta Kawasan Pasar Bogor dan sekitarnya
  3. Peremajaan kawasan permukiman padat tidak teratur, terutama yang berlokasi pada bantaran Sungai Ciliwung, Sungai Cisadane dan Sungai Cipakancilan dengan mengembangkan perumahan vertikal dengan KDB rendah dan perbaikan kualitas lingkungan permukiman; dan
  4. Mengembangkan RTH sesuai hirarki pelayanan
- b. WP B terdiri dari 2 SWP yaitu SWP B1 dan SWP B2;
1. Pengendalian perkembangan kegiatan perdagangan jasa skala kota dan regional terutama di sepanjang Jalan Mayjen Ishak Djuarsa, Jalan Letjen Ibrahim Adjie, Jalan RE Abdullah, Jalan Aria Surialaga, Jalan Ciomas Raya dan Jalan Abdullah Bin Muhammad Nuh serta rencana jalan *inner ring road*;
  2. Pengembangan kegiatan perdagangan jasa serta pembangunan prasarana sarana dan utilitas skala WP dan skala kota di sub pusat kota;
  3. Perlindungan kawasan lindung Situ Gede dan hutan kota CIFOR dari gangguan kegiatan yang dapat mengurangi fungsi lindung kawasan ini;
  4. Mempertahankan luasan lahan pertanian kota;
  5. Mengarahkan dan mengendalikan perkembangan perumahan agar tetap berkepadatan sedang dan rendah;
  6. Membatasi meluasnya perkembangan perumahan kepadatan tinggi yang horizontal dan meremajakan dengan konsep perumahan vertikal dengan KDB rendah; dan
  7. Mengembangkan RTH sesuai hirarki pelayanan
- c. WP C terdiri dari 4 SWP yaitu SWP C1, SWP C2, SWP C3, SWP C4;
1. Mengendalikan perkembangan kegiatan perdagangan jasa skala kota dan regional terutama di sepanjang Jalan Sholeh Iskandar dan Jalan Abdullah Bin M.Nuh;
  2. Mendorong perkembangan kegiatan perdagangan jasa serta pembangunan prasarana sarana dan utilitas skala kota dan WP di pusat WP C;
  3. Mengarahkan dan mengendalikan perkembangan perumahan kepadatan sedang serta mengupayakan pepaduserasian perencanaan pembangunan perumahan dengan wilayah sekitarnya; dan
  4. Mengembangkan RTH sesuai hirarki pelayanan.
- d. WP D terdiri dari 4 SWP yaitu SWP D1, SWP D2, SWP D3, SWP D4;
1. Mengendalikan perkembangan kegiatan perdagangan jasa skala kota dan regional terutama di sepanjang Jalan Raya Pajajaran, Jalan KS. Tubun, Jalan Adnawijaya, Jalan Achmad Sobana, Jalan Raya Pemda, Jalan Pangeran Sogiri serta rencana jalan-jalan kolektor baru;
  2. Mendorong perkembangan kegiatan perdagangan jasa serta pembangunan prasarana sarana dan utilitas skala kota dan WP di pusat WP D;
  3. Mengarahkan dan mengendalikan perkembangan perumahan kepadatan sedang serta mengupayakan pepaduserasian perencanaan pembangunan perumahan dengan wilayah sekitarnya;

4. Membatasi meluasnya perkembangan perumahan kepadatan tinggi yang horizontal dan meremajakan dengan konsep perumahan vertikal dengan KDBrendah; dan
  5. Mengembangkan RTH sesuai hirarki pelayanan
- e. WP E terdiri dari 4 SWP yaitu SWP E1, SWP E2, SWP E3, SWP E4
1. Mengendalikan perkembangan kegiatan perdagangan jasa skala kota dan regional terutama di sepanjang Jalan Raya Tajur, rencana jalan R3, rencana jalan *inner ring road*, Jalan Katulampa, dan Jalan Cikaret;
  2. Membatasi perkembangan perumahan melalui penetapan kawasan perumahan dengan KDB rendah;
  3. Melindungi kawasan resapan air dan mengembangkan RTH sesuai hirarki pelayanan;
  4. Mengembangkan ekowisata;
  5. Mengembangkan sarana umum skala kota; dan
  6. Mengembangkan RTH sesuai hirarki pelayanan

#### 4.2. Prioritas Pembangunan Daerah.

Penetapan prioritas pembangunan daerah bertujuan untuk menfokuskan rencana pembangunan di Kota Bogor dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan Kota Bogor sesuai dengan indikator kinerja pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019. Prioritas pembangunan daerah Tahun 2017 dirumuskan berdasarkan isu strategis dan target indikator pembangunan Kota Bogor Tahun 2017.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Penetapan isu strategis didasarkan pada situasi dan kondisi yang akan dihadapi pada Tahun 2017, serta mempertimbangkan hasil evaluasi pembangunan dan pencapaian indikator pembangunan Tahun sebelumnya.

##### 4.2.1 Indikator Makro Ekonomi

Capaian Kinerja Pembangunan Tahun 2014-2015 dan Proyeksi Indikator Pembangunan Tahun 2016-2017 dijelaskan pada tabel 4.1

**Tabel 4.1**  
**Realisasi Tahun 2014 dan Proyeksi Indikator Makro Kota Bogor**  
**Tahun 2015-2017**

Indikator	Tahun			
	2014	2015	*2016	**2017
Jumlah Penduduk (jiwa)	1.030.720	1.047.903	1.064.700	1,082,800
Laki-laki	523.479	532,216	540.615	549,805
Perempuan	507.241	515,687	524.085	532,994
Jumlah Rumah Tangga	253.934	258.167	262.305	266.764
Kepadatan Penduduk (per Km <sup>2</sup> )	8.698	8.843	8.985	9.375
Tingkat Kemiskinan (%)	8,86	8,30	8,19	8,08

Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,75	1,89	1,89	1,7
Pengangguran terbuka (%)	9,33	8,44	7,64	6,91
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,97	6,26	6,36	6,46
PDRB (Atas Dasar Harga Berlaku)	21.285.360,45	21,700.000,00	23,000.000,00	24,300.000.000
Jumlah Investasi (Juta Rp)	2.800.642.264.788	2.100.000.000.000	2.205.000.000.000	2.315.000.000.000
Inflasi (%)	6,83	4,05	4,05	4,05

Sumber : BPS Kota Bogor tahun 2015 dan proyeksi RPJMD 2015-2019

#### 4.2.2 Proyeksi IPM

Untuk proyeksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bogor tahun 2015 – 2017, sesuai dengan acuan yang telah ditetapkan oleh BPS, maka perhitungan Indeks Pembangunan Manusia Kota Bogor mempergunakan metode baru dengan rincian proyeksi sebagaimana tabel 4.2 dan grafik 4.1 berikut:

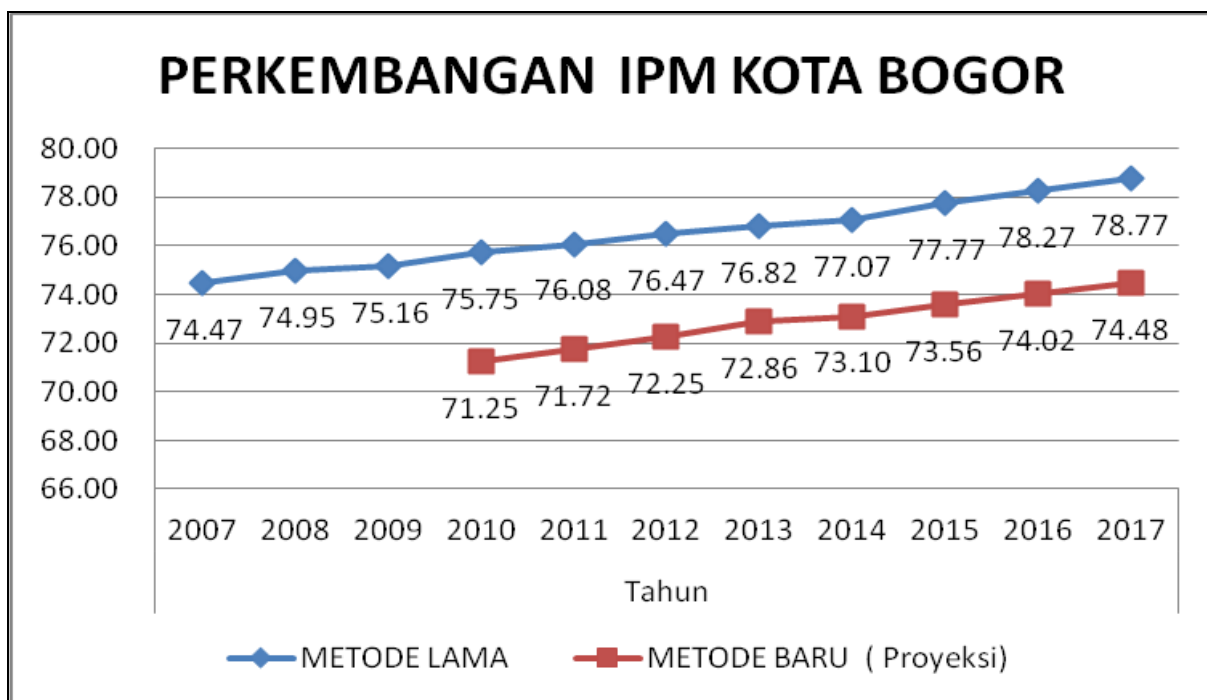
**Tabel 4.2**  
**Target IPM Kota Bogor Metode Baru Tahun 2015-2017**

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
IPM	<b>73.56</b>	<b>74.02</b>	<b>74.48</b>
a. Indeks Pendidikan	68.31	69.29	70.27
• Angka Harapan Lama Sekolah - HLS ( <i>Expected Years of Schooling -EYS</i> )	68.67	69.38	70.09
• Rata-rata Lama Sekolah - RLS ( <i>Mean Years of Schooling - MYS</i> )	10.19	10.38	10.57
•			
b. Indeks Kesehatan	80.91	80.92	80.94
- Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)	72.59	72.60	72.61
-			
c. Indeks Daya Beli	71.85	71.98	72.10
- Pengeluaran/kapita/tahun (Rp)	10,628,443	10,724,545	10,820,648

Sumber : Proyeksi Bappeda



**Grafik 4.1**  
**Perkembangan IPM Kota Bogor, menggunakan Metode Lama dan Metode Baru, Realisasi Tahun 2007- 2014 dan Proyeksi Tahun 2015-2017**



#### 4.2.3 Prioritas pembangunan

- 1) Penataan transportasi dan angkutan umum, dengan 5 program;
- 2) Penataan pelayanan persampahan dan kebersihan kota, dengan 4 program;
- 3) Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), dengan 2 program;
- 4) Penataan ruang publik, pedestrian, taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan 2 program;
- 5) Transformasi budaya dan reformasi birokrasi, dengan 13 program;
- 6) Penanggulangan Kemiskinan, dengan dukungan 20 program.

#### 4.2.4 Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi pembangunan Kota Bogor 2015-2019 berjumlah 159 program yang terbagi ke dalam 26 urusan wajib dan 5 urusan pilihan, adalah sebagai berikut :

##### Urusan Wajib

##### 1) Pendidikan

- a. Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
- c. Pendidikan Menengah
- d. Manajemen Layanan Pendidikan
- e. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- f. Pendidikan Non-Formal

##### 2) Kesehatan

- a. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
- b. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
- c. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

- d. Upaya Kesehatan Masyarakat
- e. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
- f. Perbaikan Gizi Masyarakat
- g. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- h. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
- i. Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- j. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- k. Pengembangan Lingkungan Sehat
- l. Pengawasan Obat dan Makanan
- m. Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

### 3) **Lingkungan Hidup**

- a. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- b. Perbaikan, Optimalisasi, Operasional dan Pemeliharaan Fungsi TPA
- c. Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R
- d. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- e. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- f. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- g. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth)
- h. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
- i. Kemitraan Lingkungan Hidup

### 4) **Pekerjaan Umum**

- a. Pembangunan Jalan dan Jembatan
- b. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- c. Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong
- d. Pembangunan Prasarana Pedestrian dan Pesepeda
- e. Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
- f. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
- g. Penguatan Kebijakan dan Regulasi Kebinamargaan
- h. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
- i. Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
- j. Pengendalian Banjir
- k. Pembangunan Dan Pengelolaan Sistem Informasi/Data Base Sumber Daya Air
- l. Penguatan Kebijakan dan Regulasi Sumber Daya Air
- m. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
- n. Tanggap Darurat Bencana Daerah
- o. Pemulihan Pasca Bencana

### 5) **Penataan Ruang**

- a. Perencanaan Tata Ruang
- b. Pemanfaatan Ruang
- c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- d. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang

### 6) **Perencanaan Pembangunan**

- a. Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencan
- b. Perencanaan Sarana Prasarana Kota
- c. Kerja Sama Pembangunan

- d. Perencanaan Pembangunan Daerah
  - e. Perencanaan Pembangunan Ekonomi
  - f. Pengembangan Data dan Informasi
  - g. Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana
  - h. Perencanaan Sosial Budaya
  - i. Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
- 7) Perumahan**
- a. Lingkungan Sehat Perumahan
  - b. Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
  - c. Pengelolaan Areal Pemakaman
  - d. Peningkatan Utilitas Perkotaan
  - e. Penataan dan Pengaturan Bangunan Gedung
  - f. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan Jasa Konstruksi
- 8) Kepemudaan dan Olahraga**
- a. Peningkatan Peran serta kepemudaan
  - b. Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
  - c. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
  - d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
- 9) Penanaman Modal**  
Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
- 10) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**
- a. Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
  - b. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
  - c. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
  - d. Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- 11) Kependudukan dan Catatan Sipil**  
Penataan administrasi kependudukan
- 12) Ketenagakerjaan**
- a. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
  - b. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
  - c. Peningkatan Kesempatan Kerja
- 13) Ketahanan Pangan**  
Peningkatan Ketahanan Pangan
- 14) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
- a. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
  - b. Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
  - c. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- 15) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**
- a. Kesehatan Reproduksi Remaja
  - b. Keluarga Berencana
  - c. Peningkatan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

- 16) Perhubungan**
- a. Peningkatan Pelayanan Angkutan
  - b. Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Jasa Transportasi
  - c. Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi
  - d. Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi
  - e. Pengembangan Transportasi Ramah Lingkungan
- 17) Komunikasi dan Informatika**
- a. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
  - b. Kerjasama Informasi dengan Media Massa
  - c. Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
- 18) Pertanahan**  
Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
- 19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**
- a. Pengembangan Wawasan Kebangsaan
  - b. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
  - c. Pendidikan Politik Masyarakat
  - d. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
  - e. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
- 20) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian**
- a. Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - b. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - e. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
  - f. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
  - g. Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah
  - h. Pengendalian Pembangunan
  - i. Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Pemerintah Daerah
  - j. Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah
  - k. Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan
  - l. Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
  - m. Pemberdayaan Lembaga Sosial
  - n. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
  - o. Penataan Tata Laksana
  - p. Penataan dan Penguatan Organisasi
  - q. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
  - r. Penerapan Reformasi Birokrasi
  - s. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
  - t. Pembinaan dan Penataan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan
  - u. Kerjasama Pembangunan
  - v. Penataan Peraturan Perundang-undangan
  - w. Penegakan Hukum dan Penerapan HAM
  - x. Penelitian Pengembangan
  - y. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
  - z. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

- 21) Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan**
- Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan
  - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan
  - Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan
  - Peningkatan Kreativitas Masyarakat
  - Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
  - Pembinaan dan Penataan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan
- 22) Sosial**
- Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya
  - Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
  - Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
  - Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, psk, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
  - Pembinaan Anak Terlantar
  - Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
  - Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
  - Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- 23) Kebudayaan**
- Pengembangan Nilai Budaya
  - Pengelolaan Kekayaan Budaya
  - Pengelolaan Keragaman Budaya
  - Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
- 24) Statistik**  
Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
- 25) Kearsipan**
- Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
  - Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah
- 26) Perpustakaan**
- Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
  - Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

## **Urusan Pilihan**

- 1) Pertanian**
- Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perikanan
  - Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan serta Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal
  - Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Peternakan dan Perikanan
  - Peningkatan Kesejahteraan Petani
- 2) Perindustrian**
- Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
  - Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
  - Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
- 3) Perdagangan**
- Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

- b. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- c. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

**4) Pariwisata**

- a. Pengembangan Destinasi Pariwisata
- b. Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- c. Pengembangan Kemitraan

**5) Ketransmigrasian**

- a. Pembinaan dan Penempatan Transmigrasi

**4.2.5 Prioritas Kecamatan**

Rencana Program dan Kegiatan diwilayah Kecamatan merupakan rencana pembangunan yang didasarkan pada keberadaan potensi unggulan di setiap Wilayah Kecamatan, yang berpedoman pada hasil Musrenbang Tingkat Kota Bogor Tahun 2017, yaitu:

**1) Kecamatan Bogor Utara**

- a. Rehab Kantor Kecamatan Bogor Utara
- b. Rehabilitasi Kantor Kelurahan Bantarjati (lanjutan), Cimahpar serta gedung PKK Kelurahan Tanah Baru
- c. Seleksi Tilawatil Qur'an
- d. Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
- e. Musrenbang Tingkat Kecamatan
- f. Pembinaan pengelolaan persampahan
- g. Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (PKK)
- h. Penataan PKL di Jalan Lingkungan
- i. Penanggulangan/penanganan darurat bencana
- j. Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan (Perizinan dan Non Perizinan, HO, IMB, IUMK)

**2) Kecamatan Bogor Barat**

- a. Pembangunan Kantor Kecamatan (lanjutan)
- b. Rehabilitasi Kantor Kelurahan Semplak, Loji .Gunungbatu , Curug Mekar dan Pasir Kuda
- c. Seleksi Tilawatil Qur'an
- d. Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
- e. Musrenbang Tingkat Kecamatan
- f. Pembinaan pengelolaan persampahan
- g. Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (PKK)
- h. Penataan PKL di Jalan Lingkungan
- j. Penanggulangan/penanganan darurat bencana
- k. Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan (Perizinan dan Non Perizinan, HO, IMB, IUMK)

**3) Kecamatan Tanah Sareal**

- a. Seleksi Tilawatil Qur'an
- b. Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
- c. Musrenbang Tingkat Kecamatan
- d. Pembinaan pengelolaan persampahan
- e. Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (PKK)
- f. Penataan PKL di Jalan Lingkungan

- g. Penanggulangan/penanganan darurat bencana
- h. Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan (Perizinan dan Non Perizinan, HO, IMB, IUMK)

**4) Kecamatan Bogor Selatan**

- a. Rehabilitasi Kantor Kelurahan Bondongan, Muarasari dan Pakuan,
- b. Seleksi Tilawatil Qur'an
- c. Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
- d. Musrenbang Tingkat Kecamatan
- e. Pembinaan pengelolaan persampahan
- f. Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (PKK)
- g. Penataan PKL di Jalan Lingkungan
- h. Penanggulangan/penanganan darurat bencana
- i. Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan (Perizinan dan Non Perizinan, HO, IMB, IUMK)

**5) Kecamatan Bogor Tengah**

- a. Rehabilitasi Kantor Kelurahan Cibogor,
- b. Pengadaan Tanah Kelurahan Panaragan
- c. Seleksi Tilawatil Qur'an
- d. Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
- e. Musrenbang Tingkat Kecamatan
- f. Pembinaan pengelolaan persampahan
- g. Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (PKK)
- h. Penataan PKL di Jalan Lingkungan
- k. Penanggulangan/penanganan darurat bencana
- l. Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan (Perizinan dan Non Perizinan, HO, IMB, IUMK)

**6) Kecamatan Bogor Timur**

- a. Rehabilitasi Kantor Kelurahan Tajur
- b. Seleksi Tilawatil Qur'an
- c. Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
- d. Musrenbang Tingkat Kecamatan
- e. Pembinaan pengelolaan persampahan
- f. Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (PKK)
- g. Penataan PKL di Jalan Lingkungan
- h. Penanggulangan/penanganan darurat bencana
- i. Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan (Perizinan dan Non Perizinan, HO, IMB, IUMK)

**4.3 Tematik Pembangunan Kota Bogor 2017**

Tematik pembangunan Kota Bogor, merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan pada tahun 2017 meliputi :

- 1) Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang
- 2) Pengembangan Koridor 6 Trans Pakuan
- 3) Pengembangan Angkutan Penumpang (Feeder)
- 4) Pengembangan Angkutan/Bus Sekolah
- 5) Pembangunan/Perbaikan Jalan Lingkungan
- 6) Pembangunan/Perbaikan Tembok Penahan Tanah
- 7) Pembangunan/Perbaikan Saluran
- 8) Pembangunan Gedung DPRD Kota Bogor

- 9) Pembangunan/Perbaikan Infrastruktur Air Minum Non PDAM
- 10) Pengadaan dan Peremajaan Sarana dan Prasarana
- 11) Pelayanan Persampahan
- 12) Perlombaan Kebersihan
- 13) Pengadaan, Pembangunan dan Operasional Sarana dan Prasarana ke TPA Nambo
- 14) Pembayaran retribusi/Tipping Fee TPA Nambo
- 15) Pembangunan dan Perbaikan Sarana TPA Nambo
- 16) Peningkatan Sarana Pengolahan Lindi TPA Galuga
- 17) Sosialisasi Pengelolaan Sampah
- 18) Pembangunan Fasilitas Pengurangan Sampah 3R Berbasis Masyarakat
- 19) Pembangunan TPS 3R
- 20) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah
- 21) Pembangunan Ruang Terbuka Hijau
- 22) Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau
- 23) Pembangunan Penerangan Jalan Umum Permukiman
- 24) Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Jalan Lingkar (R2, R3, BIRR)
- 25) Pembangunan Sarana dan Prasarana Jalan R3
- 26) Pembangunan Pedestrian Seputar Kebun Raya (Lanjutan)
- 27) Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kolam Retensi (Lokasi: Ciluar, Mekarwangi)
- 28) Pembangunan Kolam Retensi (Lokasi: Cibuluh)
- 29) Normalisasi dan Pengendalian Banjir Wilayah 2 (Sodetan Perumahan Bogor Country, Perbaikan Gorong-Gorong di Perbatasan Curug Mekar, dll)
- 30) BOS Kota Jenjang TK Negeri, SD Negeri, SMP Negeri
- 31) Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dan JPKM
- 32) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
- 33) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV
- 34) Pemberian Kerja Sementara (PKS)

Selain prioritas pembangunan yang meliputi 6 prioritas dan urusan wajib serta urusan pilihan yang menjadi agenda pembangunan tahun 2017 serta tematik pembangunan Kota Bogor tahun 2017 tersebut di atas, juga harus mengakomodir janji-janji politik Walikota dan Wakil Walikota terpilih antara lain adalah :

Janji Politik	Tahun 2017	Penanggungjawab
1. Peningkatan SDM pengajar PAUD dan standarisasi sarpras minimal PAUD	Ya/Tdk	Dinas Pendidikan
2. Pemerataan ketersediaan SD, SMP, SMA dan SMKN di setiap kecamatan	Ya/Tdk	Dinas Pendidikan
3. Sekolah gratis 12 tahun	Ya/Tdk	Dinas Pendidikan
4. Beasiswa bagi guru dan pelajar pada jenjang dasar dan menengah sebanyak 100 orang per tahun	Ya/Tdk	Dinas Pendidikan
5. Menyediakan buku paket pelajaran	Ya/Tdk	Dinas Pendidikan
6. Meningkatkan kegiatan penelitian siswa di sekolah-sekolah	Ya/Tdk	Dinas Pendidikan



7.	Meningkatkan penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar	Ya/Tdk	Dinas Pendidikan
8.	Menyediakan bus pelajar	Ya/Tdk	Dinas Pendidikan
9.	Pengembangan Puskesmas Induk Rawat Inap di setiap kecamatan	Ya/Tdk	Dinas Kesehatan
10.	Pembangunan RSUD	Ya/Tdk	RSUD
11.	Kunjungan dokter pada keluarga Pra-Sejahtera	Ya/Tdk	Dinas Kesehatan
12.	Peningkatan pelayanan Posyandu	Ya/Tdk	Dinas Kesehatan
13.	Pelayanan kesehatan gratis	Ya/Tdk	Dinas Kesehatan
14.	Pengurangan kemiskinan dan pengangguran serta bantuan usaha kecil	Ya/Tdk	Disnakersostrans
15.	Meningkatkan sarana prasarana olahraga	Ya/Tdk	Kanpora
16.	Pengendalian perizinan dan mewujudkan pengendalian pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berbudaya	Ya/Tdk	BPPT
17.	Peningkatan kawasan pejalan kaki (pedestrian)	Ya/Tdk	Diwasbangkim
18.	Penataan dan penyediaan lahan parkir	Ya/Tdk	DLLAJ
19.	Menyediakan ruang-ruang yang dapat memfasilitasi tumbuh berkembangnya kreatifitas dan jejaring ekonomi kreatif di setiap kelurahan	Ya/Tdk	Diwasbangkim
20.	Meningkatkan kreatifitas melalui penyelenggaraan <i>event-event</i> kreatif	Ya/Tdk	Disbudparekraf
21.	Menyediakan bus wisata	Ya/Tdk	Disbudparekraf
22.	Memberdayakan sarana publik dan museum	Ya/Tdk	Disbudparekraf
23.	Menyediakan kawasan relokasi PKL	Ya/Tdk	POI PP
24.	Percepatan infrastruktur daerah	Ya/Tdk	Diwasbangkim
25.	Transparansi APBD melalui penyediaan akses informasinya di setiap kelurahan	Ya/Tdk	Kominfo
26.	Kerja sama pengawasan dengan KPK	Ya/Tdk	Inspektorat
27.	Peningkatan pelayanan publik hingga tingkat kelurahan	Ya/Tdk	Kelurahan
28.	Peningkatan BOP bagi Kader Posyadu, RT, RW, LPM, dan Linmas	Ya/Tdk	BPMKB
29.	Pembangunan kantor KPUD Kota Bogor	Ya/Tdk	KPUD
30.	Membangun karakter ( <i>character building</i> ) dan <i>akhlaqul</i> karimah melalui ekstra kurikuler	Ya/Tdk	Dinas Pendidikan
31.	Penambahan kesejahteraan bagi guru mengaji	Ya/Tdk	Bag.Kemasyarakatan

Sumber : RPJMD 2015-2019

Keterangan warna hijau dan kuning di atas menggambarkan bahwa janji-janji tersebut telah dan sedang dilaksanakan antara lain seperti pembangunan RSUD Kota Bogor, peningkatan BOP RT/RW dan LPM, sekolah gratis menuju 12 tahun, kerjasama pengawasan dengan KPK, pelayanan kesehatan gratis, menyediakan buku paket pelajaran. Sedangkan yang belum terlaksana antara lain adalah pembangunan kantor KPUD, menyediakan bus wisata, menyediakan bus pelajar, diharapkan semua janji-janji tersebut bisa terakomodir pada akhir masa RPJMD 2015-2019.

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH**

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 yang dituangkan dalam Bab V ini merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi Program dan Kegiatan yang telah dilakukan pada Bab sebelumnya. Adapun penjabarannya disajikan dalam (i) Rencana Program dan Kegiatan OPD Kota Bogor dan (ii) Usulan Rencana Program dan Kegiatan Kategori Bantuan Keuangan, Hibah, Bantuan Sosial dan Subsidi Tahun 2017.

Mengenai penyajian Matrik Rencana Program dan Kegiatan yang digunakan dalam Bab V ini mengacu kepada: (i) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; (ii) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan, (iii) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017, serta (iv) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.

Uraian rencana program dan kegiatan yang disajikan dalam Bab V ini adalah memuat rencana program dan kegiatan yang didanai oleh APBD Kota Bogor. Pagu indikatif belanja daerah tahun 2017 sebesar Rp **3,466,421,546,044,00** terdiri dari Belanja Langsung (BL) sebesar Rp 2.155.629.643.181,00 dan Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. **1.319.791.902.863,00**

#### **5.1 Rencana Indikatif Belanja Langsung (BL) Tahun 2017**

Sesuai arah kebijakan belanja daerah tahun 2017, pengaturan pola pembelanjaan dilaksanakan secara proporsional, efisien dan efektif, Pagu indikatif Belanja Langsung Tahun 2017 sebesar Rp 2.155.629.643.181,00 diarahkan kepada :

- a. Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (welfare state) oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat.
- b. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan program pembangunan yang disertai system pelaporan yang makin akuntabel.
- a. Mengalokasikan anggaran untuk 6 (enam) prioritas Pembangunan yang meliputi :
  - 1) Penataan transportasi dan angkutan umum

- 2) Penataan pelayanan persampahan dan kebersihan kota
  - 3) Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL)
  - 4) Penataan ruang publik, pedestrian, taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
  - 5) Transformasi budaya dan reformasi birokrasi
  - 6) Penanggulangan Kemiskinan
- c. Mengalokasikan anggaran untuk tematik pembangunan Kota Bogor
  - d. Mengalokasikan anggaran untuk memenuhi janji-janji politik dan isu-isu strategis pembangunan Kota Bogor
  - e. Meningkatkan anggaran untuk pendidikan, kesehatan dan peningkatan ekonomi kerakyatan
  - f. Sesuai dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang pembangunan berkeadilan, yang bertujuan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan pencapaian target SDGs serta kebijakan pembangunan pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat.
  - g. Mengalokasikan kebutuhan belanja *fixed cost*, *regular cost*, dan *variable cost* secara terukur dan terarah.

Cakupan kegiatan tetap dan mengikat yaitu kegiatan yang harus dialokasikan oleh OPD karena merupakan kebutuhan dasar untuk operasional dan penunjang kinerja. Sedangkan kegiatan rutin adalah kegiatan yang merupakan tugas fungsi OPD dan bukan kegiatan unggulan namun akan berdampak luas apabila tidak dilaksanakan. Adapun rincian Belanja Langsung adalah sebagaimana tertuang dalam mantrik.

## 5.2 Rencana Indikatif Belanja Tidak Langsung (BTL) Tahun 2017

Rencana indikatif Belanja Tidak Langsung pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.319.791.902.863,00 yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Hibah diantaranya untuk penunjang kegiatan pemilu, Belanja Subsidi, Belanja Bantuan Sosial, Belanja bagi Hasil kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemdes, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab./Kota, Pemdes dan Parpol, serta Belanja Tidak Terduga dengan rincian sebagaimana tertuang pada tabel 5.1. berikut:

**Tabel 5.1.**  
**Rincian Belanja Tidak Langsung Tahun 2017**

NO	BELANJA TIDAK LANGSUNG
1	Belanja Pegawai
2	Belanja Bunga
3	Belanja Hibah
4	Belanja Subsidi
5	Belanja Bantuan Sosial :
-	Bidang kemasyarakatan
-	Bidang kesehatan,
-	Bidang keolahragaan
-	Bidang pendidikan
-	Bidang keagamaan
6	Belanja bagi Hasil kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemdes
7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab./Kota, Pemdes dan Parpol
8	Belanja Tidak Terduga

## **BAB VI**

### **P E N U T U P**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2017, merupakan tahun ketiga dalam rangka perwujudan visi Kota Bogor yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2015-2019. RKPD 2017 merupakan pelaksanaan tahun ketiga RPJMD 2015-2019, dengan demikian tingkat keberhasilan dari pelaksanaan RKPD tahun 2017 ini merupakan langkah ketiga terwujudnya visi RPJMD Kota Bogor yakni “Kota Bogor Yang Nyaman, Beriman, dan Transparan”

Selanjutnya dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD Tahun 2017 adalah sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2017. Penetapan prioritas rencana pembangunan tahun 2017, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2017. Penetapan prioritas rencana pembangunan tahun 2017, mengacu pada isu-isu strategis serta pendekatan kewilayahan. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan pedoman pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh OPD di lingkungan pemerintah Kota Bogor serta seluruh pelaku pembangunan di Kota Bogor, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2017 secara sinergis dan terintegrasi.
2. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan peran serta kontribusi dunia usaha, komunitas dan perguruan tinggi perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperan serta maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan.
3. Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBD Tahun 2017, RKPD 2017 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017, hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Kota Bogor.
4. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan integrasi pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber APBN, APBD Provinsi Jawa Barat dan Sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap OPD harus menyusun dan membuat RENJA OPD masing-masing, sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan Tahun 2017.
5. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan, mekanismenya difasilitasi melalui Forum OPD serta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG), sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas dapat terakomodasi. Oleh karena itu diharapkan tim penyusun RKPD 2017 harus mengawal secara seksama aspirasi dan kepentingan masyarakat mulai dari tingkat Kelurahan hingga tingkat Pusat di dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG).
6. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, setiap OPD wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala 3 (tiga) bulan

- kepada Walikota Bogor, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bogor.
7. Pada akhir tahun anggaran 2017, setiap kepala OPD wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing. Hasil evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada Walikota Bogor melalui BAPPEDA.
  8. Tatacara penyusunan RKPD Tahun 2017 dan penyelenggaraan MUSRENBANG serta forum OPD Tahun 2017 mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah. Mekanisme penyelenggaraan MUSRENBANG di tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota Provinsi Jawa Barat sampai dengan tingkat nasional, perlu ditingkatkan kualitasnya, sehingga dihasilkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang diharapkan.
  9. RKPD Tahun 2017 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsi-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergi, harmonisasi dan efektivitas serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

**WALIKOTA BOGOR,**

**BIMA ARYA**